



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id
Web-site : <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NOMOR : 145 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dan Peraturan Presiden Nomor.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2002-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.
- PERTAMA :** Menetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Penetapan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- KETIGA :** Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT :** Indikasi Target dan Pendanaan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 dapat Dimutakhirkan melalui RKP dan Renja (Rencana Strategis (Renstra) dapat ditinjau kembali dalam kondisi tertentu sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi) dengan pertimbangan kesiapan dan kapasitas pelaksanaan, ketersediaan sumber pendanaan, dan keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat.
- KELIMA :** Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sesuai bidangnya masing-masing.
- KEENAM :**
- a. Pelaksanaan keputusan tentang penerapan rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan agar tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan.
 - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan dilakukan penyempurnaan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
pada tanggal : 28 Desember 2020

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN,



UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323198811 2 001

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Tahun 2020-2024



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah perlu dilakukan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi yang komprehensif dan aplikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan merupakan dokumen penting dalam proses perencanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi yang berisikan tujuan, target, sasaran strategis serta kebijakan dan program yang realistis untuk periode lima tahun. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 mengacu dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2020-2024 dipergunakan sebagai pedoman dan acuan perencanaan bagi Unit Eselon II di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan untuk (1) penyusunan dan penetapan rencana lima tahun (Renstra); (2) penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL); (3) pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan; dan (4) pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan perhubungan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2020-2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM.80 Tahun 2020 tentang Penetapan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Badan Litbang Perhubungan yang telah memberikan substansi, data dan sumbang saran dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan 2020-2024.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Jakarta, 1 Desember 2020

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN



UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323198811 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.1.1 Latar belakang.....	2
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Litbang Perhubungan	2
1.1.3 Kondisi Sumber Daya Manusia.....	7
1.1.4 Capaian dan Evaluasi Renstra 2015-2019.....	10
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	445
1.2.1 Potensi.....	5
1.2.2 Permasalahan	8
1.3. ISU DAN LINGKUNGAN STRATEGIS	49
1.3.1 Isu Strategis Kementerian Perhubungan	49
1.3.2 Isu Strategis Badan Litbang Perhubungan	51
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2020-2024	57
2.1. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.....	57
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	58
2.3. VISI DAN MISI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	59
2.4. TUJUAN, SASARAN PROGAM DAN KEGIATAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN..	61
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	77
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.....	78
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	79
3.2.1 Peran Badan Litbang Perhubungan	80
3.2.2 Fokus Kegiatan Badan Litbang Perhubungan	81
3.3. KERANGKA REGULASI	89
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	90
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	93
4.1. TARGET KINERJA	93
4.2. KERANGKA PENDANAAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2020-2024.....	98
LAMPIRAN I	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	9
Tabel 1.4	Perkembangan jumlah Peneliti Tahun 2015 s.d 2019	10
Tabel 1.5	Hasil Penelitian Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015 -2019.....	10
Tabel 1.6	Perkembangan Peserta Tugas/Ijin Belajar	34
Tabel 1.7	Perkembangan Peserta Diklat Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.....	34
Tabel 1.8	Perkembangan Peserta Kursus, Training/Workshop Dalam dan Luar Negeri Tahun 2015-2019	34
Tabel 1.9	Kegiatan Seminar/Workshop/Roundtable Discussion/Focus Group Discussion/Temu Karya Peneliti	365
Tabel 1.10	Target Anggaran dan Capaian Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2019	40
Tabel 1.11	Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balitbanghub 2019	44
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja Program Badan Litbang Perhubungan 2020-2024	71
Tabel 2.2	Pemetaan Program dan Kegiatan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024	74
Tabel 3.1	Isu Strategis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Sektor Perhubungan	81
Tabel 3.2	Indikasi Tema Riset di Sektor Transportasi	87
Tabel 3.3	Kerangka Kerja Logis Badan Kebijakan Transportasi.....	92
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Program, Meta Indikator, dan Target Tahun 2020-2024 (1).....	94
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Program, Meta Indikator, dan Target Tahun 2020-2024 (2)	95
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Program, Meta Indikator, dan Target Tahun 2020-2024 (3)	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Litbang Perhubungan	3
Gambar 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai di Bidang Litbang Perhubungan	8
Gambar 1.3	Jumlah Peneliti di Badan Litbang Perhubungan	9
Gambar 1.4	Perbandingan Tingkat Penyerapan Anggaran Badan Litbang Tahun 2015-2019	41
Gambar 1.5	Kinerja berdasarkan Realisasi Perjanjian Kinerja 2015-2019	42
Gambar 1.6	Capaian IKU Badan Litbang Perhubungan 2015-2019.....	43
Gambar 2.1	Peta Strategis Kementerian Perhubungan.....	60
Gambar 2.2	Peta Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.....	65
Gambar 3.1	Presentase Penelitian Badan Litbang Berdasarkan Tema/Topik Tahun 2015-2019	88
Gambar 3.2	Konsep Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap K/L diharuskan menyusun sistem perencanaan berjenjang yang dimulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dimana pada setiap rencana mengacu kepada dokumen perencanaan yang ada di atasnya sehingga perencanaan yang ada saling terkait antara perencanaan pada level nasional sampai dengan perencanaan teknis di masing-masing K/L. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Kerja Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, dan tujuan Badan Litbang Perhubungan; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; target kinerja dan kerangka pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Secara substansi penyusunan Renstra Badan Litbang Perhubungan mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap IV yaitu periode tahun 2020-2025 atau yang merupakan periode terakhir pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Tujuan RPJMN Tahap IV, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjabarkan berbagai strategi untuk mencapai konektivitas, pelayanan transportasi serta keselamatan dan keamanan transportasi. Tentunya berbagai isu strategis muncul dalam pencapaian tujuan tersebut, sehingga Badan Litbang Perhubungan bertugas untuk memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Perhubungan.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka semua satuan kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, pimpinan dan staf harus melaksanakan program yang telah ditetapkan tersebut secara “PROAKTIF” (profesional, akuntabel, integritas, dan inovatif) serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja (*performance improvement*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya maka akan dilakukan evaluasi terhadap capaian target dan pelaksanaan anggaran dalam Renstra setiap tahunnya dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Dalam kedudukannya Renstra Badan Litbang Perhubungan sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan menuju suatu sistem pembangunan penelitian dan pengembangan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan. Renstra Badan Litbang Perhubungan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta pengukuran kinerja penelitian dan pengembangan, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi Badan Litbang Perhubungan.

Badan Litbang Perhubungan sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan kegiatan penelitian di bidang transportasi senantiasa dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan mengembangkan langkah-langkah strategis dan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adanya perubahan dan perkembangan lingkungan baik pada skala dalam negeri, global yang dinamis maupun tuntutan Reformasi Birokrasi harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ke depan.

Milestone capaian dan kondisi eksisting merupakan input penting dalam penyusunan Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024. Beberapa aspek seperti kelembagaan, sumber daya manusia, teknis penelitian dan pengembangan, serta beberapa aspek lainnya dievaluasi untuk dijadikan dasar perencanaan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Litbang Perhubungan

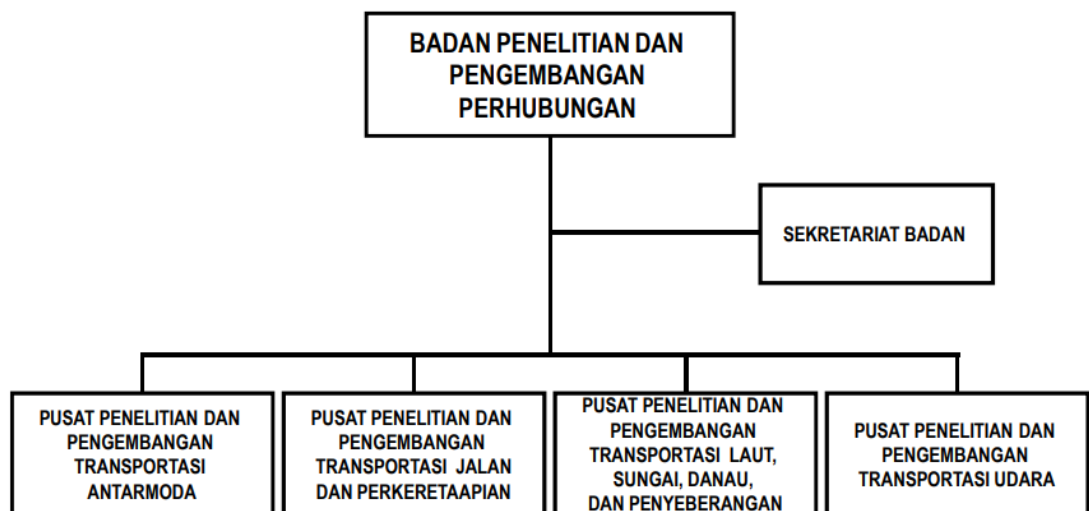
Pelaksanaan kegiatan Badan Litbang Perhubungan sampai dengan Tahun 2019 mengacu kepada tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan Menteri Perhubungan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- (b) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
- (c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- (d) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Transportasi;
- (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Organisasi Badan Litbang Perhubungan terdiri dari jajaran eselon II yang terdiri dari (1) Sekretariat Badan Litbang Perhubungan; (2) Pusat Litbang Transportasi Antarmoda; (3) Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian; (4) Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (5) Pusat Litbang Transportasi Udara.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Litbang Perhubungan

Pada masing-masing Pusat Litbang Transportasi, terdapat kelompok jabatan fungsional peneliti sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, yaitu peneliti bidang manajemen transportasi multimoda, transportasi jalan dan kereta api, transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan, serta transportasi udara.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sektor transportasi yang semakin kompleks dan meluas serta pengembangan inovasi teknologi guna meningkatkan fungsi Pusat Litbang Transportasi yang ada saat ini

organisasi Badan Litbang Perhubungan akan disempurnakan untuk periode lima tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Badan Litbang Perhubungan dibantu oleh 5 (lima) Eselon II yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Sekretariat Badan Litbang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Unit kerja Sekretariat Badan Litbang Perhubungan terdiri dari: Bagian Perencanaan dan Kerja sama, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, Bagian Data, Hubungan Masyarakat dan Publikasi, dan Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran serta administrasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan dan transportasi udara;
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian Badan Litbang Perhubungan;
- (3) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatausahaan serta organisasi dan tata laksana Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- (4) Pengelolaan data, hubungan masyarakat, hukum, serta publikasi hasil-hasil penelitian; dan
- (5) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan serta kerumaha-tanggaan.

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda. Unit kerja Puslitbang Transportasi Antarmoda terdiri dari Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian dan Subbagian Tata Usaha. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Litbang Transportasi Antarmoda menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda;
- (2) Penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda;
- (3) Penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda;

- (4) Penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda;
- (5) Penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda; dan
- (6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian

Pusat Penelitian dan Pengembangan transportasi jalan dan perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian. Unit kerja Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian terdiri dari Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian dan Subbagian Tata Usaha. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian;
- (2) Penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian;
- (3) Penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian;
- (4) Penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian;
- (5) Penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian; dan
- (6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan transportasi jalan dan perkeretaapian.

d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan. Unit kerja Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri dari Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian dan Subbagian Tata Usaha. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan;

- (2) Penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan;
- (3) Penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan;
- (4) Penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan;
- (5) Penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan; dan
- (6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan.

e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara. Unit kerja Puslitbang Transportasi Udara terdiri dari Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian dan Subbagian Tata Usaha. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Litbang Udara menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara;
- (2) Penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara;
- (3) Penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara;
- (4) Penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara;
- (5) Penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara; dan
- (6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.

Badan Litbang Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, dan pemberian rekomendasi Kebijakan Transportasi. Sedangkan fungsi dari badan Badan Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program pengkajian, serta kerja sama di bidang pengkajian kebijakan transportasi;
- b. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan transportasi;

- c. Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program pengkajian, serta kerja sama di bidang pengkajian kebijakan transportasi;
- d. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Transportasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Transportasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri Perhubungan.

1.1.3 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Jumlah SDM Badan Litbang Perhubungan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 tercatat sebanyak 168 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

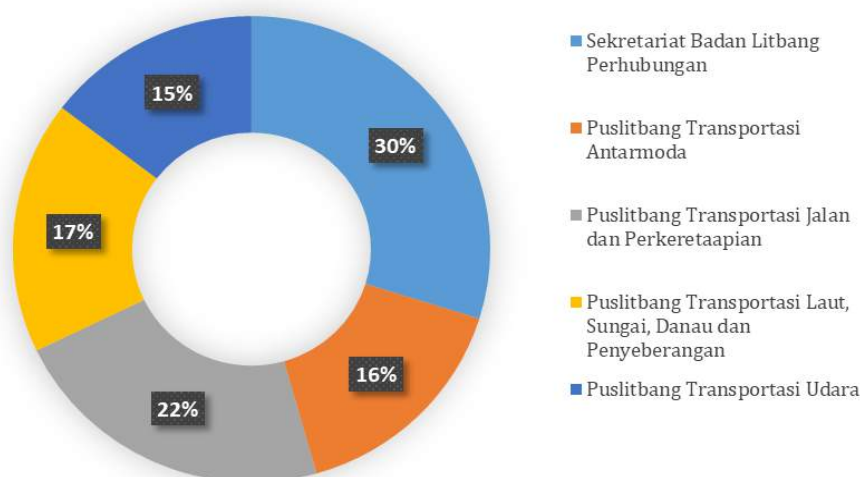
a. Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci, perkembangan jumlah pegawai empat tahun terakhir dan komposisi pegawai dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.2 di bawah ini:

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

NO	UNIT KERJA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	83	58	55	52	51
2	Puslitbang Transportasi Antarmoda	33	25	26	27	27
3	Puslitbang Trans Jalan dan Perkeretaapian	54	42	43	39	38
4	Puslitbang Transportasi Laut, SDP	33	30	31	32	30
5	Puslitbang Transportasi Udara	43	35	35	29	25
JUMLAH		246	190	190	179	171

Berdasarkan data grafik di atas, terlihat jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai pada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan sebesar 30% atau sebanyak 51 pegawai sedangkan jumlah pegawai paling sedikit pada Puslitbang Transportasi Udara, yaitu sebanyak 25 pegawai atau sekitar 15% dari total jumlah pegawai Badan Litbang Perhubungan. Sementara untuk unit kerja lainnya, Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian berada di posisi kedua dengan jumlah pegawai terbanyak, yaitu 38 atau 22%, selanjutnya posisi ketiga adalah Puslitbang Transportasi Laut, Sungai Danau, dan Penyeberangan sebanyak 30 pegawai atau 17% dan Puslitbang Transportasi Antarmoda sebanyak 27 pegawai atau 16%.



Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai di Bidang Litbang Perhubungan

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, yaitu S3 sebanyak 6 orang, S2 sebanyak 77 orang, D IV/S1 sebanyak 53 orang, D III sebanyak 17 orang, D I sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 12 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menurut unit kerja masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1/DIV	DIII	D1	SLTA	
1	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	1	16	16	9	2	7	51
2	Puslitbang Transportasi Antarmoda	0	16	7	2	1	1	27
3	Puslitbang Trans Jalan dan Perkeretaapian	0	20	14	1	1	2	38
	Puslitbang Transportasi Laut, SDP	3	15	6	3	1	2	30
5	Puslitbang Transportasi Udara	2	10	10	2	1	0	25
JUMLAH		6	77	53	17	6	12	171

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

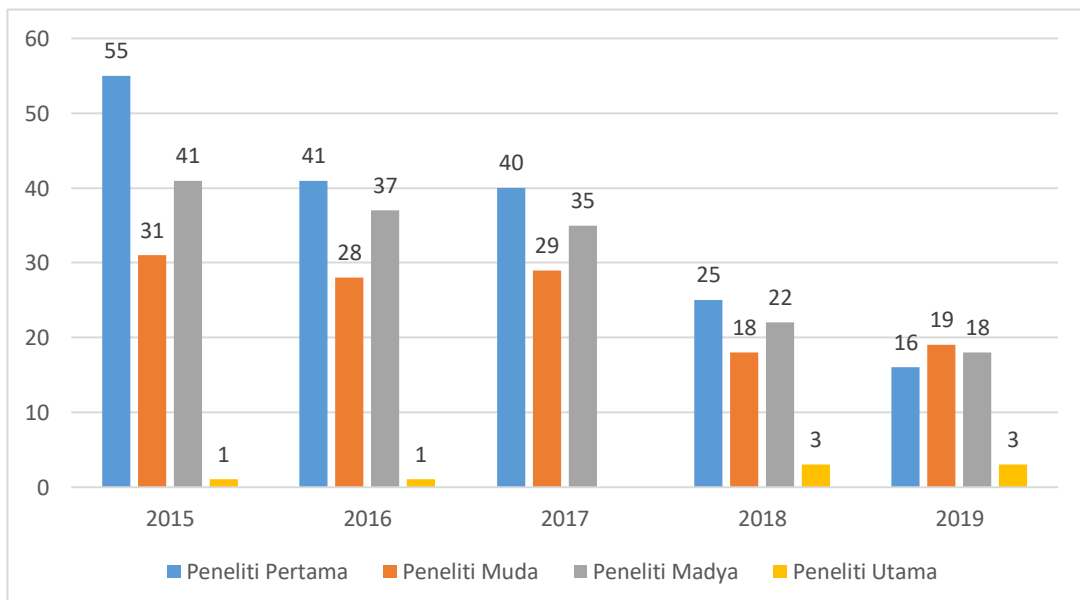
Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 85 orang dan perempuan sebanyak 86 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin menurut unit kerja masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	2019		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	20	31	51
2	Puslitbang Transportasi Antarmoda	12	15	27
3	Puslitbang Trans Jalan dan Perkeretaapian	23	15	38
4	Puslitbang Transportasi Laut, SDP	21	9	30
5	Puslitbang Transportasi Udara	9	16	25
JUMLAH		85	86	171

d. Perkembangan Jumlah Tenaga Fungsional Peneliti

Dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan kegiatan penelitian maka sebagian besar pegawai Badan Litbang Perhubungan memiliki Jabatan Fungsional Peneliti. Pertumbuhan jumlah peneliti Badan litbang Perhubungan selama kurun waktu empat tahun dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini:



Gambar 1.3 Jumlah Peneliti di Badan Litbang Perhubungan

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat tren perkembangan jumlah peneliti cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 yang semula berjumlah 128 orang berkurang menjadi 56 pada tahun 2019, penurunan jumlah peneliti disebabkan karena:

- sebagian peneliti Badan Litbang Pindah ke BPTJ;
- Adanya aturan bahwa peneliti tidak bisa lagi merangkap pada waktu yang sama antara jabatan structural dengan fungsional, dimana sebagian peneliti telah ditugaskan untuk duduk dalam jabatan structural;
- Adanya moratorium ASN/ Penerimaan ASN yang tertunda;

- d. Adanya mutasi dan rotasi tour offduty lintas Eselon I, dimana sebagian peneliti ditugaskan di unit Eselon I lainnya sebagai structural atau dosen;
- e. Adanya jumlah peneliti yang memasuki usia pensiun.

Peneliti Badan Litbang Perhubungan terdistribusi ke dalam empat jenjang peneliti, yaitu Peneliti Utama, Peneliti Madya, Peneliti Muda dan Peneliti Pertama. Perkembangan jumlah peneliti Badan Litbang Perhubungan berdasarkan jenjang jabatan selama kurun waktu empat tahun terakhir disajikan pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1. 4 Perkembangan jumlah Peneliti Tahun 2015 s.d 2019

NO	JENJANG JABATAN	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Peneliti Utama	1	1	0	3	3
2	Peneliti Madya	41	37	35	22	18
3	Peneliti Muda	31	28	29	18	19
4	Peneliti Pertama	55	41	40	25	16
JUMLAH		128	107	104	68	56

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan litbang Perhubungan, 2019

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia guna mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, selain proses rekrutmen yang baik dan benar dan program pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pengembangan kapasitas pegawai, juga diperlukan sistem pemberian *reward and punishment* yang tepat dan efektif atas kinerja pegawai.

1.1.4 Capaian dan Evaluasi Renstra Balitbanghub 2015-2019

A. Realisasi Hasil Penelitian Transportasi

Selama kurun waktu 2015-2019 kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan berupa penelitian/ studi dan telaahan/ kajian. Kegiatan penelitian Badan Litbang Perhubungan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara berupa penelitian/studi dan telaahan/kajian berupa penelitian kebijakan perencanaan yang baik yang sifatnya lintas sektoral dan berupa penelitian dukungan, maupun penelitian yang sifatnya mendukung kebijakan untuk sector transportasi tertentu. Jumlah keseluruhan kegiatan penelitian yang dibiayai anggaran APBN dari tahun 2015-2019 tersaji pada Tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1. 5 Hasil Penelitian Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015 -2019

JUDUL STUDI TAHUN 2015	
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	
1.	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
2	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kota Tarakan
3	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kota Bogor
4	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kota Surakarta
5	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kota Jogjakarta
6	Penyusunan Pedoman Harga Satuan Pekerjaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

7	Kajian Strategis Implementasi Hasil Penelitian Dalam Rangka Mewujudkan PNPB
8	Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Badan Litbang Perhubungan
9	Survey Asal Tujuan Bodetabek
PUSLITBANG MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA	
1	Pedoman Pembangunan Integrasi Transportasi dalam Pembangunan dan Desain <i>Logistic Center</i>
2	Evaluasi Implementasi PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan PM No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda
3	Pengembangan Aksesibilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke Sumatera Utara
4	Kesiapan Transportasi Multimoda dalam mendukung <i>Short Sea Shipping</i> di Pulau Jawa
5	Kesiapan Transportasi Multimoda dalam Rangka Mendukung Pengoperasian Jalur Ganda (<i>Double Track</i>) Kereta Api Jakarta-Surabaya Jakarta-Surabaya
6	Pengembangan Terminal Multimoda Berbasis Angkutan Kereta Api untuk Mendukung Optimalisasi Angkutan Barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
7	Integrasi Rencana Induk Transportasi Nasional (Sistranas Pada Tatranas)
8	Masterplan Sistem Logistics Center dalam Rangka Keterpaduan Transportasi di Indonesia (<i>Studi kasus kesiapan transportasi untuk mendukung logistics center di Koridor Jawa</i>)
9	Pengembangan Urban Logistics dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang di Kota Surabaya
10	Peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi di Propinsi Bengkulu Dalam Konteks Negara Maritim dan Penguatan Daerah Tertinggal
11	Penyusunan Pedoman Evaluasi Kemanfaatan Investasi Transportasi Publik
12	<i>Updating</i> Pengukuran Kinerja Logistik Indonesia (LPI Indonesia)
13	Strategi Perwujudan Regulasi Sistem Transportasi Nasional
14	Studi Desain dan Uji Coba Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN)
15	Penyusunan Pedoman Implementasi Standar Pelayanan Bidang Perhubungan (studi kasus SPM bidang angkutan jalan)
16	Implementasi <i>Intermodal Transport Data Base</i> (ITDB)
17	Integrasi Pelayanan Penumpang di Simpul Transportasi Merak
18	Distribusi Pengguna <i>Commuter Line</i> (CL) dalam Pemanfaatan Fasilitas Publik Pejalan Kaki Mencapai Objek Wisata Kebun Raya Bogor
19	Pengembangan Angkutan Pemadu Moda Terminal Dhaksinarga Wonosari-Bandara Adi Sutjipto-Stasiun Tugu
20	Penyusunan Rencana Jaringan Multimoda di Kota Gorontalo
21	Kajian Pengembangan <i>Shuttle Bus</i> Destinasi Pariwisata
22	Tinjau Ulang Jaringan Transportasi Penumpang di Kab. Pringsewu
23	Tinjau Ulang Jaringan Transportasi Barang di Kab. Pringsewu
24	Tinjau Ulang Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi di Kab. Pringsewu
25	Kajian Penentuan Lokasi Terminal Angkutan Barang di Kab. Banyuwangi
26	Pengembangan Fasilitas Lajur Khusus Sepeda di Perkotaan Wonosari Kab. Gunung Kidul
27	Pengembangan Jaringan Transportasi dan Simpul Transportasi (Gunung Kidul)
28	Penyusunan Jaringan Trayek dan Jaringan Lintas Gorontalo
29	Evaluasi Jaringan Lintas Angkutan Barang di Bengkulu
30	Sistem Informasi Pergudangan di Palembang
31	Revitalisasi Layanan Intermoda Angkutan Laut Tanjung Tiram ke Kuala Tanjung
32	Pengembangan Transportasi Provinsi Kalimantan Selatan
33	Pengembangan Transportasi Nusa Tenggara
34	Pengembangan Transportasi Provinsi Bali
35	Pengembangan Transportasi Provinsi Kalimantan Tengah
36	Pengembangan Transportasi Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat
37	Pengembangan Transportasi Provinsi Papua Barat
38	Pengembangan Transportasi Provinsi Maluku
39	Pengembangan Transportasi Provinsi Riau
40	Pengembangan Transportasi Provinsi Maluku Utara
41	Pengembangan Transportasi Sumatera Bagian Selatan
42	Pengembangan Transportasi Sumatera Bagian Utara
43	Pengembangan Transportasi Pesisir Barat Sumatera

44	Pengembangan Transportasi Provinsi Papua
45	Pengembangan Transportasi Sulawesi
46	Pengembangan Transportasi Jawa
PUSLITBANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN	
1	Studi Aplikasi Pencatatan dan Verifikasi Kendaraan Masuk dan Keluar Wilayah
2	Studi Penyusunan Master Plan Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah
3	Studi Penyelenggaraan Angkutan Massal Wilayah Aglomerasi Mataram dan Sekitarnya
4	Penyusunan Pedoman Analisis Dampak Lalu Lintas dan Sertifikasi Analisis Dampak Lalu Lintas
5	Studi Penyusunan Evaluasi Desain Terminal Penumpang Tipe A
6	Pengembangan Teknologi Penggunaan Jalur KA
7	Review Rencana Induk Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
8	Studi Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
9	Studi Prediksi Potensi Demand Kereta Api, Jalan Tol, dan Angkutan Laut di Sumatera
10	Profil Pengujian Kendaraan Bermotor
11	Lanjutan Penelitian Pengoperasian Motor Listrik di Jalan
12	Survei Prediksi Angkutan Lebaran 2015
13	Sistem Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
14	Penilaian Kinerja Lalu Lintas Pada Jalan Nasional di Kota-Kota Metropolitan
15	Penelitian Implementasi Tachograph Pada Kendaraan Bermotor di Jalan
16	Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Umum Jalan
17	Penelitian Pengembangan Pendeteksi Dini Longsoran dan Anjlogan Pada Prasarana Kereta Api
18	Penyusunan Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
19	Studi Pemodelan Transportasi untuk Jawa Dan Jabodetabek
20	Studi Kelembagaan BPTJ
21	Kajian Updating Data dan Informasi Alur Sungai di Kota Palembang
22	Penelitian Pemanfaatan Sungai Talo Untuk Pengangkutan Barang dan Penumpang Guna Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Makassar
23	Penelitian Pengoperasian Angkutan Lingkungan
24	Studi Peningkatan dan Pengembangan Terminal bobotsari Kabupaten Purbalingga
25	Pengembangan Sistem Transportasi di Kabupaten Sumedang Terkait adanya Rencana Pembukaan Jalan Tembus Sukasari – Lembang
26	Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Dengan Adanya Rencana Pembukaan Akses Jalur Lingkar Selatan di Sumedang
27	Kajian Penanganan Kemacetan di Ruas Jalan Raya Tanjungsari Kabupaten Sumedang
28	Kajian Konsep Kebijakan Pengelolaan Terminal Bus Tipe A (Terminal Harjamukti, Cirebon)
29	Analisis Kemacetan Perlindungan Sebidang pada Pengoperasian Kereta Api Bandara Kualanamu
30	Dampak Lalu Lintas Pada Perlindungan Sebidang di Perlindungan Sebidang Jalan Teuku Amir Hamzah (21+600) Lintas Kereta Api Bandara Kualanamu
31	Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan Propinsi pada Ruas Jalan Patuk - Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul
32	Kajian Fasilitas perlengkapan dan pendukung jalan di kota Wonosari Kabupaten Gunungkidul (Ruas Jalan Agus Salim - Sugiyapranata)
33	Reaktifasi Jalur Kereta api lintas Rangkasbitung - Pandeglang – Labuhan
34	Penetapan kelas stasiun kecil untuk stasiun pada jaringan kereta api nasional
35	Penetapan kelas stasiun besar untuk stasiun pada jaringan kereta api nasional
36	Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum di Kota Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
37	Pengukuran Kinerja Lalu Lintas sebagai akibat pembatasan sepeda Motor pada kawasan koridor jalan utama DKI Jakarta
38	Studi Pengaruh Pembatasan kendaraan sepeda motor di kawasan koridor jalan utama DKI Jakarta
39	Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab Keselamatan
40	Studi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas di Kota Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow

	Utara
41	Kajian Konsep kebijakan pengelolaan Terminal Bus Tipe A (Terminal BuluPitu di Purwokerto)
42	Studi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas Kawasan CBD (Central Business District) Kota Grogot Kabupaten Passer
43	Penelitian Pembangunan Dermaga Sungai Srimenanti di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
44	Kajian Pengembangan manajemen Rekayasa Lalu Lintas 3 (tiga) Jalur Kota Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi
45	Studi Implementasi CNG Pada Kendaraan Angkutan Umum
46	Analisis Walkability Dalam Upaya Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Pejalan Kaki di Stasiun Bogor dan Bandung
47	Kajian Pengoperasia Becak Motor (Bentor) di Wilayah Gorontalo
48	Pengkajian kondisi lalu lintas pada beberapa ruas jalan di Kota Medan
49	Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian berkala Kendaraan Bermotor
50	Kajian Pengaruh Regulasi dan Fasilitas Terminal Terhadap Tingkat Kepuasan Penumpang di Terminal Bus Rajekwesi Kabupaten Bojonegoro
51	Kajian Inventarisasi Permasalahan Transportasi Daerah di Jabodetabek untuk Mendukung RITJ (DKI Jakarta dan Banten)
52	Kajian Inventarisasi Permasalahan Transportasi Daerah di Jabodetabek untuk Mendukung RITJ (Jawa Barat)
53	Kajian Optimalisasi Kereta Api Komuter Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) Dalam Mendukung Mobilitas orang di Kawasan Aglomerasi Mebidang
54	Pengaruh Pengoperasian Tol Cikapali Terhadap Jalur Pantura pada Angkutan Lebaran 2015
55	Kajian Penataan Pasar Tumpah Guna Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas di Jalur Pantai utara Jawa Barat
56	Survey Terminal Bayangan di DKI Jakarta Pada Angkutan Lebaran 2015
57	Studi Karakteristik dan Persepsi Pengguna Sepeda Motor Pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2015 (Bekasi - Brebes)
58	Studi Karakteristik dan Persepsi Pengguna Sepeda Motor Pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2015 (Cirebon - Subang)
59	Evaluasi Arus Mudik Angkutan Motor Gratis Lebaran 2015
60	Evaluasi Arus Balik Angkutan Motor Gratis Lebaran 2015
61	Kinerja Simpul Strategis di Kota DKI Jakarta dan Bekasi Pada Angkutan Lebaran 2015
62	Kinerja Simpul Strategis di Kota Tangerang Pada Angkutan Lebaran 2015
63	Kinerja Simpul Strategis di Kota Bandung Pada Angkutan Lebaran 2015
64	Kinerja Simpul Strategis di Kota Semarang Pada Angkutan Lebaran 2015
65	Kinerja Simpul Strategis di Kota Solo Pada Angkutan Lebaran 2015
66	Kinerja Simpul Strategis di Kota Yogyakarta Pada Angkutan Lebaran 2015
67	Kinerja Simpul Strategis di Kota Surabaya Pada Angkutan Lebaran 2015
68	Pengkajian Kemungkinan Stasiun di Kota Cirebon Sebagai Stasiun Bongkar Muat Angkutan Barang
69	Pengembangan Trayek di Kota Banjarbaru
70	Preferensi Pengguna Angkutan Jalan di Kota Banjarbaru
71	Studi Manajemen Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Adi Sucipto di Wilayah Kabupaten Kuburaya
72	Studi Kemungkinan Penerapan ERP (Elektronik Road Pricing) di Kota Medan
73	Preferensi Pengguna Angkutan Jalan di Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember
74	Studi Jaringan Pelayanan Angkutan Umum dalam Kota di Kabupaten Jember
75	Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum di Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Pariwisata di Danau Toba
76	Kajian Penertiban Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) di Wilayah Kota Cirebon
77	Kajian Peningkatan Fasilitas Pejalan Kaki di Perkotaan Wonosari
78	Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Magelang
79	Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Cimahi
80	Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Keselamatan Berlalu lintas di Kota Bogor
81	Kajian Supply Demand BRT pada Rencana Koridor I Mataram

82	Kajian Supply Demand BRT pada Rencana Koridor II Mataram
83	Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Kediri
84	Kajian Audit jalan Guna Mengurangi Rawan Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Ciamis
85	Kajian Pengembangan KA komuter Surabaya-Sidoarjo Lintas Surabaya Kota -Bangil ditinjau dari permintaan Penumpang di Surabaya
86	Analisis kebijakan penyelenggaraan angkutan anak sekolah di kota Bandung
87	Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Juknis Pelaksanaan DAK tahun 2016
88	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Simpang Empat Mall Ska Pekanbaru
89	Revitalisasi Sungai Kandilo sebagai Lalu Lintas Angkutan Air di Tanah Grogot Kabupaten Passer Provinsi Kalimantan Timur
90	Studi Profil Bidang Lalu Lintas di Kota Mataram
91	Studi Penyusunan Profil Keselamatan Transportasi Darat di Kota Mataram
92	Studi Profil Penyusunan Profil transportasi multimoda di Kota Mataram
93	Studi Penyusunan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum di Kota Mataram
94	studi penyusunan profil angkutan umum di kota solok (PADANG)
95	Studi Penyusunan Profil Lalu lintas di Kota Solok (PADANG)
96	Studi Bidang Keselamatan Lalu lintas di Kota (Solok) Padang
97	Studi Penyusunan Profil Lalu Lintas di Kota Banjarbaru
98	Studi Profil Bidang Keselamatan Lalu lintas di Kota Banjarbaru
99	Studi Profil Bidang Multimoda di Kota Banjarbaru
100	Kajian Penerapan Ruang Henti Khusus Kendaraan (RHK) Sepeda Motor Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Simpang
101	Studi Koordinasi Simpang dengan Pemberian Prioritas Pada Bus Trans Bandar Lampung
102	Analisa Pengaruh Kegiatan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night) Terhadap kinerja Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung
103	Studi Penyusunan Profil Lalu lintas di Kabupaten FakFak
104	Studi Penyusunan Profil Angkutan Umum di Kota Magelang
105	Analisis Pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto terhadap Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo
106	Analisis Kebutuhan Terminal Angkutan Barang di Kabupaten Bandung
107	Studi Analisis Angkutan wisata Ciwidey di Kabupaten Bandung
108	Analisis Penataan Lalu Lintas di Jalan (Kopo)- Soreang di Kabupaten Bandung
109	Kajian Pengaruh Penerapan Lajur Khusus Bus Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Rencana Penerapan Lajur Khusus Bus Trans Metro Bandung)
110	Pengajian Stasiun di Wilayah Bandung dan Sekitarnya sebagai Lokasi Bongkas Muat Angkutan Batubara
111	Analisis Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan di Indonesia
112	Validasi Survey Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2015
113	Analisa Pelayanan Penggunaan Tol cipularang dengan memakai Intsertvqua
114	Kajian Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Tanjung Duri Terhadap Nilai Waktu dan Biaya Perjalanan di Kota Batam
115	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kota Batam (Studi Kasus di Jalan Umum Bareleng)
116	Kajian elektrifikasi jalur kereta api Yogyakarta – Surakarta
117	Evaluasi Kinerja Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang
118	Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Apartment Bliss park di Kota Batam
119	Studi Manajemen Rekayasa Lalu - Lintas (SSA) di Kabupaten Sukabumi
PUSLITBANG PERHUBUNGAN LAUT	
1	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Larat dan Taniwel
2	Penelitian Evaluasi Pelabuhan UPT yang Dapat Diusahakan
3	Penelitian Pengembangan Transportasi Laut untuk Daerah Terpencil dalam Mendukung Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Maluku
4	Penelitian Pengembangan Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut di Indonesia
5	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Tifure dan Mangga Dua
6	Penelitian Standar Kapal dan Alur Pelayaran Pada Simpul Jaringan Trayek Utama (Trunk Route)

7	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Loleojaya dan Jailolo
8	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Dama dan Darume
9	Penelitian Kebutuhan Fasilitas Kapal Penumpang Berdasarkan Gender
10	Penelitian Pengembangan Transportasi Laut Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Nusa Tenggara Timur
11	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Bicoli dan Tapaleo
12	Penelitian Model Sistem Logistik dalam Mendukung Konektivitas Infrastruktur Transportasi Laut di Provinsi Maluku Utara
13	Penelitian Optimalisasi Jaringan Angkutan Laut di Indonesia
14	Penelitian Pelayanan Kapal Komersial (Kapal Peln) untuk Masuk pada Setiap Ibukota Kabupaten/Kota Maluku
15	Penelitian Pengembangan Angkutan Air dalam Mendukung Pengembangan Kawasan MIFFE di Merauke
16	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Galela dan Bisui
17	Kajian Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Peralatan Keselamatan Pada Moda Transportasi Laut dan Penyeberangan di Propinsi Maluku
18	Kajian Pengembangan Simpul Potensial Transportasi Sungai di Kab Musi Banyuasin
19	Kajian Analisis Pelabuhan Diusahakan Oleh PT. (Persero) Pelindo IV Yang Merugi dan Diusulkan Untuk Dikelola Oleh Pemerintah
20	Kajian Kelayakan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Uf Mar dan Pelabuhan Weduar
21	Kajian Dampak Pengerukan dan Reklamasi Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan di Indonesia
22	Kajian Evaluasi Pembangunan Dermaga Pelayanan Rakyat Pelabuhan Kalianget
23	Kajian Evakuasi Pembangunan Pelabuhan Laut Tiram Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat
24	Kajian Peningkatan Pelayanan Perintis Untuk Wilayah Kepulauan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan.
25	Kajian Pengembangan Pelayanan Perintis Pada Pulau Terisolir di Kepulauan Riau
26	Kajian Pengembangan Pelabuhan Tilamuta di Teluk Tomini Kabupaten Boalemo, Gorontalo Utara
27	Kajian Pengembangan Kawasan Pelabuhan Kontainer Matui di Kabupaten Halmahera Barat
28	Kajian Analisis Pemilihan Lokasi Penggati Pelabuhan Cilamaya
29	Kajian Kelayakan Pengoperasian Pelabuhan Pangkalan Susu Sebagai Pelabuhan Umum
30	Kajian Pengembangan Jaringan Transportasi Angkutan Laut RYTE Sei Berombang ke Teluk Nibung
31	Kajian Kewenangan Statutori Kapal Berbendera Indonesia Yang Berlayar ke Luar Negeri
32	Kajian Pelabuhan UPT yang Dapat di Usahakan Dengan Model Badan Layanan Umum (BLU)
33	Kajian Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Laut di Kawasan Timur Indonesia
34	Kajian Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Laut di Kawasan Barat Indonesia
35	Kajian Peningkatan Hierarki Pelabuhan Malindung, Tarakan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan
36	Sinkronisasi Evaluasi Kemanfaatan Tahun 2015
37	Kajian Usulan Pembangunan Dermaga di Karimun Jawa
38	Kajian Peningkatan Dermaga/Pelabuhan di Kabupaten Buton Tengah
39	Kajian Penambahan Kapal Perintis di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi
40	Kajian Peningkatan Pembangunan Pelabuhan Penumpang Speed Boat Malinau Kota, Kalimantan Utara
41	Kajian Pengoperasian Rute Transportasi Laut Ke Wilayah Amfoang, Nusa Tenggara Timur
42	Kajian Pembangunan Dermaga Pelabuhan Waiwadan, Nusa Tenggara Timur
43	Kajian Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang
44	Kajian Evaluasi Kemanfaatan Tahun 2016 di Kawasan Barat Indonesia
45	Kajian Evaluasi Kemanfaatan Tahun 2016 di Kawasan Timur Indonesia
46	Kajian Kebutuhan Transportasi Penyeberangan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
47	Kajian Sarana Transportasi laut di Kabupaten Lombok Utara
48	Kajian Pembangunan Fasilitas Sarana Prasarana terminal penyeberangan di Kota Tual

49	Kajian Potensi Pembangunan Pelabuhan Wisata Bahari Kabupaten Sorong
50	Kajian Potensi Pembangunan Pelabuhan Wisata Bahari Kabupaten Lombok
51	Kajian Kriteria Penilaian Kemanfaatan Investasi Sektor Transportasi Laut
PUSLITBANG PERHUBUNGAN UDARA	
1	Studi Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Bandar Udara
2	Studi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Balai Penelitian Teknologi Keselamatan Penerbangan
3	Studi Pengelolaan Lalu Lintas Penerbangan dan Penataan Rute Penerbangan di Indonesia
4	Penelitian Pengembangan Software untuk Metoda Analisa Damage Tolerance Repair Struktur Pesawat Terbang
5	Penelitian Supply Chain dan Metoda Manufacture Bahan Composite untuk Sektor Transportasi Udara
6	Studi Pengembangan Bandar Udara Aerotropolis di Indonesia
7	Studi Evaluasi Kinerja dan Penataan Rute Angkutan Udara Perintis di Kawasan Timur
8	Penelitian Implementasi Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) di Indonesia
9	Studi Kebutuhan Peralatan dan Sumber Daya Manusia Balai Penelitian Teknologi Keselamatan Penerbangan
10	Penelitian Implementasi Peralatan Multi User Check In System di Bandar Udara
11	Penelitian Evaluasi dan Kesiapan Air Navigation Training Area
12	Studi Biaya Jasa Pelayanan Navigasi
13	Studi Potensi Peningkatan Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri (Local Content) Dalam Rancang Bangun Pesawat Produk Indonesia
14	Pengkajian Beban Kerja Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
15	Pengkajian Pengembangan dan Pembangunan Bandara UPT. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Raden Inten II-Bandar Lampung
16	Pengkajian Persiapan Bandar udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Dalam Mendukung Pelaksanaan ASIAN GAMES ke XVIII Pada Tahun 2018
17	Pengkajian Pembangunan Bandar Udara Baru di Kota Singkawang – Kalimantan Barat
18	Pengkajian Kelayakan Pembangunan Landasan Pesawat Ampibi Perairan Danau Toba-Sumatera Utara
19	Pengkajian Peningkatan Fungsi Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Kantor Otoritas Bandara di Bandar Udara Sultan Hasanuddin-Makassar
20	Pengkajian Konsistensi Pembangunan dan Pengembangan Bandara Mozes Kilangin-Timika
21	Pengkajian Peningkatan Pelayanan Air Traffic Services (ATS) di Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
22	Pengkajian Rencana Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Bandara Malikussalaeh Kabupaten Aceh Utara
23	Pengkajian Strategi Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara (Tindak Lanjut Surat Edaran No. HK.209/I/II PHB. 2014)
24	Pengkajian Revitalisasi Bandara Banding Agung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan
25	Pengkajian Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Alas Leuser – Aceh
26	Pengkajian Perubahan Ketentuan Penetapan Tarif Terhadap Pemilihan Maskapai Oleh Penumpang
27	Pengkajian Dampak Penerbangan Perintis Terhadap Kemajuan Daerah 5-10 Tahun Terakhir
28	Pengkajian Human Factor SDM Ground Handling di Bandar Udara Adi Sutjipto-Yogyakarta
29	Pengkajian Faktor Frekuensi Insiden dan Kecelakaan Terhadap Pemilihan Maskapai Penerbangan
30	Pengkajian Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Terminal Kargo Bandar Udara Juwata-Tarakan
31	Kajian Manajemen Pergerakan Kendaraan di Apron Bandar Udara Dalam Meningkatkan Keselamatan Penerbangan
32	Kajian Pengembangan Bandar Udara Blimbingsari Dalam Mengantisipasi Perkembangan Penumpang 5 (lima) Tahun Kedepan
33	Kajian Penerapan Fasilitas Navigasi Penerbangan di Cabang Padang
34	Kajian Manfaat Pembangunan Fasilitas Garbarata di Bandar Udara UPBU (Bandar udara Mutiara Palu)

35	Kajian Pengembangan Jaringan Rute Penerbangan Bandar Udara Juwata Tarakan untuk Mendukung MP3EI
36	Kajian Pengembangan Bandar Udara Paloh Sambas Kalimantan Barat
37	Kajian Alih Status Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Kelola Pihak Swasta
38	Kajian Fasilitas Bandar Udara Untuk Meningkatkan Pelayanan dan Menunjang Pertumbuhan Permintaan Jasa Angkutan Udara di Bandar Udara Raden Inten II-Lampung
39	Kajian Pengembangan Bandar Udara Pusako Anak Nagari
40	Kajian Pengiriman Cepat Kargo Perusahaan Angkasa Pura Logistik (APL) di Bandar Udara Juanda Surabaya
41	Kajian Kinerja Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Navigasi Penerbangan Dalam Mendukung Operasional Lalu Lintas Udara Pada Air Navigasi Indonesia Cabang Padang
42	Kajian Perlindungan Konsumen Angkutan Udara Terhadap Penyedia Jasa Angkutan Udara
43	Kajian Pelayanan Penumpang di Terminal 2 Bandar Udara Juanda Surabaya
44	Kajian Optimalisasi Peran Kantor Otoritas Bandara Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas/Fungsi Pengawasan Pada Bandara Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU)
45	Kajian Rasio Beban Kerja SDM Kantor Otoritas Bandara Terhadap Tugas dan Fungsi Pengawasan Pada Bandara
46	Kajian Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Keamanan di Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo
47	Kajian Sistem Pengamanan di Sekitar Wilayah Kerja Bandar Udara
48	Kajian Penerapan SMS di Bandar Udara Raden Inten II-Lampung
49	Evaluasi Kinerja Petugas Keamanan Bandar Udara Raden Inten II-Lampung
50	Kajian Ketersediaan SDM dan Peralatan Navigasi Penerbangan di AirNav Gorontalo
51	Kajian Pengembangan Bandar Udara Sampit
52	Kajian Crashworthiness Pada Struktur Pesawat Udara
53	Kajian Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Haluoleo Kendari
54	Kajian Pemotongan Bukit di Bandar Udara Sebagai Standar Keselamatan Penerbangan
55	Kajian Persepsi Penumpang Terhadap Pemilihan Low Cost Carrier
56	Kajian Pemodelan Optimasi Penjadwalan Angkutan Pemadu Moda Bandara dengan Pendekatan Program LINDO (Studi Kasus Bus DAMRI Bandara Soetta)
57	Kajian Pemodelan Demand Forecasting Untuk Penumpang Angkutan Udara Dengan Pendekatan Sistem Dinamis
58	Evaluasi Besaran PSC Terhadap Pelayanan Penumpang
59	Kajian Dampak Peralihan Organisasi (UPT ke AIRNAV) terhadap Personel Teknisi Penerbangan
60	Kajian Peran Jasa Groundhandling Terhadap Pelayanan Air Cargo Dalam Menghadapi Kompetisi Global
61	Kajian Penerimaan Eco Airport di Terminal III Bandara Soekarno Hatta
62	Kajian Pembangunan Bandar Udara Maratua di Berau Kalimantan
63	Kajian Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Wunopito Lewoleba Kabupaten Lembata
64	Kajian Analisis Faktor yang Mempengaruhi Hasil Kerja ATC di Bandar Udara
65	Kajian Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Penerbangan di Bandar Udara
66	Kajian Pembangunan Terminal Baru Bandara H. AS. Hanandjoeddin
67	Kajian Analisa Kebutuhan Area Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Blimbingsari-Banyuwangi
68	Kajian Analisa Permasalahan Pada Bandara yang Letaknya Berdekatan (Studi Kasus Malang dan Surabaya)
JUDUL STUDI LINTAS SEKTORAL TAHUN 2016	
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	
1	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Malaka
2	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Lombok Tengah
PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	Integrasi Masterplan Kereta Api dengan Bandara Juanda di Surabaya
2	Integrasi Masterplan Kereta Api dan Pelabuhan Soekarno Hatta di Makassar
3	Studi Pelaksanaan Survey Asal Tujuan Transportasi Nasional
4	Kebutuhan Pengembangan Angkutan Multimoda di Daerah Pesisir Provinsi Maluku
5	Penentuan lokasi terminal angkutan barang dan kawasan distribusi dan/koleksi barang

	dalam sistem angkutan perkotaan di kota Bogor
6	Penentuan Lokasi Simpul Integrasi Jaringan Kereta Api dan BRT dengan Bandara Syamsudin Noor
7	Integrasi Angkutan Penyeberangan dan Bus di Kabupaten Wakatobi
8	Kajian Kebutuhan Angkutan Pemasu Moda, Pariwisata dan Sekolah di Kabupaten Wakatobi
9	Potensi Pengembangan Pelabuhan Labuhanhaji menjadi Pelabuhan Laut (Logistik) di Kabupaten Aceh Selatan
10	Integrasi Jaringan Transportasi di Kabupaten Sidoarjo
11	Pengembangan Jaringan Angkutan Barang di Kabupaten Sidoarjo
12	Pengembangan Jaringan Angkutan Penumpang di Kabupaten Sidoarjo
13	Kajian Integrasi Transportasi di Kota Cirebon
14	Integrasi Moda di Pelabuhan Penyeberangan Sibolga
15	Integrasi Moda di Stasiun KA Tebing Tinggi
16	Profil Transportasi Kabupaten Bovendigoel
17	Desain Jalur Sepeda di Wilayah Wonosari Kabupaten Gunung Kidul
18	Studi Terminal Terpadu Antar Moda beserta Angkutan Terpadu Antarmoda di Kabupaten Banyuwangi
19	Mekanisme Pemberian Subsidi Angkutan Umum Untuk Anak Sekolah di Kabupaten Banyuwangi
20	Konektivitas Transportasi Antarmoda Terhadap Rencana Pembangunan Bandar Udara di Tulungagung
PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Studi Penyusunan Rencana Induk Terminal Wilayah Sumatera (Terminal A Padang dan Terminal Tipe A Bandar Lampung)
2	Studi Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Bus AKAP di Wilayah Jawa Timur
3	Studi Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Bus AKAP di Wilayah Jawa Tengah
4	Studi Survei Prediksi Angkutan Lebaran 2016
5	Studi Pembuatan Prototype Alat Pencatatan Penggunaan Jalur KA dalam Perhitungan TAC
6	Studi Penyusunan Pedoman Pola Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta untuk Pengujian Kendaraan Bermotor
7	Studi Penyusunan Standar Kompetensi SDM Penyelenggara Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor
8	Studi Penyusunan Pedoman Pola Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta untuk Penyelenggaraan Terminal
9	Studi Penyusunan Standar Kompetensi SDM Penyelenggaraan Terminal
10	Studi Penyusunan Standar Kompetensi SDM Penyelenggaraan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
11	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Salatiga
12	Kajian Perlintasan Sebidang Kereta Api dan Jalan di Kota Cirebon
13	Penilaian Kinerja Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
14	Optimalisasi Kinerja Persimpangan di Kota Pekanbaru
15	Kajian Mengenai Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Kabupaten Musi Banyuasin
16	Evaluasi Penerapan Area Trafic Control System (ATCS) di Kota Yogyakarta
17	Kajian Evaluasi Kinerja Operasional Terminal Tipe A di Jalur Pantura
18	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Cirebon
19	Kajian Efektifitas Bus Rapid Transit (BRT) Transmisi Terkait dengan Pembangunan
20	Evaluasi Pelayanan Angkutan Kereta Api di Bandara Kualanamu
21	Kajian Pengelolaan dan Penetapan Parkir di Pusat Kegiatan Kabupaten Paser
22	Kajian Penataan Perpajakan di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
23	Kajian Penataan Perpajakan di Badan Jalan Kota Cirebon
24	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Pekalongan
25	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Bojonegoro
26	Kajian Kinerja Operasional Terminal di Kabupaten Paser
27	Pengembangan Angkutan Pariwisata dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kab. Gunung Kidul
28	Studi Dampak Kemacetan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Pantai Mahardika
29	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Ngawi

30	Kajian Aksesibilitas Pemukiman Menuju Koridor Utama Angkutan Umum di Jabodetabek
31	Kajian Integrasi Moda pada Koridor Utama Angkutan Umum di Jabodetabek
32	Kajian Pemilihan Moda antara Angkutan AKAP dengan Angkutan Travel (Studi Kasus Rute Banjarmasin - Palangkaraya)
33	Kajian Pola Operasi dan Biaya Investasi Pembangunan Kereta Api Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta
34	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Rest Area Tol Jakarta - Cikampek
35	Studi Evaluasi Manajemen Perpustakaan di Kota Dumai
36	Pengaruh Keikutsertaan Indonesia pada Trans Pacific Partnership (TPP) terhadap Regulasi Bidang Perkeretaapian
37	Dampak Integrasi Gardu Tol terhadap Kinerja Jalan Tol (Studi Kasus Gardu Tol Palimanan - Brebes Timur)
38	Kajian Teknis Pemanfaatan Wire Rope sebagai Perangkat Pengaman Lalu Lintas
39	Evaluasi Penggunaan Pool dan Agen Bus sebagai Tempat Pemberangkatan Bus AKAP
40	Evaluasi Perizinan/Ketentuan Wilayah Operasi Bus Pariwisata
41	Evaluasi Pentingnya Rest Area pada Jaringan Jalan Tol Antar Kota (Studi Kasus Tol Cipali)
42	Opini Pemudik Sepeda Motor yang Tidak Mengikuti Mudik Gratis Kementerian
43	Kajian Dampak Keikutsertaan Indonesia dalam Trans Pacific Partnership (TPP) terhadap Regulasi Bidang Transportasi Jalan
44	Evaluasi Kinerja Angkutan Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Perum Damri pada Trayek Pontianak - Kuching
45	Manajemen Perpustakaan di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
46	Dampak Waktu Transaksi Pembayaran Tol Panjang Antrian terhadap Panjang Antrian Pintu Keluar Tol (studi Kasus Tol Cikarang - Brebes)
47	Studi Transportasi menuju Destinasi Wisata Borobudur Provinsi Jawa Tengah
48	Analisis dan Simulasi Kemacetan Lalu Lintas Saat Lebaran 2016 di Tol Pejagan - Brebes Timur
49	Analisis dan Simulasi Lalu Lintas dari Gerbang Tol Pemalang untuk Antisipasi Macet Lebaran 2017
50	Kajian Monitoring dan Analisis Pergerakan Tanah pada Prasarana Kereta Api
51	Kajian Pembangunan Jalur Layang (Elevated) Rel Kereta Api Lintas St. Purwosari - St. Jebres
52	Uji Coba Metodologi Penghitungan Volume Lalu Lintas Sepeda Motor Waktu Libur Panjang di Pantura
53	Studi Transportasi menuju Destinasi Kawasan Wisata Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
54	Studi Penyusunan Peta Rawan Gempa pada Prasarana Transportasi Jalan dan Kereta Api
55	Kajian Peningkatan Kecepatan Perjalanan Kereta Api Lintas Jakarta-Surabaya Ditinjau dari Biaya
56	Kajian Pembangunan Stasiun Kereta Api Cepat Jakarta- Bandung dengan Pendekatan Transit Oriented Development (TOD)
57	Studi Penyusunan Peta Simpul Transportasi
58	Kajian Pedoman Transit Oriented Development pada Simpul Transportasi
59	Pengaruh Disiplin Pengendara Sepeda Motor, Kondisi Sepeda Motor dan Jalan terhadap Keselamatan Berlalu Lintas di Kota Bogor Tahun 2016 (Survei Jalan Raya Tajur dan KS. Tubun)
60	Studi Transportasi menuju Destinasi Wisata Danau Toba Provinsi Sumatera Utara
PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	Studi Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Wahai dan Ambalau di Maluku
2	Studi Masterplan Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Namrole dan Luhu di Maluku
3	Studi Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Ohoiraut dan Elat di Kabupaten Maluku Tenggara
4	Studi Evaluasi Kinerja Pelabuhan yang Tidak Diusahakan di Pulau Kalimantan
5	Studi Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Indonesia III dan IV
6	Studi Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Indonesia I dan II
7	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Kobisadar dan Saparua/Haria
8	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Tulehu dan Hatu Piru
9	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Tehoru dan Bemo

10	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Wayauwa dan Saketa
11	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Ilath dan Manipa
12	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Hitu dan Kairatu
13	Kajian Kebutuhan Kapal Ferry Untuk Lintas Labuan Bajo - Pulau Komodo - Pulau Rinca Dalam Mendukung Pariwisata Di NTT
14	Penelitian Desain Kapal Feeder Untuk Mendukung Tol Laut Dan Konektivitas Angkutan Laut
15	Kajian Kebutuhan Angkutan Laut dan Penyeberangan Jarak Dekat di Kabupaten Alor
16	Kajian Tinjau Ulang DLKR dan DLKP Pelabuhan Ambon
17	Kajian Pembangunan Pelabuhan Laut Wonti Waropen Papua
18	Kajian Evaluasi Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Swarangan Pelaihari
19	Kajian Evaluasi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lalar Di Kab. Sumbawa Barat Prov. NTB
20	Kajian Revitalisasi Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur
21	Kajian Lintas Penyeberangan Parigi - Wakai - Marisa
22	Kajian Angkutan Laut Pelayanan Kapal Perintis Yang Melalui Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Tengah - Palu
23	Kajian Evaluasi Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Laut Amurang di Minahasa Selatan
24	Kajian Pembangunan Pelabuhan Laut Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
25	Kajian Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Prigi dan Kebutuhan Trenggalek
26	Kajian Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan Di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
27	Kajian Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Pangkalan Bun Provinsi Kalteng
28	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T1
29	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T2
30	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T3
31	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T4
32	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T5
33	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T6
34	Kajian Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh
35	Kajian Penambahan Trayek Tol Laut (T7, T8, T9) Ditinjau Dari Barang Muatan
36	Kajian Penambahan Trayek Tol Laut (T7, T8, T9) Ditinjau Dari Penurunan Disparitas Harga
37	Kajian Penambahan Trayek Tol Laut (T7, T8, T9) Ditinjau Dari Penguatan Konektivitas
38	Kajian Pengembangan Transportasi Laut Dalam Mendukung KEK Sorong
39	Kajian Evaluasi Pemberian Konsesi Terminal Petikemas Muaro Jambi, Provinsi Jambi
40	Kajian Pelabuhan Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Jaringan Pelayanan
41	Kajian Pelabuhan Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Potensi Demand Wilayah
42	Kajian Pelabuhan Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Teknis Operasional Pelabuhan
43	Kajian Pelabuhan Bitung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Teknis Operasional Pelabuhan
44	Kajian Pelabuhan Bitung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Potensi Demand Wilayah
45	Kajian Pelabuhan Bitung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Jaringan Pelayanan
46	Kajian Kelayakan Fungsi Pelabuhan Kijang Sebagai Salah Satu Pelabuhan Asal Tol Laut Pada Trayek T6
47	Kajian Optimalisasi Fungsi Pelabuhan Pontianak
48	Kajian Evaluasi Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Murhum Bau-bau
49	Kajian Pelayanan Kapal Ferry Penyeberangan Untuk Mendukung Pariwisata Di Kawasan Danau Toba
PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar Udara Menggelum Boven Digoel Papua
2	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Pitu Morotai-Maluku
3	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Bandaneira Pulau Banda, Maluku

4	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Korowai Batu-Merauke, Papua
5	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Tiom Lanny Jaya-Papua
6	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Kiwirok-Pegunungan Bintang, Papua
7	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar Udara Sibisa Kabupaten Toba Samosir
8	Penelitian Pengembangan ADS-B Transponder dan Radar Display untuk Ground Vehicle di Bandar Udara di Indonesia.
9	Penelitian Pengembangan Akses Kontrol Sistem untuk Bandar Udara
10	Penelitian Mitigasi Resiko Keselamatan Penerbangan akibat tidak Terpenuhinya Standar Landas Pacu, Strip, dan RESA di Bandar Udara
11	Pengkajian Efektivitas dan Implementasi Safety Management System (SMS) di Maskapai Indonesia
12	Pengkajian Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Haluoleo-Kendari
13	Kajian Kinerja Fasilitas Bandar Udara Baabullah-Ternate
14	Kajian Kapasitas Bandar Udara Juwata Tarakan di Kalimantan Utara
15	Kajian Kinerja Pelayanan Bandar Udara Mutiara-Palu
16	Kajian Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Sultan Thaha-Jambi
17	Kajian Kinerja Keamanan dan Keselamatan di Bandar Udara Juwata-Tarakan
18	Kajian Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Juwata-Tarakan
19	Kajian Peningkatan Kapasitas Fasilitas Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo
20	Kajian Pelayanan Bagasi di Bandar Udara Internasional Lombok
21	Kajian Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Husein Sastranegara-Bandung
22	Kajian Kinerja Keamanan dan Keselamatan di Bandar Udara Sultan Thaha-Jambi
23	Kajian Strategi Bandar Udara H. Aroeboesman Ende dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penumpang
24	Kajian Kinerja Keselamatan, Kapasitas dan Pelayanan di Bandar Udara Ahmad Yani-Semarang
25	Kajian Kinerja Pelayanan Bandar Udara Tjilik Riwut-Palangkaraya
26	Kajian Analisa Kondisi Tanah Dasar Bandar Udara Juanda-Surabaya yang Berakibat Terjadinya Penurunan Tanah di Area Taxi Way
27	Kajian Fatigue dan Job Stress Air Traffic Controller (ATC)
28	Kajian Prediksi Pergerakan Lalu Lintas Angkutan Udara berdasarkan Modal Share untuk Mendukung Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kertajati-Majalengka
29	Kajian Kinerja Fasilitas Sisi Darat untuk Pengembangan Bandar Udara Sultan Thaha-Jambi
30	Kajian Pilihan Penumpang terhadap Bandar Udara yang Berdekatan di Wilayah Jawa Barat
31	Kajian Kinerja Pelayanan di Bandar Udara Fatmawati Soekarno-Bengkulu
32	Kajian Kinerja Fasilitas di Bandar Udara Haluoleo-Kendari
33	Kajian Integrasi Antar Kawasan dan Antar Moda Transportasi dalam Mendukung Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kertajati-Majalengka
34	Kajian Kinerja Pelayanan di Bandar Udara Sentani-Jayapura
35	Kajian Kinerja Keamanan di Bandar Udara Baabullah-Ternate
36	Kajian Rencana Penerapan Skema Badan Layanan Umum (BLU) dalam Pengelolaan Keuangan Bandar Udara dalam Mendukung Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kertajati-Majalengka
37	Kajian Konektivitas Angkutan Udara Bandar Udara Sentani-Jayapura dalam Mendukung Pengembangan Wilayah.
38	Kajian Kinerja Pelayanan Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo
39	Kajian Kinerja Pelayanan di Bandar Udara Ngurah Rai-Depansar
40	Kajian Potensi Pengembangan Rute di Bandar Udara Husein Sastranegara
41	Kajian Pengembangan Rute di Bandar Udara Tanjung Harapan - Tanjung Selor
42	Kajian Bandar Udara Mopah - Merauke untuk Mendukung Konektivitas Angkutan Logistik Kargo Udara di Papua
43	Pelayanan Apron Movement Control (AMC) dalam Mendukung Operasional Penerbangan pada Terminal 3 (Ultimate) Bandar Udara Soekarno Hatta - Tangerang
44	Kajian Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Keamanan Penerbangan di Bandar Udara

	Fatmawati – Bengkulu
45	Kajian Potensi Pengembangan Rute Bandara (Studi Kasus: Bandar Udara Mutiara - Palu)
46	Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Ground Handling PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JAS) pada Maskapai PT Transnusa di Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta
47	Pengaruh Promosi terhadap Peningkatan Penjualan Tiket Pesawat (Studi Kasus: PT. Mentari Lion Air di Bandar Udara Radin Inten II - Bandar Lampung)
48	Analisis Keterlambatan Penerbangan di Bandar Udara Adi Sucipto - Yogyakarta
JUDUL STUDI LINTAS SEKTORAL TAHUN 2017	
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	
1	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Boven Digoel
2	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Minahasa Selatan
PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	Evaluasi Metodologi dan Uji Coba Survei Pergerakan Orang
2	Identifikasi Kinerja <i>Logistics Performance Index (LPI)</i> Di Indonesia
3	Review Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi
4	Integrasi Prasarana Transportasi di Pelabuhan Benoa Dalam Mendukung Pengembangan Transportasi Antarmoda;
5	Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Kepulauan Seribu;
6	Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Tanjung Kelayang Bangka Belitung;
7	Analisis Pelayanan Alih Moda di Pelabuhan Tenggayu I Tarakan;
8	Integrasi Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi di Lampung;
9	Integrasi Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Danau Toba Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas;
10	Integrasi Pelabuhan Lembar Dan Halte <i>Bus Rapid Transit (BRT)</i> /Angkutan Umum di NTB Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
11	Integrasi Stasiun Padang Dan <i>Bus Rapid Transit (BRT)</i> Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
12	Integrasi Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
13	Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur;
14	Integrasi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
15	Integrasi Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang dan Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
16	Integrasi Stasiun Tanjungkarang dan Halte <i>Bus Rapid Transit (BRT)</i> Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi Perkotaan di Kota Bandar Lampung;
17	Integrasi Pelabuhan Kayangan NTB Dan BRT Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
18	Integrasi Pelabuhan Gilimanuk Dan Shelter Angkutan Umum Dalam Peningkatan Pelayanan Transportasi di Kabupaten Jembrana, Bali;
19	Integrasi Pelabuhan Padangbai dan Halte <i>Bus</i> Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
20	Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten;
21	Integrasi Pelabuhan Belawan dan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
22	Integrasi Pelabuhan Tanjung Emas dan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
23	Integrasi Transportasi Antarmoda di Kawasan Destinasi Wisata Borobudur
PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Pengembangan Jaringan Jalan Untuk Kebutuhan Mobilitas Angkutan Barang Berdasarkan Hasil Survei ATTN
2	Uji Simulasi <i>Crashworthiness</i> Pada Desain Rancang Bangun Karoseri Kendaraan Angkutan Penumpang di Indonesia
3	Studi Penerapan <i>Green Zone</i> di Wilayah Pemukiman dan Kawasan Wisata
4	Studi Penyusunan Rencana Induk Transportasi SARBAGITA dan KEDUNGSEPUR

5	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Kediri
6	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Boyolali
7	Audit Jalan Guna Mengurangi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Boyolali
8	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Tasikmalaya
9	Kajian Akses Dan Pelayanan Transportasi Menuju Destinasi Wisata Tanjung Lesung Banten
10	Analisis Sistem Jaringan Transportasi Kota Serang
11	Mekanisme Subsidi Angkutan Umum Bagi Pelajar Di Kabupaten Pasuruan
12	Kajian Kebutuhan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Di Kota Kendari
13	Kajian Kebijakan Tarif dan Kuota Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
14	Persepsi Terhadap Keberadaan dan Pelayanan Taxi online
15	Optimalisasi Terminal Tipe B Di Kabupaten Siak
16	Studi Analisis Dan Evaluasi Penyelenggaraan Mudik Gratis Kereta Api Dan Bus Angkutan Lebaran Tahun 2017
17	Penataan Pasar Tumpah Guna Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Pada Angkutan Lebaran 2017 Di Jalur Pantai Utara Jawa Barat
18	Persepsi Pengguna Kereta Api Pada Angkutan Lebaran Tahun 2017
19	Monitoring Dan Evaluasi Terminal Tipe A Leuwipanjang- Bandung Dan Indhiang- Tasikmalaya Pada Musim Angkutan Lebaran 2017
20	Profil Transportasi Jalan Dan Kereta Api Di Provinsi Gorontalo
21	Studi Penyusunan Profil Transportasi Jalan Dan Perkeretaapian Provinsi Bengkulu
22	Penyusunan Naskah Akademis Sistranas Bidang Transportasi Perkeretaapian
23	Penyusunan Naskah Akademis Sistranas Bidang Transportasi Jalan
24	Studi Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Banyuwangi
25	Studi Aksesibilitas Menuju Destinasi Wisata Di Pulau Morotai
26	Kajian Akses Dan Pelayanan Transportasi Menuju Destinasi Wisata Pantai Mandalika Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
27	Kajian Kebutuhan Angkutan Taksi Di Kabupaten Tasikmalaya
28	Kajian Tindak Lanjut PM 26 Tahun 2017 Diluar Tarif dan Kuota
29	Perencanaan Jalur Sepeda Di Kota Blitar
30	Studi Aksesibilitas Menuju Destinasi Wisata Di Danau Toba
31	Media Sosialisasi Keselamatan
32	Studi Penataan Parkir Di Wilayah Central Business District Kota Pati
33	Studi Kelayakan Zoss Pada Ruas Jalan Pantura Kabupaten Pati
34	Pengembangan Trayek Angkutan Pedesaan Di Wilayah Kabupaten Jember
35	Studi Pengembangan Sistem Logistik Kabupaten Sleman Untuk Mendukung Implementasi <i>Smart Regency</i>
36	Kajian Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kab.Kediri
37	Pengembangan Angkutan Jalan Perintis Riau
38	Evaluasi Pemudik Sepeda Motor Pada Lebaran Tahun 2017
39	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Terminal Tipe A Mangkang Semarang, Terminal Tirtanadi Surakarta Dan Terminal Bulupitu Purwokerto Pada Masa Lebaran 2017
40	Studi Monitoring Dan Evaluasi Terminal Tipe A Tambak Osowilangun-Surabaya, Purabaya-Sidoarjo Dan Giwangan-Yogyakarta Pada Masa Angkutan Lebaran 2017
41	Survey Transportasi Asal Tujuan Penumpang Kabupaten Sumbawa Dalam Mendukung Rencana Induk Transportasi Kab. Sumbawa
42	Survey Transportasi Asal Tujuan Barang Kabupaten Sumbawa Dalam Mendukung Rencana Induk Transportasi Kab. Sumbawa
43	Perhitungan Volume lalu lintas dan kinerja ruas jalan di wilayah Sarbagita dan sekitarnya
44	Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
45	Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat
46	Kajian Kebutuhan fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Di Kab.Brebes
47	Kinerja Pengoperasian Bus BRT/Aglomerasi bantuan Pemerintah/ DAMRI/Bandung
48	Kajian Pengembangan Transportasi di daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
49	Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat
PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	

1	Studi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau.
2	Studi Rencana Induk Pelabuhan Danau Onan Runggu, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.
3	Studi Rencana Induk Pelabuhan Danau Sipinggian, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.
4	Studi Rencana Induk Pelabuhan Sungai Durian Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
5	Studi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
6	Studi Optimalisasi Program Tol Laut
7	Studi Rencana Induk Pelabuhan Laut Wosu Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
8	Studi Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Terminal Konvensional
9	<i>Basic Design</i> dan <i>Keyplan</i> Kapal <i>Feeder</i> untuk Mendukung Pelayanan Tol Laut di Wilayah Maluku Utara.
10	Kajian Resiko Pelayaran di APBS didasarkan pada Data Pergerakan Lalu Lintas Kapal
11	Kajian Pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL)
12	Kajian Prioritas Pengembangan Pelabuhan di Pulau Bunguruan Kabupaten Natuna
13	Kajian Potret Sebaran Pelabuhan di Papua
14	Kajian Pemberdayaan Pelayaran Rakyat
15	Kajian Potret Sebaran Pelabuhan di Sulawesi
16	Kajian Profil Transportasi Laut dan Penyeberangan di Provinsi Gorontalo
17	Kajian Profil Transportasi Laut dan Penyeberangan di Provinsi Bengkulu
18	Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pandu Laut Dalam (<i>Deep Sea Pilot</i>) di Selat Malaka-Selat Singapura
19	Kajian Pengoperasian Kapal <i>Roll On Roll Off</i> (RoRo) untuk Penyeberangan Lintas Jakarta Surabaya Lombok
20	Kajian Pengoperasian Kapal <i>Roll On Roll Off</i> (RoRo) untuk Penyeberangan Lintas Jakarta Panjang
21	Kajian Evaluasi Lintas Penyeberangan Merak Bakauheni
22	Kajian <i>Indonesia National Single Windows</i> (INSW) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait Inaportnet di Pelabuhan-Pelabuhan Besar (6 Pelabuhan Utama)
23	Kajian Pola Pendanaan Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau
24	Kajian Pengelolaan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk kepentingan Sendiri (TUKS)
25	Kajian Potret Dukungan Transportasi Laut dan Danau terhadap 10 Destinasi Wisata (Studi Kasus: Wakatobi)
26	Kajian Pola Pemberian Insentif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Kapal-Kapal Besar Generasi IV dan Kapal <i>Cruise</i>
27	Kajian Pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
28	Kajian Pengembangan Pelabuhan Salakan di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
29	Kajian Kelayakan Pengembangan Pelabuhan Muntok Terminal Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat
30	Kajian Usulan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Martini (Tiptop) Biak Numfor
31	Kajian Pembangunan Pelabuhan Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua
32	Kajian Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Regional Soasio/Goto di Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan
33	Kajian Pengembangan Pelabuhan Rum di Kecamatan Tidore Utaa Kota Tidore Kepulauan
34	Kajian Revitalisasi Pelabuhan Rakyat Lewoleba Kabupaten Lembata, NTT
35	Kajian Kebutuhan Rehabilitasi Pelabuhan Margasari di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan
36	Kajian Pembangunan Pelabuhan Lato di Kabuapten Flores Timur
37	Kajian Usulan Pembangunan Jetty Apung di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
38	Kajian Kebutuhan Penambahan Rute Pelayaran di Kabupaten Nagakeo, Propinsi NTT
39	Kajian Kelayakan Pelabuhan Mesuji untuk Masuk dalam Trayek Tol Laut
40	Kajian Kebutuhan Pengembangan Dermaga Kapal Penumpang di Pelabuhan Nunukan

41	Kajian Kebutuhan Peralatan Keselamatan Pelayaran Rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
42	Kajian Pengembangan Pelabuhan Kelapis/Malinau untuk Kegiatan Bongkar Muat
43	Kajian Kebutuhan Perbaikan Dermaga PELRA di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
44	Kajian Kemanfaatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa di Kabupaten Wakatobi
45	Kajian Kebutuhan Kapal Khusus Angkutan Ternak yang Melayani Pantai Barat Sulawesi Tengah dengan Pulau Kalimantan
PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara dan Pembuatan <i>Hub and Spoke</i> Bandar Udara untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Papua;
2	Penelitian Evaluasi Kinerja Otoritas Bandar Udara I Sampai Dengan Wilayah X Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara;
3	Penelitian Evaluasi Kinerja Sekolah Penerbangan Sesuai dengan <i>CASR 141</i> di Indonesia.
4	Penelitian Sarana dan Prasarana Serta Rute Penerbangan Penerbangan di Wilayah Jawa Bagian Selatan;
5	Optimalisasi Bandar Udara Adi Soemarmo Solo melalui Peningkatan Konektivitas antara Solo dan Yogyakarta dengan Angkutan Kereta Api Khusus Bandar Udara;
6	Evaluasi Fasilitas Prasarana Logistik/Kargo guna Mendukung Program Penurunan Disparitas Harga di Bandar Udara Sentani Jayapura;
7	Implementasi Program Keamanan Penerbangan (AOSP) pada Maskapai Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Mentari Airlines, dan Citilink Indonesia yang Beroperasi di Bandar Udara Hang Nadim Batam;
8	Pemenuhan Kriteria Bandar Udara Komodo Labuan Bajo untuk Peningkatan Status dari Bandar Udara Domestik menjadi Bandar Udara Internasional;
9	Penerapan <i>Nasional Single Windows (NSW)</i> Bandar Udara (Airportnet) sebagai Upaya Peningkatan Layanan dan Kelancaran Arus Barang Ekspor-Impor;
10	Pola <i>Public-Private Partnership (PPP)</i> dalam Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia untuk Mendukung Transportasi Udara Berkelanjutan;
11	Pemenuhan Standar Regulasi untuk Pengoperasian Pesawat Udara khususnya dalam Melaksanakan Pilot Recurrent Simulator Training;
12	<i>Upgrading</i> dan Penyesuaian Standar Peralatan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Sentani Jayapura dan Bandar Udara Mopah Merauke;
13	Kebutuhan <i>Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)</i> dengan Pola KSO antara GMF-AA dan MMF untuk Perawatan Pesawat Udara Kategori Normal dan Komuter di Indonesia khusus Indonesia Bagian Timur;
14	Evaluasi terhadap Kriteria Pesawat Udara yang mengalami Penuaan (<i>Aging Aircraft</i>);
15	Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu dalam Mendukung <i>Visit Bengkulu 2020</i> ;
16	Standarisasi dan Kinerja Sekolah Penerbangan untuk Pendidikan Lalu Lintas Udara (<i>Air Traffic Controller</i>);
17	Pengelolaan <i>General Aviation Terminal (GAT)</i> di Indonesia;
18	Pembangunan Bandar Udara Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau dari Tatanan Kebandarudaraan dan Aspek Keselamatan Penerbangan;
19	Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo Sebagai Bandar Udara Aerotropolis (<i>Airport City</i>);
20	Kebutuhan Jumlah Personel yang Berlisensi (Sertifikat Kecakapan) untuk Pengoperasian Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (<i>GSE Operator</i>) di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
21	Pembangunan Depo Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Pesawat Udara (DPPU) untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Keselamatan Penerbangan di Papua;
22	Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo Wamena di Provinsi Papua;
23	Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo Timika di Provinsi Papua;
24	Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo Yahukimo di Provinsi Papua;
25	Kajian Penyusunan Profile Transportasi Udara Provinsi Bengkulu;
26	Kajian Penyusunan Profile Transportasi Udara Provinsi Gorontalo
JUDUL STUDI LINTAS SEKTORAL TAHUN 2018	

SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	
1	Penyusunan Background Study Rentra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019-2024
2	Penyusunan Database Sistem Informasi Transportasi
PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	Survei Asal Tujuan Transportasi Untuk Pergerakan Orang
2	Pemantapan Naskah Akademis Sistranas (Lanjutan Penyusunan Naskah Akademis Sistranas)
3	Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Wilayah Di Papua Dalam Mendukung Tol Laut
4	Sistem Informasi Jaringan Pelayanan Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Kawasan Destinasi Wisata Kota Sabang
5	Pemetaan Data Sistem Informasi Pelayanan Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Kawasan Destinasi Wisata Di Lampung
6	Potensi Penggunaan E-Market Dalam Mendukung Distribusi Angkutan Barang
7	Pemetaan Regulasi Aplikasi Transportasi Antarmoda Berbasis Online
8	Kajian Permodelan Kebutuhan Angkutan Barang Di Pulau Jawa
9	Potensi Pengembangan Angkutan Multimoda Di Kabupaten Jepara
10	Strategi Pengembangan Keterpaduan Transportasi Antarmoda Di Bandara Radin Inten II
11	Pemetaan Kebijakan Transportasi Barang Di Indonesia Yang Mendukung Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
12	Kajian Permodelan Kebutuhan Angkutan Barang Di Pulau Sulawesi
13	Smart Logistic Dengan Mobile Application
14	Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda Pada Kawasan Destinasi Wisata Labuhan Bajo
15	Integrasi Transportasi Antarmoda Di Kota Pekanbaru
16	Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Sebagai Akibat Aktivitas Transportasi Intramoda
17	Pemetaan Data Pelayanan Transportasi Dalm Mendukung Sistim Informasi Kawasan Wisata Mandeh
18	Pemetaan Data Pelayanan Transportasi Dalm Mendukung Sistim Informasi Kawasan Destinasi Wisata Labuhan Bajo
19	Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Kawasan Wisata Mande
20	Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda Di Bandara Maimun Saleh Sabang
21	Tipologi Potensi Transit Oriented Development (TOD) Pada Light Rail Transit (LRT) Palembang
PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Studi Skema Pembiayaan Infrastruktur Transportasi LRT/MRT
2	Studi Perencanaan Dan Penataan Jalur Kereta Api Barang Di Pulau Sumatera
3	Review Perundangan Perkeretaapian
4	Perencanaan TOD Angkutan Perkeretaapian
5	Perencanaan Dan Penataan Angkutan Barang Di Pedesaan
6	Background Study Review UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
7	Kajian Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara
8	Kajian Penataan Lalu Lintas Di Parakan Kabupaten Temanggung
9	Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Padang Pariaman
10	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Di Kabupaten Lampung Selatan
11	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
12	Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Jalur Wisata Di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
13	Pengkajian Kondisi Lalu Lintas Pada Beberapa Persimpangan Di Kota Bandar Lampung
14	Kajian Akseibilitas Angkutan Wisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara
15	Kajian Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Provinsi Maluku Utara
16	Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Perawang Di Kabupaten Siak
17	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum Dan Konektifitas Antarmoda Di Kabupaten Marauke
18	Penataan Transportasi Di Sekitar Stasiun Cilebut Kabupaten Bogor Provinasi Jawa Barat
19	Evaluasi Kinerja Persimpangan Fly Over Di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru
20	Evaluasi Kinerja Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Kota Balikpapan

21	Kajian Pelaksanaan E-Tilang Untuk Angkutan Barang
22	Kajian Etika Bisnis Dalam Pengoperasian Angkutan Sewa Khusus
23	Kajian Bisnis Start-Up Bidang Transportasi Jalan Dan Perkeretaapian
24	Kajian Pemanfaatan Dashboard Digital Pada Angkutan Sewa Khusus
25	Evaluasi Implementasi Uji Berkala Angkutan Sewa Khusus
26	Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Keberadaan Ojek Online Sebagai Angkutan Umum
27	Kajian Efektifitas Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta
28	Kajian Penyediaan Fasilitas Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Pada Angkutan Jalan Dan Perkeretaapian
29	Kesiapan Angkutan Umum Transportasi Jalan Dalam Penerapan Standar Emisi EURO 4
30	Analisis Kesiapan Jalur Mudik Angkutan Lebaran 2018 Melalui Lintas Utara Jawa (Jakarta-Semarang)
31	Analisis Kesiapan Jalan TOL (Semarang-Surabaya) Dalam Mendukung Angkutan Lebaran 2018
32	Analisis Kemanfaatan Mudik Gratis Ditinjau Dari Manfaat Ekonomi
33	Kajian Potensi Pemudik Angkutan Lebaran 2018 Berbasis Online Survey
34	Kajian Profile LRT Indonesia (Studi Kasus LRT JABODETABEK Dan Palembang)
35	Peningkatan Aksesibilitas Menuju Bandara Dengan Kereta Api Bandara
36	Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Green Zone Dikawasan Wisata Ubud Kabupaten Gianyar Bali
37	Penyediaan Fasilitas Diffable Pada Angkutan Jalan Di Kota Surakarta
38	Penggunaan Copressed Natural Gas (CNG) Pada Angkutan Umum Di Indonesia
39	Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Keberadaan Ojek Online Sebagai Angkutan Umum
40	Kajian Keselamatan Di Jalur Puncak Jawa Barat
41	Kajian Kelayakan Relokasi Pembangunan Terminal Tipe C Juwana Di Kabupaten Pati
42	Kajian Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Di Provinsi Bangka Belitung (Studi Kasus Ruas Jalan Provinsi Di Jalan Kabupaten Bangka Belitung)
43	Kajian Aspek Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Di Bandara Lampung
44	Penataan Kembali Trayek Dan Rute Angkutan Kota Payakumbuh
PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	Skema Pendanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Dan Penyeberangan
2	Studi Pemetaan/Sebaran Pelabuhan Laut Dan Penyeberangan Pada 7 Pulau Besar Di Indonesia
3	Studi Tinjau Ulang Pengoperasian Dan Jaringan Angkutan Laut Perintis Dalam Rangka Menjaga Kontinuitas Kebutuhan Bahan Pokok Dan Stabilitas Harga
4	Studi Penyusunan Grand Desain Transportasi Danau Di Kawasan Wisata Danau Toba. Sumatera Utara Dalam Rangka Mendukung Pariwisata
5	Studi Kebutuhan Subsidi Kapal Feeder Pada Trayek Tol Laut Di Pulau Natuna
6	Studi Pengembangan Trayek Tol Laut Tahun 2019
7	Studi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Transportasi Sungai Dan Penyeberangan Dalam Mendukung Jaringan Tol Laut.
8	Studi Penerapan Motorized Barge Jakarta Surabaya Dalam Mengurangi Beban Lalu Lintas Jalan Di Pantai Utara Pulau Jawa
9	Pemanfaatan Big Data Transportasi Laut Untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kapal Di Pelabuhan
10	Pemanfaatan Big Data Transportasi Laut Untuk Mengukur Kinerja Bongkar-Muat Barang Di Pelabuhan
11	Kebutuhan DO Online Untuk Integrasi Layanan Di Pelabuhan
12	Pemanfaatan Big Data Transportasi Laut Untuk Mengukur Kinerja Dwelling Time Di Pelabuhan
13	Kajian Manfaat Rumah Kita Dalam Mendukung Program Tol Laut Untuk Menunjang Kelancaran Barang
14	Kajian Desain Kapal Yang Optimal Untuk Mendukung Angkutan Laut Di Kabupaten Natuna
15	Kelayakan Pemanfaatan Dermaga Apung Di Kabupaten Boalemo. Untuk Mendukung

	Pariwisata
16	Kajian Keterpaduan Angkutan Laut Barang Dengan Angkutan Penyeberangan Dan Angkutan Sungai Dalam Mendukung Tol Laut Di Merauke
17	Evaluasi Penerapan Aturan Keselamatan Angkutan Sungai Di Pulau Kalimantan (Studi Kasus: Sungai Mahakam)
18	Evaluasi Penerapan Aturan Keselamatan Pemanduan Bagi Pandu Di Pelabuhan Tanjung Perak
19	Peran Pelayaran Rakyat Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah Di Kabupaten Sikka
20	Kebutuhan Tersus Ternak Untuk Optimalisasi Tol Laut Dalam Mendukung Ketahanan Distribusi Daging Nasional Di Pelabuhan Lamongan
21	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengurusan Perizinan Tersus Dan TUKS
22	Peran Konektivitas Angkutan Laut Terhadap Distribusi Pangan Di Wilayah Papua
23	TKDN Pembangunan Kapal Di Indonesia
24	Stabilitas Dan Garis Muat Kapal Yang Beroperasi Di Danau Toba
25	Keselamatan Transportasi Sungai (Studi Kasus Sungai Batanghari)
26	Pencemaran Dari Kapal-Kapal Di Bawah GT 35 Dalam Mendukung Terciptanya Laut Bersih
27	Penerapan Standar NCVS Terhadap Pembangunan Kapal Non Konvensi Dalam Rangka Menunjang Keselamatan Pelayaran
28	Pemenuhan Standar Kelaikan Peti Kemas Domestik Sebagai Alat Angkut Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Pelayaran (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)
29	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Kapal Wisata Di Raja Ampat Dalam Mendukung Keselamatan Pelayaran
30	Kesesuaian Antara Ukuran Kapal Dengan Mesin Penggerak Utama Kapal Pelayaran Rakyat (Studi Kasus : Pautere Dan Sunda Kelapa)
31	Optimalisasi Pemanfaatan Tiket Online Di Pelabuhan Laut
32	Kecukupan Dan Keandalan Rambu Navigasi Di Alur Sungai Musi
33	Ujicoba Survey Online Untuk Angkutan Laut Natal Dan Tahun Baru
34	Pemanfaatan Breakwater Terapung
35	Pengembangan Angkutan Penyeberangan Dari Pantai Barat Sulawesi Ke Kalimantan Timur (Studi Kasus : Donggala - Balikpapan)
36	Evaluasi Usulan Trayek Perintis Di Kabupaten Tojo Una Una Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
37	Pemenuhan Keselamatan Kapal Rakyat Dibawah GT 35 Di Sungai Musi Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Pelayaran
38	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Kapal Penumpang Rute Manado-Sangihe-Talaud
39	Peran BP2TL Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Transportasi Laut
40	Identifikasi Pelaksanaan Terhadap Ratifikasi Konvensi IMO Di Indonesia Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan VIMSAS
PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara Dan Pembuatan Hub And Spoke Pengumpul Dan Pengumpan) Bandar Udara Untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik Di Papua Barat
2	Studi Peningkatan Airstrip Ke Status Standar Bandar Udara Di Papua
3	Background Study Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
4	Studi Potensi Untuk Ditetapkannya Lokasi Bandar Udara Perairan Dan Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Perairan (Seaplane) Di Indonesia
5	Penelitian Pengembangan Terhadap Prototype Peralatan Untuk Mendeteksi Wind Shear Di Bandar Udara
6	Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Udara Perintis Penumpang
7	Penelitian Pengembangan Prototype Peralatan Untuk Mengukur Ketinggian Genangan Air (Standing Water) Di Landas Pacu
8	Pengembangan Transshipment Cargo Di Bandara Ngurah Rai Denpasar
9	Kajian Pengaturan Tempat Menginap Pesawat Udara Di Bandar Udara (Home Base) Untuk Pengaturan Rute Penerbangan
10	Kajian Standarisasi Peralatan Navigasi Untuk Bandar Udara Kelas 3 Di Papua

11	Evaluasi Standarisasi Pelatihan Dan Sertifikasi Avsec (Aviation Security)
12	Kajian Pengoperasian Bandar Udara Pondok Cabe Sebagai Hub Pengoperasian Pesawat Turboprop Untuk Penerbangan Jarak Pendek
13	Kajian Smart Airport Untuk Peningkatan Passenger Experience Di Bandara Kualanamu
14	Kajian Pendanaan Infrastruktur Bandar Udara Di Indonesia Melalui Skema Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (Pina)
15	Kajian Bandar Udara Kertajati Sebagai Secondary Airport Dari Bandara Soekarno Hatta
16	Kajian Pengoperasian Helicopter City Transport (Heli-City) Sebagai Transportasi Udara Charter Ditinjau Dari Aspek Keamanan Dan Keselamatan
17	Kajian Pemanfaatan Ruang Bagasi Tercatat Penumpang Pesawat Udara Yang Tidak Terpakai
18	Kajian Regulasi Khusus Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Di Papua Dan Papua Barat
19	Kajian Kebutuhan Fasilitas Training Simulator Pilot Pesawat Udara Commuter Dan Normal Category Untuk Beroperasi Di Papua Dan Papua Barat
20	Kajian Kebutuhan Angkutan Udara Rute Pendek Dengan Pesawat Udara Kategori Komuter Untuk Dioperasikan Sebagai Air Taxi
JUDUL STUDI LINTAS SEKTORAL TAHUN 2019	
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	
1	Rencana Induk Penelitian Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019-2024
2	Penyusunan Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024
PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	Studi Grand Design Transportasi di Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara
2	Standardisasi Fasilitas Alat Angkut Dan Penunjang Serta Digitalisasi Proses Logistik Dalam Mendukung Distribusi Logistik
3	Review Keterpaduan Layanan Angkutan Perintis Dalam Mendukung Peningkatan Aksesibilitas Antar Wilayah
4	Strategi Peningkatan Efisiensi Biaya Transportasi Dalam Mendukung Penurunan Besarnya Rasio Biaya Logistik Terhadap Gross Domestic Product
5	Evaluasi Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda
6	Penyusunan Forum dan Agenda Riset Transportasi nasional
7	Penelitian Rencana Pengoperasian Ro-Ro Dumai-Malaka
8	Evaluasi Penerapan Electronic Toll Collection (ETC)
9	Penentuan Pola dan Pusat Distribusi Logistik di Tol Trans Jawa
10	Potensi Pemanfaatan Terminal Penumpang Menjadi Pusat Logistik (Studi Kasus Terminal Simpang Perbuk, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan)
11	Pemilihan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Domestik dan Internasional di Dumai
12	Potensi Demand angkutan Penumpang Kendaraan, dan Barang pada Pelabuhan di Dumai
13	Integrasi Transportasi Antarmoda pada Pelabuhan di Dumai
14	Preferensi Pemilihan Rute Angkutan Barang (Tol dengan Non Tol) di Jawa
15	Aksesibilitas Bandara Yogyakarta International Airport dalam Mendukung Transportasi Antarmoda
16	Penentuan Pola dan Pusat Distribusi Logistik untuk Tol Trans Jawa
17	Evaluasi Kinerja Intermodalitas Lintas KA Bandara di Palembang
18	Pengembangan Aksesibilitas dan Angkutan Lanjutan pada Stasiun untuk Mendukung Pengaktifan Kembali Jalur KA Bandung-Garut
19	Evaluasi Tingkat Keterpaduan Transportasi Antar Pusat Kegiatan di Banyuwangi
20	Potensi Pemanfaatan Terminal Penumpang Menjadi Pusat Logistik (Studi Kasus Terminal Simpang Perbuk, Musi Rawas, Sumatera Selatan)
21	Kajian Konektivitas dan Pemilihan Moda Bandung-Banjar
22	Analisis biaya transportasi sebagai penentu biaya logistik produk pertanian tanaman pangan dari hulu ke hilir di Jawa Barat
23	Optimalisasi penerapan DO online
24	Evaluasi Penerapan Electronic Toll Collection
25	Tingkat Sensitivitas Penurunan Penumpang Angkutan Udara di Pulau Jawa
26	Evaluasi Regulasi di bidang Angkutan Multimoda untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Multimoda
27	Pemodelan logistik perkotaan untuk Produk Segar (Perishable foods di Bandung)

28	Pola Sistem Transportasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk hasil peternakan lokal di Jawa Barat
29	Peta Okupasi SDM Multimoda
30	Commuters willingness to ride an integrated public transport services of MRT Jakarta
31	Pemetaan Pusat Logistik
32	Kajian Pola Pergerakan Orang dan Barang dalam Model Jaringan Transportasi Multimoda
33	Kajian Aksesibilitas Angkutan Barang Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Belawan
34	Penyusunan Indikator dalam Penilaian Aksesibilitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja Antarmoda
35	Penyusunan Sistem Transportasi di Ibukota Negara (IKN).
36	Penyusunan Sistem Transportasi Logistik di Ibukota Negara (IKN).
37	Penyusunan Kelembagaan Forum Riset Nasional
38	Kajian Pola Ruang dan Perilaku Perjalanan di Wilayah Jabodetabek
39	Kajian Ekonomi Transportasi terhadap Road User Charging di Wilayah Jabodetabek
40	Kajian Ekonomi Transportasi terhadap Kinerja Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek
PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Studi Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Menggunakan Teknologi Intelligent Transport System (ITS)
2	Studi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Di Lintas Selatan Pulau Jawa
3	Studi Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan B3
4	Survei Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2019
5	Studi Penyusunan Road Map Pengembangan Teknologi Perkeretaapian
6	Kajian Efektifitas Pelican Crossing Di Jakarta
7	Kajian Kebutuhan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian Pada Daerah Operasi 8 Surabaya
8	Analisis Strategi Ketepatan Waktu Keberangkatan Kereta Api Commuter Jabodetabek
9	Penentuan Pick Up Point Ojek Online Di Stasiun
10	Kajian Standart Keselamatan Ojek Online
11	Pengaruh Mengemudi Malam Dan Kondisi Jalan Yang Monoton Terhadap Tingkat Kelelahan Pengemudi Dan Implikasinya Pada Kecelakaan (Studi Kasus Pada Pengemudi Akap)
12	Analisa Pengaruh Kehandalan Ban Terhadap Performansi Sarana Angkutan Barang
13	Kajian Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Brebes- Semarang Terhadap Ekonomi Masyarakat Terdampak
14	Dampak Penerapan / Pembangunan RAS Dan ZOS Terhadap Penurunan Angka Kecelakaan Di Sekolah
15	Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemberlakuan Tarif Ojek Online
16	Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2019/1440 H
17	Pengembangan Angkutan Perintis Jalan Di Provinsi Bengkulu
18	Kajian Evaluasi Penerapan Rambu Berdasarkan Geometrik Dan Karakteristik Jalan Ditinjau Dari Keselamatan Berlalu Lintas
19	Analisis Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Perpindahan Penggunaan Moda (Mode Shifting) Angkutan Jalan Ke Moda Raya Terpadu (MRT)
20	Pengembangan Park And Ride Untuk Meningkatkan Pelayanan Angkutan LRT Kota Palembang
21	Kajian Analisis Potensi Penerapan Badan Layanan Umum (Studi Kasus Terminal Tipe A Tirtonadi)
22	Kajian Efektifitas Program Keselamatan Lalu Lintas Untuk Anak-Anak
23	Kajian Angkutan Wisata Di Wilayah Bromo, Tengger Dan Semeru
24	Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum Gratis Bagi Pelajar Dan Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Kebumen
25	Optimalisasi Kinerja Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
26	Kajian Simpul Transportasi Kabupaten Aceh Selatan
27	Evaluasi Kereta Api Bandara Kualanamu
28	Evaluasi Kereta Api Bandara Padang
29	Kajian Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2019 Berbasis Online Survei
30	Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Pengoperasian Transjakarta Setelah 15 Tahun (Isu-1)

31	Kajian Dampak Ekonomi Operasional Transjakarta
32	Evaluasi Kereta Api Bandara Manggarai - Soekarno Hatta
33	Identifikasi Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Tol Cipali
34	Kajian Penerapan Teknologi Pintu Dengan Pagar Otomatis Dan Yellow Box Di Perlindungan Sebidang
35	Kajian Kebijakan Manajemen Petugas Penjaga Pintu Perlindungan Sebidang
36	Perlindungan Sebidang Resmi Dan Tidak Resmi Ditinjau Dari Regulasi Perkeretaapian
37	Kajian Penataan Parkir Angkutan Barang di Kabupaten Jepara
38	Analisis Dampak Sosial Ekonomi Penerapan RAS Kota Salatiga
39	Evaluasi Kereta Api Bandara YIA
40	Evaluasi Teknis Dan Legalitas Terminal Slawi, Kabupaten Tegal
41	Kajian Perlindungan Sebidang Dengan Ka Akibat Terbangunnya Jembatan Wijaya Kusuma Ngadiluwih Kab. Kediri
42	Kajian Formulasi Track Access Charge (TAC) Atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
43	Kajian Kelayakan Angkutan Umum Perbatasan NTT (Nusa Tenggara Timur)
44	Kebutuhan Terminal Tipe A di Provinsi Kalimantan Utara
45	Kajian Preferensi Angkutan Umum Di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
46	Kajian Daerah Rawan Kecelakaan Di Kabupaten Mamuju
47	Kajian Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Enrekang
48	Potensi Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus Ruas Jalan Pelabuhan Amolengo)
49	Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Kotamobagu
50	Reaktivasi Pelayanan Angkutan Umum Perdesaan Di Kabupaten Kampar
51	Kajian Kinerja Terminal Penumpang Tipe C Di Kabupaten Merauke
52	Evaluasi Kinerja Simpang Dan Buka Median (Fasilitas U-Turn) Pada Jalan Perintis Kemerdekaan Dan Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar
53	Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan Di Kota Bekasi
54	Kajian Teknis Pengembangan Rute Angkutan Perintis Jalan Di Tanjung Selor Prov. Kaltim-Kaltara
55	Survey Potensi Pemudik Pada Angkutan Natal 2019 Dan Tahun Baru 2020
PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
1	Studi Optimalisasi Peran Perla Sebagai Feeder Angkutan Laut Untuk Muatan General Cargo
2	Studi Potensi Jasa Transportasi Laut Pada ALKI Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim
3	Studi Pengukuran Emisi Gas Buang dari Pengoperasian Kapal Laut Niaga Domestik
4	Studi Pemetaan/Sebaran Pelabuhan Sungai Dan Danau Di Indonesia
5	Studi Pemilihan Transportasi Air Untuk Menunjang Pariwisata
6	Penelitian Pemilihan Pelabuhan Untuk Konsolidasi Muatan Balik Tol Laut Di Kep. Maluku
7	Penelitian Basic Design Dan Key Plan Motorized Barge Untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan Jakarta-Surabaya
8	Penelitian Pengembangan Design Breakwater Disesuaikan Dengan Wilayah Perairan
9	Studi Pengukuran Daya Beli Jasa Transportasi Laut Pada Wilayah Tertinggal Di Indonesia
10	Studi Penataan Pelabuhan Laut Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri Dalam Rangka Mendukung Pelabuhan Hub Internasional
11	Studi Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Laut Dalam Rangka Antisipasi Kesiapan Indonesia Menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (Mimsas)
12	Evaluasi Pelaksanaan KP 775 Tahun 2018 di Pelabuhan Sekupang dan Batu Ampar
13	Kesiapan Indonesia Dalam Penerapan Global Sulfur Cap sebesar 0,5%
14	Kesiapan Pengoperasian Kapal 5000 DWT di Penyeberangan Merak-Bakauheni Dalam Rangka Penerapan PM 88 Tahun 2014
15	Dukungan Infrastruktur Transportasi Penyeberangan di Bangka Selatan
16	Dukungan Infrastruktur Transportasi Laut di Kabupaten Biak-Numfor
17	Dukungan Infrastruktur Transportasi Laut di Kabupaten Tembraw untuk mendukung pendistribusian barang
18	Pengembangan dan Peningkatan Status Pelabuhan Wini Kabupaten Timur Tengah Utara NTT
19	Kriteria Infrastruktur Pelabuhan Sorong untuk mendukung Poros Maritim

20	Biaya Transportasi Petikemas Melalui Pelabuhan (Studi Kasus : Pelabuhan Tg. Priok - Tg. Perak (PP))
21	Biaya Transportasi Barang Petikemas Dari dan Ke Hinterland Pada Pelabuhan Tg. Priok dan Tg. Perak Priok dan Tg. Perak
22	Kajian pelayanan kapal cepat lintas Bengkalis – Malaka
23	Kajian Finansial Pembangunan dan Pengoperasionalan Landing Craft Cargo (LCC)
24	Bentuk Kerjasama Pengelolaan dan Pengusahaan Angkutan di Perairan Kepulauan Seribu
25	Pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
26	Kebutuhan Sarana Kapal Penumpang dan Muatan Barang di Kepulauan Seribu
27	Kajian kebijakan Muatan Kapal Berbasis Komputer
28	Penghitungan Biaya Pembuatan Kapal Feeder Tol Laut LCC 500 DWT Dalam Rangka Mendukung Optimalisasi Pelayanan Logistik Barang dan Konektivitas di Wilayah Indonesia Timur
29	Potensi Penerapan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Limbah Sampah Terapung di Pelabuhan
30	Penghitungan Biaya Pembuatan Kapal MCB Untuk Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan Jakarta – Surabaya
31	Kajian optimalisasi pelabuhan Tengkyu I Tarakan
32	Kajian Identifikasi Permasalahan Demand Penumpang Speedboat di Nunukan, Kalimantan Utara
33	Kajian Holding Pelabuhan
34	Kajian Identifikasi Permasalahan Transportasi Laut di Kalimantan Utara
35	Kajian Pemindahan Pelayanan Kapal Peln dari Terminal Batu Ampar ke Terminal Domestik Sekupang Pelabuhan Batam
36	Desain kapal penyeberangan sungai di Tapin, Kalsel
37	Kebutuhan SDM Penyelenggara Sarana Transportasi Laut
38	Kebutuhan SDM Penyelenggara Prasarana Transportasi Laut
39	Kajian Kebijakan Untuk Optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung
40	Kajian Potensi Hinterland Pelabuhan Kuala Tanjung
41	Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 165 tentang Amandemen 2018 IS Code yang akan berlaku penuh pada 1 Oktober 2020
42	Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 79 tentang Marpol Annexes I, II and V, yang akan berlaku penuh pada 1 Oktober 2020
43	Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 80 tentang Marpol Annex II - Cargo residues and tank washings of persistent floating products, yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2021
44	Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 170 tentang The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2021
45	Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 171 tentang The Code on the Enhanced Programme of Inspections during Surveys of Bulk carriers and Oil Tankers, yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2021
46	Kajian kesiapan Indonesia terhadap implementasi amandemen nomor 172 tentang The International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code, yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2021
47	Kajian Kebutuhan Tenaga Perekayasa Untuk Mendukung Kegiatan Penelitian
PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Pembuatan Bandar udara Perairan (Waterbase) dan Pengoperasian Pesawat Udara Perairan (Seaplane) di Pulau Gili Iyang, Pulau Senua dan Danau Toba
2	Pengembangan Purwarupa Peralatan Detektor Genangan Air (Standing Water Detector/ SWD) Di Landas Pacu Untuk Proses Sertifikasi
3	Pengembangan Purwarupa Detektor Angin Geser Lapisan Rendah (Low Level Wind Shear Detector/LLWSD) Di Bandara Untuk Proses Sertifikasi
4	Penelitian Penyusunan Air Cargo Transshipment Master Plan Di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai
5	Studi Rencana Induk (Masterplan) Transportasi Udara Nasional tahun 2020 - 2024

6	Studi Penyusunan Kriteria dan Pengembangan Model Multiairport System di Indonesia
7	Penelitian Pengembangan Wind Shear Detector Prototype untuk pemenuhan Sertifikasi
8	Penelitian Pengembangan Standing Water Detector Prototype untuk Pemenuhan Sertifikasi
9	Penelitian Pembentukan Layanan Penyelenggaraan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan di Wilayah Indonesia
10	Penelitian Percepatan Implementasi Kerja Sama Pemerintahan dengan Badan Usaha Untuk Mengembangkan Infrastruktur Bandar Udara Di Indonesia Dalam Mendukung Transportasi Udara Yang Berkelanjutan
11	Kajian Analisa Biaya Operasi dan Tarif Penerbangan Domestik Kelas Ekonomi
12	Kajian Evaluasi Kebijakan Tentang Kewajiban Asuransi Investigasi oleh Maskapai Penerbangan
13	Kajian Faktor-Faktor yang memengaruhi Penurunan Jumlah Penumpang Angkutan Udara
14	Kajian Kriteria bandar Udara Ramah Lingkungan (Green Airport) Terhadap Standar Keselamatan Penerbangan
15	Kajian Airport Capacity untuk Penambahan Slot Time dan Rute di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
16	Kajian Penggunaan Biofuel dan Pengaruhnya Terhadap Harga Tiket Pesawat Udara Serta Penurunan Terhadap Emisi Gas Buang (Climate Change)
17	Kajian Pengaruh Gempa Terhadap Menurunnya Struktur Runaway dan Bangunan Bandar Udara
18	Kajian Potensi Kerja Sama Angkutan Udara Antar Badan Usaha Angkutan Udara
19	Kajian Pemberdayaan Lulusan Program Studi Penerangan Aeronautika (Aeronautical Information Service) di Indonesia
20	Kajian Implementasi State Safety Program (SSP) di Indonesia
21	Kajian Pengembangan Operasional Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi Ditinjau dari Pemenuhan Fasilitas dan SDM untuk Penerbangan Internasional (Regional)
22	Kajian Optimalisasi Pengguna Jasa Pada Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II
23	Persepsi Pelayanan Angkutan Lanjutan Damri di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
24	Review RAN-GRK di Bidang Navigasi Penerbangan
25	Kajian Evaluasi Stress Kerja Dan Tingkat Kelelahan (Fatigue) Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
26	Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya
27	Perencanaan Aerotropolis di Bandar Udara Kertajati
28	Fasilitas Bandar Udara untuk Meningkatkan Pelayanan dan Menunjang Pertumbuhan Permintaan Jasa Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional A. P. T. Pranoto Samarinda
29	Pengkajian Peraturan Pengoperasian Small Unmanned Aircraft System (Small UAS) Untuk Tujuan Hobby Dan Rekreasi di Indonesia
30	Pengkajian Peraturan Pengoperasian Unmanned Aircraft System (UAS) di Indonesia

B. Realisasi Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis dan Dukungan Manajemen Lainnya

Kegiatan Penelitian di Badan Litbang Perhubungan dapat berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, yaitu meliputi kegiatan penunjang serta pembinaan. Kegiatan pembinaan sumber daya manusia litbang meliputi tenaga fungsional baik tenaga peneliti, perekayasa penelitian, serta kegiatan penunjang yang terkait dengan pengembangan wawasan dan profesionalisme. Sementara kegiatan penunjang penelitian berupa penyediaan sarana dan prasarana. Secara rinci realisasi pencapaian kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya selama kurun waktu 2015-2019 meliputi:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Litbang Perhubungan

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui promosi jabatan baik fungsional maupun struktural serta berbagai program diklat (pendidikan dan pelatihan) bagi pegawai Badan Litbang Perhubungan. Diklat dimaksud meliputi diklat penjenjangan/struktural dan diklat teknis fungsional. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM lingkup Badan Litbang Perhubungan, selama kurun waktu 2015-2019 telah dilakukan pengiriman tugas belajar S2 dan S3 baik ke universitas di dalam negeri maupun luar negeri. Secara rinci perkembangan peserta tugas belajar, dan peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam peningkatan kompetensi jabatan fungsional peneliti disajikan pada Tabel 1.6 dan Tabel 1.7 berikut ini:

Tabel 1. 6 Perkembangan Peserta Tugas/Ijin Belajar

NO	PROGRAM	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan Sarjana (S1)	0	0	0	0	1
2	Pendidikan Magister (S2)	4	3	1	2	0
3	Pendidikan Doktor (S3)	1	2	0	0	1
JUMLAH		5	5	1	2	2

Sumber: Badan Litbang Perhubungan, 2019

Tabel 1. 7 Perkembangan Peserta Diklat Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

NO	Program	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diklat Peneliti Pertama	0	5	2	0	0
2.	Diklat Peneliti Lanjutan	0	0	5	1	0
JUMLAH		0	5	7	1	0

Sumber: Badan Litbang Perhubungan, 2019

Di samping pengiriman tugas belajar, diklat jabatan fungsional dan kursus dasar peningkatan kompetensi pegawai, Badan Litbang Perhubungan juga melakukan pengiriman pegawai untuk mengikuti kursus, *training/workshop* baik yang diselenggarakan secara internal Badan Litbang maupun di luar, baik di lingkup dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana terdata dalam Tabel 1.8 di bawah ini:

Tabel 1. 8 Perkembangan Peserta Kursus, Training/Workshop Dalam dan Luar Negeri Tahun 2015-2019

NO	Program	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	<i>English Basic 1 and 3 Course</i>	45	0	0	20	
2.	<i>English conversation and English writing</i>	0	32	0	0	
3.	Pelatihan Teknik Presentasi	0	28	21	15	
4.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	25	2	2	0	
5.	Diklat fungsional bendahara pengeluaran	2	2	1	0	
6.	Diklat fungsional peneliti tingkat pertama	0	5	2	0	
7.	Diklat metodologi penelitian	0	50	0	18	
8.	Pelatihan editor	0	25	0	20	

NO	Program	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
9.	Pelatihan metode penulisan ilmiah	21	50	0	20	
10.	Bimtek pengadaan Barang dan Jasa	0	26	0	3	
11.	<i>Training on Vissim/Vissum</i>	0	10	28	0	
12.	Bimtek SPSE	0	3	0	0	
13.	Diklat Keselamatan Transportasi	0	1	0	0	
14.	Diklat asiparis	0	3	0	0	
15.	Diklat penyusunan Renstra dan LAKIP	0	1	0	0	
16.	Diklat SIMAK BMN	0	1	0	0	
17.	Diklat Penyusunan Masterplan Pelabuhan	0	30	15	0	
18.	Bimtek Feasibility Study	0	10	0	0	
19.	Bimtek SID dan DED	0	15	0	0	
20.	Pelatihan pengoperasian drone	0	5	0	0	
21.	Pelatihan struktur pesawat terbang	0	40	0	0	
22.	Pelatihan map info	0	10	0	0	
23.	Diklat pembangunan karakter dan kesamaptaaan aparaturnya Kemenhub	0	16	0	0	
24.	Diklat Pejabat Pembuat Komitmen	0	1	0	0	
25.	Bimtek Penyusunan Per UU	0	1	0	0	
26.	Pelatihan aplikasi keuangan pemerintah	10	0	0	0	
27.	Diklat perencanaan transportasi	2	0	0	0	
28.	Pelatihan masterplan	15	0	0	0	
29.	Pelatihan penulisan ilmiah populer	20	0	0	0	
30.	Manajemen Stress	0	0	1	0	
31.	Manajemen SDM	0	0	2	0	
32.	Sistem Keselamatan Transportasi Kendaraan Darat	0	0	28	0	
33.	Magang Peneliti di PT.INKA Madiun	0	0	16	0	
34.	Magang Peneliti di Proyek Pembangunan LRT Palembang	0	0	28	0	
35.	Diklat <i>Autocad</i>	0	0	10	5	
36.	Diklat <i>Sketch Up</i>	0	0	10	0	
37.	Diklat Bahasa Korea	0	0	1	0	
38.	Pelatihan <i>Software</i> Mapinfo	0	0	12	0	
39.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Assesor</i>	0	0	2	0	
40.	<i>The Profesional Training Program On Railway Policy and Safety for ASEAN</i>	0	0	2	0	
41.	<i>Basic Aircraft Training;</i>	0	0	16	0	
42.	<i>Basic Aviation Knowledge Training;</i>	0	0	16	0	
43.	<i>Aviation Security and Dangerous Goods Training;</i>	0	0	12	0	
44.	<i>Human Factors, Safety Assessment, Realibility and Maintainability Training.</i>	0	0	14	0	
45.	Ujian Dinas Tahun 2017	0	0	3	0	
46.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	0	0	0	10	
47.	Pengembangan motivasi pegawai	0	0	0	300	
48.	Diklat fungsional pelatihan dasar penyusunan zonasi	0	0	0	5	
49.	Workshop/siding/studi banding/konferensi luar negeri	0	0	0	22	
50.	Bimtek teknis transportasi jalan dan perkeretaapian	0	0	0	10	
51.	Magang peneliti tahun 2018	0	0	0	10	
52.	Capacity building	0	0	0	79	
53.	Kursus transportasi multimoda	0	0	0	10	
JUMLAH		138	367	242	547	

Sumber: Badan Litbang Perhubungan, 2019

- b. Kegiatan Seminar/ Workshop/ Roundtable Discussion/ Focus Group Discussion/ Temu Karya Peneliti

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan pokok Badan Litbang Perhubungan, dan dalam rangka *transfer of knowledge* bagi para peneliti maka telah dilakukan kegiatan seminar/lokakarya/ceramah ilmiah/dan temu karya peneliti.

Tabel 1. 9 Kegiatan Seminar/Workshop/Roundtable Discussion/Focus Group Discussion/Temu Karya Peneliti

SEMINAR/ROUNDTABLE DISCUSSION/FOCUS GROUP DISCUSSION 2015	
LINTAS SEKTORAL	
1	Seminar Internasional “ <i>Environmentally Sustainable Transport</i> ”
BIDANG MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA	
1	Workshop discussion “Pedoman Penyusunan Rencana Induk”
2	Workshop discussion “Implementasi SKKNI Transportasi Multimoda Subbidang Pengurusan Pengangkutan dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang”
3	Workshop discussion “Pemanfaatan Data Seluler Sebagai Basis Data Pergerakan Orang”.
4	Workshop discussion “Kebijakan Penerapan Environmentally Sustainable Transport (EST) Perkotaan di Indonesia”.
5	Workshop discussion “ Paparan Dirjen Perkeretaapian dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”
6	Workshop discussion “Paparan Dirjen Perhubungan Darat dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”
7	Workshop discussion “Paparan Dirjen Perhubungan Udara dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”
8	Workshop discussion “Paparan Dirjen Perhubungan Laut dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”
9	Workshop discussion “ Paparan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”.
BIDANG TRANSPORTASI DARAT	
1	Workshop discussion “Uji Publik Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Standar Pelayanan Minimum Kereta Api
2	Workshop discussion “Singapore Experience In Gaining Public Acceptance of ERP
3	Workshop discussion “Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek”
4	Workshop discussion “General Lecture Dr. Chandra “Competition Between Cities A Toll Setting Game With Experimental Result
5	Workshop discussion “Penerapan Dan Pengembangan Light Rail Transit (LRT) Di Indonesia”
6	Workshop discussion “Pengembangan Angkutan Massal Yang Terintegrasi Di Jabodetabek”
7	Workshop discussion “Pemodelan Transportasi Jabodetabek Dengan Menggunakan Software Mars”
8	Workshop discussion “Review Rencana induk Transportasi Jalan Dan Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP)”
9	Workshop discussion “Review Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS)
10	Workshop discussion “Pembahasan Rencana Induk Transportasi Di Wilayah Aglomerasi”
11	Strategi Pembangunan Dan Pengembangan BRT Di Kota Metropolitan Dan Kota Besar Secara Efektif Dan Efisien”
BIDANG TRANSPORTASI LAUT	
1	Workshop discussion “Uji Publik Terhadap Konsep Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penumpang Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan”
2	Workshop discussion “Reviuw Rencana Induk Pelabuhan Nasional”
3	Workshop discussion “Masterplan Pelabuhan Laut Bicoli dan Tapaleo”
4	Workshop discussion “Framework For Strengthening Container Shipping Connectivity to Implement a Marine Highway System in Indonesia”
5	Workshop discussion “Pengembangan Angkutan Air dalam Mendukung Pengembangan Kawasan MIFFE di Merauke”

6	Workshop discussion “Pemodelan Indonesia Container Model”
BIDANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Workshop discussion “Pemanfaatan <i>Multi User Check In</i> Untuk Berbagai Moda Transportasi (Darat, Laut, Perkeretaapian, Dan Udara)”
2	Workshop discussion “Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri (Local Content) Dalam Rancang Bangun Pesawat Produk Indonesia”
SEMINAR/ROUNDTABLE DISCUSSION/FOCUS GROUP DISCUSSION 2016	
LINTAS SEKTORAL	
1	Focus Group Discussion “Reviu Rencana Induk Transportasi”
2	Focus Group Discussion “Keikutsertaan Indonesia dalam <i>Trans-Pacific Partnership</i> Tahun 2016”
3	Focus Group Discussion “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2016”
4	Focus Group Discussion “Menuju Angkutan Barang dan Logistik Yang Berwawasan Lingkungan”
5	Focus Group Discussion “Sosialisasi Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI)”
BIDANG MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA	
1	Focus Group Discussion “Pengembangan E-Gudang Dalam Rangka Kelancaran Arus Barang”
2	Focus Group Discussion “Integrasi Rencana Pengembangan Tranportasi Tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota”
3	Sosialisasi “Persiapan Pelaksanaan Survei ATTN Barang Tahun 2016”
BIDANG TRANSPORTASIJALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Focus Group Discussion “Antisipasi Kemacetan Pada Waktu Libur Panjang”
2	Focus Group Discussion “Integrasi Area Traffic Control System (ATCS) di Jabodetabek”
3	Focus Group Discussion “Pengembangan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Indonesia”
4	Focus Group Discussion “Implementasi Sistem Pencegahan Pelanggaran Sinyal kereta Api dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian”
5	Focus Group Discussion “Rencana Pengembangan Pelayanan Angkutan Pemukiman di Wilayah Jabodetabek”
6	Focus Group Discussion “Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Umum Jalan Jabodetabek”
7	Focus Group Discussion “Implementasi Transjabodetabek Ekspres”
8	Focus Group Discussion “Review Kinerja Prasarana Terminal Penumpang di Jabodetabek dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 H”
9	Focus Group Discussion “Penyusunan Pelayanan Angkutan Bandar Udara”
10	Focus Group Discussion “Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)”
11	Focus Group Discussion “Redistribusi Fungsi Lahan di Jabodetabek”
12	Focus Group Discussion “Pengembangan Keterpaduan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek”
BIDANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN	
1	Focus Group Discussion “Sertifikat Keahlian Pelaut”
2	Focus Group Discussion “Review Rencana Induk Pelabuhan”
3	Focus Group Discussion “Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Laut”
4	Kegiatan Diseminasi “Hasil Penelitian Masterplan Pelabuhan Laut Kabisadar, Saparua/Haria, Tulehu, Hatupiru, Tehoru, Bemo, Ilath, Manipa, Hitu, Kairatu, Wayauwa, Dan Saketa, Serta Studi Masterplan Terminal Penyeberangan Wahai, Ambalau, Namrole, Luh, Ohoiraut, & Elat”
BIDANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Focus Group Discussion “Pengembangan Bandar Udara Wirasaba Dalam Rangka Menunjang Konektifitas Berbasis Turboprop di Pulau Jawa”
2	Focus Group Discussion “Pemilihan Type Pesawat Udara dan Pembuatan Hub and Spoke (Pengumpul dan Pengumpan) Bandar Udara Untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Provinsi Papua”
SEMINAR/ROUNDTABLE DISCUSSION/FOCUS GROUP DISCUSSION 2017	
LINTAS SEKTORAL	
1	Arah Kebijakan Pengembangan Transportasi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademis Sistranas (Pembahasan di Wilayah Indonesia Timur)

2	<i>Unlocking Investment for Climate Actions in the Transport Sector</i>
3	Seminar FKK Penguatan Kapasitas dan Peran Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Inovasi Pembangunan Infrastruktur Guna Peningkatan Daya Saing Perekonomian Nasional
BIDANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) Orang Tahun 2017
2	Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) Orang Tahun 2017
3	Review Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 Terkait Evaluasi Kemanfaatan
4	Pengembangan Indikator Kinerja Integrasi Transportasi Antarmoda
5	Arah Kebijakan Transportasi Antarmoda dalam Mendukung Sistem Transportasi Nasional
6	Pengembangan Sistem Transportasi Nasional Dalam Mendukung Pelayanan Angkutan Barang Yang Efisien
BIDANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2017
2	Kajian Teknis Pembangunan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) di Podomoro Golf View Cimanggis
3	<i>Smart Mobility and Smart Infrastructure</i>
4	Peran Angkutan Pedesaan dalam Sistem Transportasi Nasional
5	Reviu Peraturan Menteri Perhubungan Pengganti PM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
6	Pembangunan Perkeretaapian: Tantangan dan Peluang
7	Uji Simulasi <i>Crashworthiness</i> pada Rancang Bangun Karoseri Kendaraan Penumpang di Indonesia
BIDANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	Pemberdayaan Pelayaran Rakyat Dalam Menunjang Transportasi Laut
2	Arah Kebijakan Pengembangan Transportasi Laut Dalam Mendukung Sistem Transportasi Nasional
3	Peran Angkutan Sungai Dan Danau dalam Mendukung Angkutan Pedalaman
4	Desain Kapal <i>Feeder</i> Untuk Mendukung Pelayanan Tol Laut di Wilayah Maluku Utara
BIDANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Peningkatan Keselamatan Transportasi “Mencari Solusi Terhadap <i>Accident</i> dan <i>Serious Incident</i> Transportasi Udara
2	Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara dan Pembuatan <i>Hub and Spoke</i> (Pengumpul dan Pengumpan) Bandar Udara Untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Papua
3	Pola Kerja Sama Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara dengan BUMN/Swasta
4	Kebijakan Transportasi Udara dalam Mendukung Sistem Transportasi Nasional
SEMINAR/ROUNDTABLE DISCUSSION/FOCUS GROUP DISCUSSION 2018	
LINTAS SEKTORAL	
1	FGD persiapan <i>Workshop Digital Transportation</i>
2	<i>Workshop Digital Transportation</i>
3	Rakornis Tentang Penelitian Dan Pengembangan Di Era Digitalisasi Dan Big Data Untuk Meningkatkan Kinerja Transportasi
BIDANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	FGD Tantangan Dan Isu Strategis Pembangunan Transportasi Antarmoda di Era Digitalisasi
2	Standarisasi Distribusi Logistik Domestik
3	Optimalisasi Integrasi Transportasi di Bandara Soekarno-Hatta
4	Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi
5	Efektivitas Penerapan Sistem MLFF (Multi Lane Free-Flow) di jalan tol
6	Pemanfaatan Mobile Positioning Data Untuk Analisis Ekonomi
BIDANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Inovasi Teknologi Kendaraan Angkutan Barang untuk Mengurangi Kerusakan Jalan Akibat

	Kelebihan Muatan
2	Inovasi Teknologi Pemantauan Pergerakan Tanah di Sekitar Rel Kereta Api
3	Strategi Pengembangan Teknologi dan Industri di Bidang Perkeretaapian
4	Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5	Efektivitas Penerapan Kebijakan Ganjil Genap
6	Penerapan e-Tilang Bagi Kendaraan Angkutan barang Guna Mewujudkan Keselamatan Transportasi Jalan
7	Peluang Tantangan Penerapan WIM (Weigh In Motion) Untuk Mendukung Kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL)
8	Peluang dan Tantangan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Transportasi Jalan Sebagai Perumus Kebijakan Di Sektor Transportasi Jalan
BIDANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	Peran Transportasi Laut Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
2	Tingkat Kesiapan Komponen Dalam Negeri (TKDN) Untuk Mendukung Pembangunan dan Perekayasaan Saran Angkutan Maritim
BIDANG TRANSPORTASI UDARA	
1	FGD Pengawasan Keamanan terhadap Pemanfaatan Ruang Bagasi tercatat Penumpang Pesawat Udara yang Tidak Terpakai
2	Optimalisasi Pengoperasian Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati
3	Pengembangan Transshipment Cargo Udara di bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar – Bali
SEMINAR/ROUNDTABLE DISCUSSION/FOCUS GROUP DISCUSSION 2019	
LINTAS SEKTORAL	
1	Rapat Koordinasi Teknis : Revitalisasi Badan Litbang Perhubungan Sebagai Lembaga Penyusun Rekomendasi Kebijakan Transportasi di Era Revolusi Industri 4.0
2	Temu Karya Peneliti Tahun 2019
3	Forum Komunikasi Kelitbang (FKK) 2019 : Penguatan Litbang Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
4	Rencana Induk Penelitian Transportasi Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024
5	Penataan Jaringan Listrik Gedung Kantor Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat
6	Penyusunan Renstra 2020-2024
BIDANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	Peningkatan Keterpaduan Transportasi Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
2	Peningkatan Dukungan Transportasi Nasional Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3	Kebutuhan Pengimplementasian Konsep Transit Oriented Development Sesuai Karakteristik Tata Guna Lahan Sekitar Stasiun-Stasiun LRT Palembang
4	Roadmap Pembangunan Transportasi Berkelanjutan
5	Harmonisasi Kegiatan Riset dan Pengembangan Inovasi di Sektor Transportasi
6	Pemetaan dan Agenda Riset Transportasi Nasional
BIDANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Pemanfaatan Intelligent Transport System (ITS) Dalam Pengangkutan Barang
2	Pengaruh Pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa Terhadap Pelayanan Transportasi Jalan
3	Prediksi dan Strategi menghadapi Mudik Lebaran Tahun 2019
4	Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2009 (1440 H)
5	Kesiapan Implementasi Mobil Listrik Sebagai Sarana Angkutan Umum di Indonesia
6	Strategi Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas di Ruas Jalan Tol Cipali dan Cipularang
7	Reformasi Kebijakan Penanganan Perlintasan Sebidang di Indonesia
BIDANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	FGD Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) dalam Rangka Mendukung Keselamatan Transportasi
2	FGD Dukungan Transportasi Laut untuk Memperlancar Distribusi Barang ke Wilayah 3TP
BIDANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Sinergitas Pengaturan Pengoperasian dan Pemanfaatan Drone di Indonesia
2	Penelitian Percepatan Implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia dalam Mendukung Transportasi

	Udara yang Berkelanjutan
3	Pengembangan dan Pemanfaatan Peralatan Produksi Dalam Negeri (TKDN) Untuk Menunjang Keselamatan Penerbangan
4	Penyusunan Kelembagaan Forum Riset dan Inovasi Transportasi
5	Pengembangan Transshipment Kargo Udara di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar
TEMU KARYA PENELITI 2015	
1	Pedoman Teknis Pemanfaatan Keterpaduan Kepelabuhan dengan Penyeberangan
2	Basic Design Pesawat Latih Flying School dengan Meningkatkan Kandungan Lokal
3	Pedoman Umum Perancangan Integrasi Stasiun Kereta Api
4	Alternatif Desain Penataan Perlintasan Sebidang di Indonesia
TEMU KARYA PENELITI 2016	
1	Analisis Kebijakan Transportasi Multimoda Dalam Rangka Mengurangi Disparitas Harga Antar Wilayah
2	Evaluasi Pelayanan Angkutan Lanjutan Masa Lebaran Tahun 2015 di Pelabuhan Penyeberangan Merak
3	Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Salatiga
4	<i>Impact Of Fuel Subsidy Remval on Stated Preference To Mass Rapid Transit (MRT)</i>
5	Penelitian Kebutuhan Fasilitas Kapal Penumpang Berdasarkan Gender di Balikpapan
6	Evaluasi Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Amurang di Minahasa Selatan
7	Evaluasi Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi
8	Perencanaan Pengembangan Runway dan Taxiway Bandar Udara Juwata-Tarakan
9	Penentuan Lokasi Simpul Integrasi Jaringan Kereta Api dan BRT di Bandara Syamsudin Noor
10	Rencana Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di Kota Kediri, Jawa Timur
11	Desain Kapal Feeder Tol Laut Trayek T-5
12	Kesediaan Calon Pengguna Trem/Light Rapid Transport (LRT) di Yogyakarta Dengan Metode Random Parameter Bivariate Ordered Probit
13	Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Kota di Kota Banjarbaru
14	Upaya Peningkatan Konektivitas Angkutan Laut di Wilayah Maluku
15	Pemenuhan Kualitas Pelayanan di Bandara Haji Hasan Aroeboesman Ende Untuk Meningkatkan Kepuasan Penumpang
TEMU KARYA PENELITI 2017	
1	Pembuatan <i>Prototype</i> Alat Penghitungan <i>Track Access Charge (TAC)</i> Pada Prasarana Kereta Api Dengan Menggunakan Sensor Infra Merah;
2	Integrasi Pelayanan Penumpang di Simpul Transportasi Merak;
3	Optimalisasi Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Solo Melalui Peningkatan Konektivitas Antara Solo – Yogyakarta Dengan Angkutan Kereta Api Khusus Bandar Udara; dan
4	Konsepsi Tol Laut dan Studi Kasus Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut

C. Realisasi Kinerja Keuangan Badan Litbang Perhubungan

Kebutuhan anggaran dan realisasi anggaran Badan Litbang Perhubungan tahun 2015 – 2019 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.10 di bawah ini. Total Kebutuhan Anggaran Badan Litbang Perhubungan pada kurun waktu 2015-2019 sebesar Rp. 1,204 Trilyun. Namun demikian, relisasi anggaran sampai dengan Tahun 2019 hanya teralokasikan sebesar Rp. 809,02 Milyar, sehingga terdapat selisih atau gap pendanaan sebesar Rp. 395,68 Milyar.

Tabel 1. 10 Target Anggaran dan Capaian Anggaran Badan Litbang Perhubungan 2015-2019

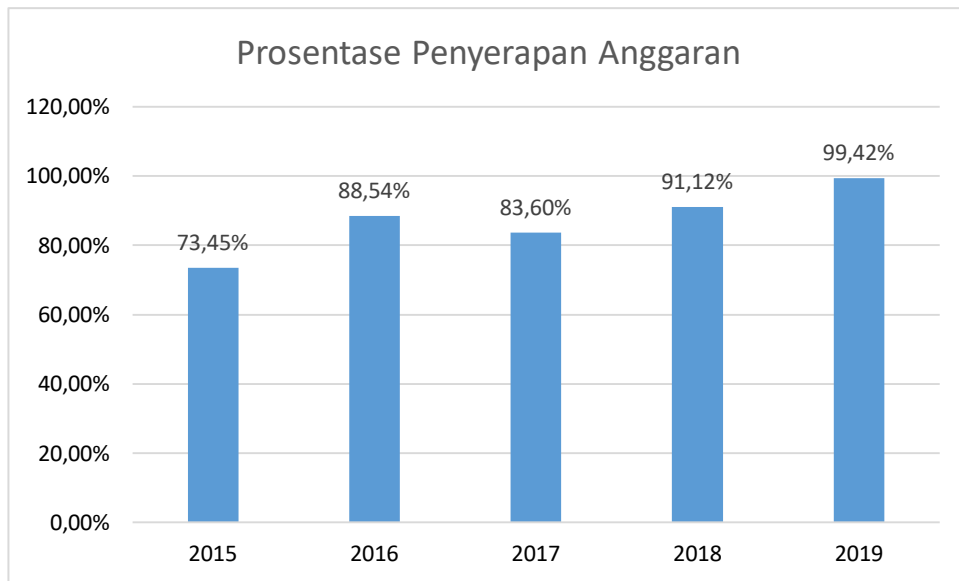
Tahun	Anggaran	Revisi	Realisasi	Prosentase
-------	----------	--------	-----------	------------

	Renstra	Anggaran		Realisasi
2015	228.259.100.000	228.259.100.000	167,659,025,429	73,45 %
2016	217.259.108.000	176.406.427.000	156.196.689.150	88,54 %
2017	124.163.000.000	116.194.498.000	97.137.904.761	83,6 %
2018	143.830.906.000	143.830.906.000	131.259.025.838	91,12 %
2019	138.253.242.000	144.334.726.000	143.502.285.892	99,42 %

Sumber: LAKIP Badan Litbang Perhubungan, Tahun 2015-2019

Secara umum dapat dilihat terjadinya dinamika dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan rencana anggaran yang telah disetujui alokasinya. Perubahan signifikan terjadi pada periode 2016 dengan adanya pemotongan (*self-blocking*) dua kali sehingga anggaran Badan Litbang Perhubungan berkurang 18,8% atau pagu anggaran pada tahun 2016 yang dapat dibelanjakan adalah sebesar Rp 176.406.427.000,-. Tren pengurangan anggaran berlanjut pada periode 2017 dengan adanya pemotongan pagu anggaran menjadi sebesar Rp 116.194.498.000,-. Namun demikian pada periode tahun 2019 terdapat penambahan anggaran Badan Litbang Perhubungan sebesar 4,4% sehingga pagu revisi menjadi Rp144.334.726.000,-.

Sementara itu, dalam realisasi anggaran pada kurun waktu 2015 - 2019 terlihat adanya prosentase penyerapan yang semakin membaik trennya dari tahun ke tahun, yang mencapai kinerja terbaiknya pada Tahun 2019 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 143.502.285.892,00 atau 99,42%. Secara khusus prosentase penyerapan anggaran di bawah 90% pada periode 2015-2017 disebabkan karena anggaran yang diblokir baru dibuka menjelang akhir tahun, sehingga mengakibatkan tidak tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Kurang optimalnya realisasi serapan anggaran juga berasal dari perubahan belanja pegawai akibat adanya mutasi pegawai Badan Litbang Perhubungan untuk memenuhi kuota pegawai unit kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang baru dibentuk. Hal ini mempengaruhi realisasi besaran belanja pegawai dan belanja barang. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa kurang optimalnya realisasi serapan anggaran sebagian besar berasal dari belanja pegawai dikarenakan kelebihan gaji dan tunjangan kinerja, adanya mutasi pegawai, dan pegawai yang meninggal dunia.

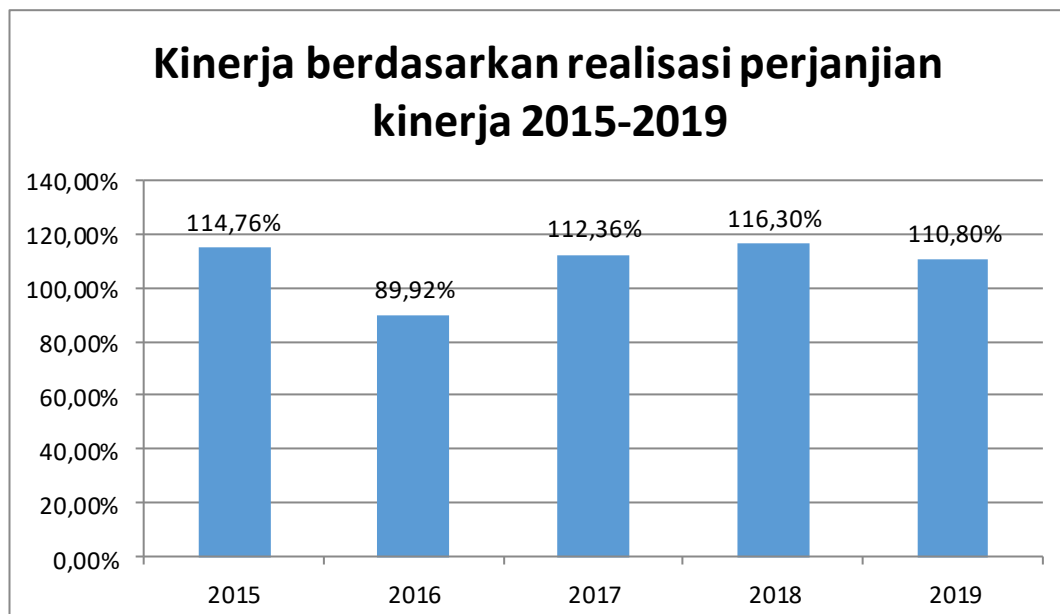


Gambar 1.4 Perbandingan Tingkat Penyerapan Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2019

D. Evaluasi Capaian Renstra Badan Litbang Perhubungan 2015-2019

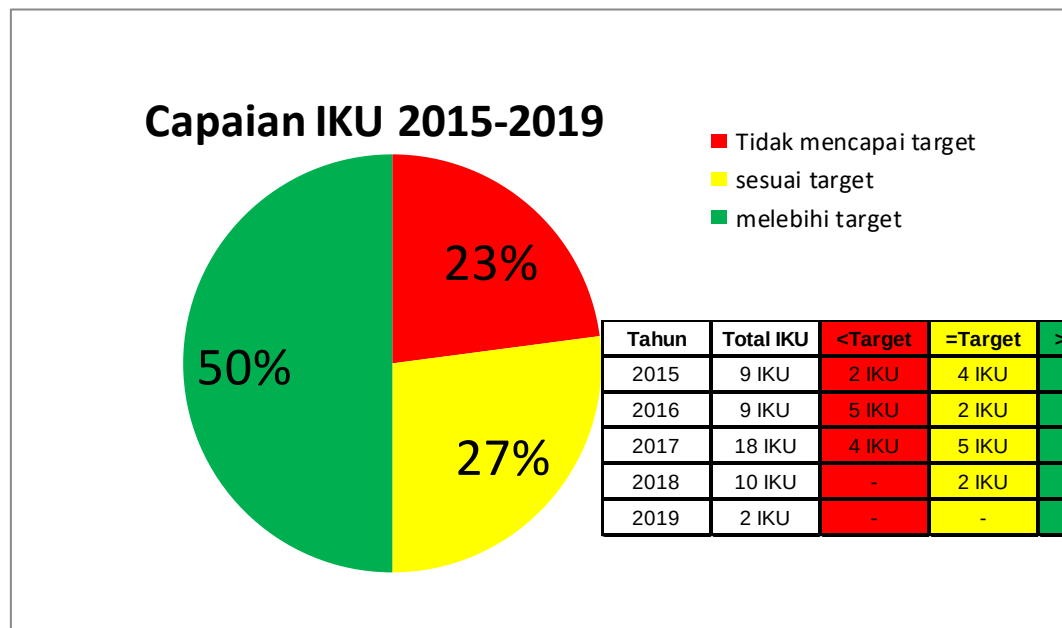
Seiring dengan perkembangan isu strategis di bidang transportasi serta pemenuhan target pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, telah dilaksanakan 966 kegiatan penelitian dan pengembangan dalam kerangka transportasi sebagai bagian dari kewilayahan dan perkembangan teknologi. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui kegiatan survei, masterplan, rencana induk, studi, pengembangan desain teknis dan prototipe, evaluasi, identifikasi, review, kajian, uji simulasi design, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pada transportasi darat, SDP, KA, laut, udara, dan multimoda.

Dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, telah dilaksanakan peningkatan kompetensi SDM peneliti, pengembangan sarana dan prasarana penelitian, peningkatan kolaborasi dengan stakeholders yang terkait termasuk perguruan tinggi, serta keaktifan peneliti dalam forum kerjasama nasional dan internasional baik secara bilateral maupun multilateral.



Gambar 1.5. Kinerja berdasarkan Realisasi Perjanjian Kinerja 2015-2019

Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali yaitu Reviu I (2016), Reviu II (2017), dan Reviu III (2018). Reviu Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2015-2019 juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali guna menyesuaikan adanya perubahan strategi dan lingkungan strategis sebagai dasar penyesuaian program prioritas penelitian dan indikator kinerja. Hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian PAN-RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan perlu dilakukan perbaikan (reviu) atas RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tersebut. Perbaikan tersebut terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebelumnya berbasis *output* menjadi berbasis *outcome*.



Gambar 1.6 Capaian IKU Badan Litbang Perhubungan 2015-2019

Jika diperhatikan kinerja berdasarkan Realisasi Perjanjian Kinerja yang tercermin dalam capaian IKU Badan Litbang Perhubungan 2015-2019, terlihat pada periode 2015-2017 terdapat 11 (sebelas) IKU yang tidak mencapai target. Secara khusus capaian IKU Tahun 2016 merupakan yang terendah dibandingkan periode tahun lainnya dengan tingkat kinerja sebesar 89,92% atau terdapat 5 IKU yang tidak mencapai target. Pada proses evaluasi kinerja, dapat diidentifikasi beberapa penyebab kendala dalam pelaksanaan program selama tahun anggaran 2016, antara lain:

- a. Adanya pemotongan anggaran tahap 1 dan tahap 2 (*self-blocking*) pada tahun anggaran berjalan menjadikan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan POK dan DIPA, sehingga persiapan pelaksanaan kerap memerlukan revisi, yang selanjutnya berdampak pada terlambatnya memulai aktivitas pelaksanaan anggaran.
- b. Adanya ketentuan untuk melaporkan setiap perubahan kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan PM 3 Tahun 2014 menjadikan pelaksanaan kegiatan kurang fleksibel, khususnya terhadap perubahan judul penelitian yang dilaksanakan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan.
- c. Jumlah peneliti Badan Litbang Perhubungan semakin berkurang dari yang semula berjumlah 124 di tahun 2015 berkurang menjadi 104 di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya pensiun dan mutasi beberapa peneliti ke unit kerja BPTJ, sementara di pihak lain tuntutan kebutuhan menjawab permasalahan transportasi memerlukan kompetensi peneliti dengan keilmuan yang mendukung.
- d. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan terkait perubahan kebijakan pimpinan sehingga berimplikasi terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan diindikasikan dengan masih lemahnya pengawasan serta evaluasi terhadap rencana penganggaran dan pelaksanaan anggaran dikarenakan pengelompokan kegiatan yang masih terkesan tumpang tindih.

Pada periode selanjutnya Tahun 2018-2019 terlihat adanya konsistensi peningkatan kinerja dilihat dari capaian IKU yang mencapai target. Laporan kinerja tahun 2019 menggambarkan kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2019 dengan capaian pada satu sasaran strategis dan dua indikator kinerja utama melampaui target sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja beserta revisinya Tahun 2019. Pencapaian kinerja rata-rata Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019 untuk dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebesar 110,80%. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja disajikan pada Tabel 1.11 berikut ini:

Tabel 1. 11 Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balitbanghub 2019

KODE IKU	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
IKU 1	Prosentase hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	%	80	81,55	101,94
IKU 2	Prosentase pemanfaatan hasil penelitian pada (t-2), t adalah tahun IKU	%	80	95,73	119,66
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi untuk mewujudkan pelayanan transportasi		%	80	88,64	110,80
Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					110,80

Faktor keberhasilan tercapainya IKU 2 antara lain:

- 1) Dilaksanakannya monitoring tindak lanjut hasil penelitian secara rutin, untuk mengetahui pemanfaatan dari rekomendasi kebijakan yang telah diserahterimakan kepada para pengguna jasa penelitian dan pengembangan.
- 2) Hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan dalam bentuk rekomendasi kebijakan berangkat dari kebutuhan pengguna/ stakeholder dan telah diserahterimakan kepada pengguna/*stakeholder*. Monitoring dilakukan terhadap penelitian yang telah ditindaklanjuti dari dua tahun sebelumnya.
- 3) Adanya transfer knowledge pada saat pelaksanaan penelitian di daerah dengan melibatkan tenaga surveyor lokal dan Pemerintah Daerah setempat.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur dan pelayanan transportasi

merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan berbagai sumber daya, termasuk hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif. Badan Litbang Perhubungan sebagai unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan tentunya memiliki potensi dan permasalahan yang harus dipetakan guna optimasi peran Badan Litbang Perhubungan ke kurun waktu 5 tahun mendatang.

1.2.1 Potensi

Penekanan pentingnya rekomendasi kebijakan transportasi berbasis pada hasil penelitian merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan pencapaian sasaran strategis dari meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan dan regulasi pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang telah menjadi salah satu pilar kebijakan Kementerian Perhubungan. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi perlu didukung oleh hasil-hasil penelitian yang prosesnya dilakukan pada tahap sebelumnya oleh para Peneliti Badan Litbang Perhubungan beserta segenap mitra strategisnya baik internal maupun eksternal. Informasi hasil penelitian yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi. Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Litbang Perhubungan dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan para Kepala Daerah yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan di daerah, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi memiliki potensi untuk dapat menjadi pusat unggulan penelitian kebijakan transportasi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien. Termasuk didalamnya adalah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran program yang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam setiap perencanaannya.

Terdapat beberapa potensi yang dapat menjadi *tools* (alat bantu) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Litbang Perhubungan Kementerian Perhubungan. Potensi tersebut mencerminkan peluang-peluang pemanfaatan hasil penelitian dan kerjasama yang dapat dilakukan untuk mendukung pemenuhan target kinerja layanan transportasi secara keseluruhan. Catatan potensi yang terdapat pada setiap unit kerja Badan Litbang Perhubungan dapat dikelompokkan sebagaimana berikut.

A. Koordinator atau pusat penelitian dan pengembangan kebijakan transportasi yang kemanfaatannya memiliki nilai strategis

Melalui posisi penugasan pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Badan Litbang Perhubungan dalam menjalankan program dan kegiatannya dapat berperan untuk memenuhi:

1. Kebutuhan organisasi Kementerian Perhubungan terhadap unit kerja yang melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang transportasi, mulai dari kerangka perencanaan hingga evaluasi atas kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan.
2. Kebutuhan terhadap kajian sebagai *base evidence* untuk mendukung rekomendasi kebijakan bidang perhubungan yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Peluang Badan Litbang Perhubungan sebagai acuan atau koordinator penyelenggaraan penelitian kebijakan transportasi sekaligus *Agent of Change* dalam formulasi kebijakan bidang perhubungan.

B. Kecukupan dukungan potensi sumber daya untuk menjalankan kegiatan penelitian yang bernilai strategis

Pada pemetaan kekuatan internal, Badan Litbang Perhubungan memiliki kecukupan dukungan potensi sumber daya baik itu berupa jumlah peneliti, fasilitas penunjang kegiatan penelitian, ataupun ketersediaan alokasi anggaran untuk menjalankan program-program dan kegiatan penelitian yang bernilai strategis.

1. Mempunyai jumlah SDM Peneliti sebanyak 56 orang terdiri dari Peneliti Utama (3 orang), Peneliti Madya (18 orang), Peneliti Muda (19 orang), dan Peneliti Pertama (16 orang) yang terdistribusi pada pusat penelitian transportasi moda jalan dan KA, pusat penelitian transportasi antar moda, pusat penelitian transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan, serta pusat penelitian transportasi moda udara.
2. Terdapat fasilitas penunjang berupa perpustakaan, jurnal ilmiah, sistem database, software perangkat lunak berlisensi untuk mendukung analisis lanjut data-data penelitian, serta peralatan-peralatan laboratorium lapangan untuk menunjang pelaksanaan survei lapangan dan beberapa instrumen pendukung operasional lainnya.
3. Memiliki kecukupan lokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja barang dan modal, tunjangan kinerja peneliti, dan dana operasional untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan, selain itu masih adanya peluang untuk mendapatkan sumber pendanaan selain APBN seperti: kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga tingkat daerah, lembaga swasta, lembaga nasional, ataupun lembaga internasional untuk melaksanakan penelitian-penelitian bernilai strategis yang melibatkan mitra terkait tersebut.

C. Kekuatan potensi jejaring kerjasama mitra untuk menghasilkan kualitas penelitian yang baik dan dapat dipercaya

Sebagai upaya revitalisasi Badan Litbang Perhubungan sebagai lembaga penyusun rekomendasi kebijakan transportasi di era Revolusi Industri 4.0, diperlukan

dukungan kerjasama dengan mitra strategis untuk menghasilkan rekomendasi berbasis hasil penelitian yang baik dan dapat dipercaya. Umpan balik dari mitra strategis selama proses penelitian, tidak hanya memperkaya metode penelitiannya saja, namun interaksi antar peneliti akan memberikan budaya positif dalam proses pengelolaan penelitian secara komprehensif.

1. Kerjasama Badan Litbang Perhubungan dengan beberapa instansi penelitian di dalam negeri maupun luar negeri ataupun dengan jejaring stakeholder terkait termasuk perguruan tinggi dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kompetensi SDM peneliti, pengembangan sarana dan prasarana penelitian, peningkatan kolaborasi manajemen pengelolaan sumber daya penelitian, serta keaktifan peneliti dalam forum kerjasama nasional dan internasional baik secara bilateral maupun multilateral.
2. Adanya dukungan dalam bentuk regulasi perundangan yakni UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional, yang menyiratkan adanya peluang untuk melakukan pengajuan akreditasi lembaga penelitian.

D. Mitra dalam pengembangan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung penyediaan layanan transportasi

Kemudahan mobilitas transportasi akan makin meningkat ketika konektivitas antara dua lokasi telah terbangun dengan baik. Konektivitas ini dapat terbangun melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology) yang dewasa ini sudah diterapkan oleh industri transportasi. Secara khusus penggunaan teknologi yang mampu menciptakan konektivitas antara kendaraan dan kondisi riil jalan (sarana dan prasarana jalan) disebut juga sistem transportasi cerdas (intelligent transportation system, ITS). Sistem transportasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi ketertiban dan kelancaran berlalulintas yang bertujuan untuk menghindari pemborosan energi di sektor transportasi. Sinergi perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi dan perencanaan sistem transportasi nasional yang tepat merupakan salah satu faktor pendukung industri dalam memenangkan kompetisi di tingkat global.

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama pada era revolusi industri 4.0, perlu diantisipasi dengan cepat dan bijaksana, sehingga Badan Litbang Perhubungan sebagai lembaga penyusun rekomendasi kebijakan transportasi dapat menjadi mitra utama dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyediaan layanan transportasi.
2. Perkembangan mendorong adanya perubahan topik riset di bidang transportasi.
3. Potensi hilirisasi hasil pengkajian aplikasi teknologi informasi dan komunikasi bidang transportasi kepada mitra strategis sektor industri.

1.2.2 Permasalahan

Badan Litbang Perhubungan senantiasa berupaya mengadakan penelitian untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat

atas kualitas transportasi ditinjau dari aspek konektivitas antar wilayah, keselamatan dan keamanan, serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini masih beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi tantangan ke depan. Permasalahan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Belum adanya legalitas kuat sebagai dasar transformasi kelembagaan

1. Legalisasi peran Badan Litbang Perhubungan dalam Roadmap dan SOP pengkajian kebijakan di bidang transportasi.
2. Kurang optimalnya pengambilan kebijakan transportasi berdasarkan pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian/pengkajian.

B. Keterbatasan sumber daya untuk menjalankan kegiatan penelitian strategis

1. Terbatasnya kuantitas dan kompetensi SDM peneliti dan operator penunjang penelitian untuk dapat mencapai tujuan sebagai pusat kajian kebijakan transportasi.
2. Belum adanya peta komposisi peneliti di Badan litbang Perhubungan sebagai bentuk tanggungjawab penelitian per bidang yang dikhususkan.
3. Kurangnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan penelitian dalam skala masif dan batasan waktu yang ditentukan.
4. Ketidakseimbangan proporsi alokasi dana penelitian dan dana manajerial sehingga perlu adanya dukungan alternatif pembiayaan penelitian dengan mitra strategis.

C. Belum optimalnya dukungan manajemen tata kelola Badan Litbang Perhubungan

1. Adanya tumpang tindih pelaksanaan penelitian dengan subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Kurangnya manajemen sistem informasi pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis bidang perhubungan.
3. Masih rendahnya publikasi dan desiminasi hasil penelitian yang menjadi tolok ukur kinerja penelitian.
4. Belum optimalnya dukungan kebijakan serta komitmen pimpinan K/L terhadap eksistensi dan peran Badan Litbang Perhubungan.

D. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan penelitian

1. Pelaksanaan penelitian kajian transportasi belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Masih rendahnya alih teknologi dari hasil penelitian.

1.3. ISU DAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Dari hasil kajian terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh, isu strategis yang akan dihadapi pada periode Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan pada uraian berikut ini.

1.3.1 Isu Strategis Kementerian Perhubungan

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Selain penekanan pada aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas transportasi secara berkelanjutan pada aspek keselamatan dan keamanan, serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Ketiga aspek diatas akan menjadi perhatian penting pada rencana kerja Kementerian Perhubungan untuk memberikan dukungan kelancaran proses distribusi orang dan barang.

Sementara itu, proses transformasi ekonomi perlu segera dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju. Dalam arahan RPJMN 2020-2024 telah tercatat tantangan yang akan dihadapi meliputi: Produktivitas Tenaga Kerja Rendah, Produktivitas Kapital Rendah (ICOR tinggi 6,7), dan *Total Factor Productivity* Rendah. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi 2020-2024 berada pada kisaran 5,2%-5,5% (rendah) hingga pada kisaran 5,4% - 6,5% (tinggi) agar dapat keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) menuju Negara Sejahtera Berpendapatan Tinggi di Tahun 2036. Target pertumbuhan 5,4% - 6,0 % memerlukan dukungan aspek transportasi baik dari sisi permintaan ataupun sisi produksi.

Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada, diantaranya yaitu :

1. Konektivitas
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan;
 - b. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;
 - c. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai;
 - d. Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum terhubung dengan jalur darat baik jalan ataupun kereta api;
 - e. Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan layanan transportasi pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK)
2. Kinerja Pelayanan
 - a. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi *online*;

- b. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pepadu yang diharapkan melalui subsektor, dimana standar pelayanan maksimal dirasakan masih perlu ditingkatkan;
 - c. Belum optimalnya peran angkutan laut, yakni karena adanya ketimpangan muatan dari kawasan barat dan kawasan timur;
 - d. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda jalan;
 - e. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi;
 - f. Adanya keterbatasan infrastruktur bandar udara terutama dalam menyediakan *slot time* yang mengakibatkan sulitnya melakukan penambahan kapasitas angkutan udara;
 - g. Sebagian bandar udara mengalami *overcapacity* sementara upaya pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan dalam satu tahun anggaran;
3. Keselamatan dan Keamanan
- a. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - b. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi;
 - d. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dukungan Kebutuhan Percepatan Pariwisata
- a. Kemudahan akses dari simpul utama terdekat menuju sepuluh destinasi baru tujuan wisata;
 - b. Penyediaan layanan moda transportasi hingga ke pusat tujuan wisata prioritas untuk mengakomodasi 400 juta perjalanan wisatawan nusantara dan 22,3 juta wisatawan mancanegara;
 - c. Kurangnya tenaga profesional operator transportasi yang dapat memenuhi standar SDM untuk mendukung layanan bagi wisatawan mancanegara.
5. Dukungan Kebutuhan Percepatan Logistik
- a. Masih tingginya biaya logistik terhadap PDB dan masih rendahnya skor Logistic Performance Index (LPI);
 - b. Permasalahan kelembagaan pada operator transportasi multimoda;
 - c. Tenaga profesional operator transportasi multimoda yang belum memenuhi standar kompetensi SDM untuk mendukung layanan logistik nasional.
6. Perkembangan Teknologi dan Kebutuhan SDM
- a. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi;

- b. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta penggunaan aspek pengaruh teknologi informasi secara optimal;
 - c. Kurangnya Peneliti adalah modal utama yang cukup menentukan kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan transportasi;
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan;
 - e. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.
7. **Pemindahan Ibu Kota Negara**
- Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa dirasakan perlu disebabkan serangkaian permasalahan yang terjadi. Beberapa permasalahannya adalah sekitar 57 % penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu adanya pendistribusian penduduk ke daerah yang masih memiliki jumlah penduduk yang rendah, kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional yang belum merata dimana saat ini 58,49 % dari PDB Nasional dikontribusikan oleh Pulau Jawa, mulai terjadinya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dimana konsentrasi terbesar terdapat di Jakarta dan bodetabekpunjur, serta meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi yang dihadapi. Untuk mendukung suksesnya proses transformasi pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan perlu adanya perencanaan Hub Transportasi Antarmoda dan mendorong adopsi investasi penyediaan moda transportasi ramah lingkungan.

1.3.2 Isu Strategis Badan Litbang Perhubungan

Berbagai isu dalam menghadapi megatrend dunia pada Tahun 2045 menjadi salah satu aspek dalam mengkaji isu strategis pengembangan Badan Litbang Perhubungan 2020-2024. Selain terkait dengan demografi, geopolitik, ekonomi, serta persaingan sumber daya alam, isu teknologi dan perubahan iklim harus menjadi perhatian khusus di sektor transportasi. Kedepan, tren perubahan teknologi akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang akan membawa perubahan signifikan pada penyediaan moda transportasi, inovasi layanan jasa transportasi, serta perilaku dalam bertransportasi. Selain itu, tantangan pemanasan global akan semakin besar dengan terjadinya kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang yang diindikasikan adanya peningkatan suhu global sebesar 3-3,5% apabila tidak diimbangi dengan adanya usaha menurunkan emisi. Dari hasil telaahan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh, isu strategis yang akan dihadapi Badan Litbang Perhubungan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dapat dikompilasikan pada kelompok isu sebagai berikut.

A. Kebutuhan Penguatan Peran Badan Litbang Perhubungan

Badan Litbang Perhubungan sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan kegiatan penelitian di bidang transportasi senantiasa dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan mengembangkan langkah-langkah strategis dan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adanya perubahan dan perkembangan lingkungan baik pada skala dalam negeri, global yang dinamis maupun tuntutan Reformasi Birokrasi harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan penguatan peran ke depan.

Pada **Aspek Kelembagaan**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
2. Transformasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program reformasi birokrasi mengarah pada Badan Kebijakan Transportasi (BKT);
3. Penyiapan kelembagaan kelitbangan di era digitalisasi sebagai bagian dari era revolusi industri 4.0;
4. Peningkatan peran dan kerjasama dengan lembaga penelitian non pemerintah baik skala nasional ataupun global dalam bidang transportasi.

Pada **Aspek Regulasi dan Kebijakan**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Perlunya penguatan struktur dan relevansi regulasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
2. Kebutuhan terhadap standarisasi teknis terhadap pengaplikasian teknologi terbaru di bidang transportasi;
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terbaru di bidang transportasi yang perlu diantisipasi;
4. Belum adanya konvergensi kebijakan antar K/L dan stakeholder terhadap pelaksanaan penelitian nasional;
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi serta efektifitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan hasil penelitian transportasi.

B. Tuntutan Penguatan Sumber Daya Internal

Pada **Aspek Sumber Daya Manusia**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Masih belum terpenuhinya kebutuhan baik kuantitas ataupun kualitas SDM aparatur di lingkungan Badan Litbang Perhubungan;
2. Perlunya pemetaan komposisi peneliti di Badan litbang Perhubungan sebagai bentuk tanggungjawab penelitian per bidang yang dikhususkan untuk mendukung kualitas hasil rekomendasi kebijakan transportasi;
3. Belum optimalnya sistem diklat dan sertifikasi SDM Penelitian yang dapat memperkuat kompetensi keahlian bidang penelitian;
4. Penguasaan SDM terhadap teknologi terkini di era revolusi industri 4.0.

Pada **Aspek Pendanaan**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Porsi alokasi APBN Badan Litbang Perhubungan yang masih kecil (termasuk untuk membiayai penelitian berbagai usulan Daerah);
2. Skema pendanaan penelitian masih terbatas, sementara sesuai RPJMN/RIPNas sumber pembiayaan diharapkan lebih kreatif/*creatif financing* melalui pembiayaan alternatif penelitian dengan mitra strategis.

Pada **Aspek Sarana dan Prasarana**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan dan penunjang penelitian dalam skala masif dan batasan waktu yang ditentukan;
2. Semakin mendesaknya pengembangan dan tuntutan terhadap rekomendasi kebijakan hasil penelitian yang dapat diaplikasikan baik jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang;
3. Belum sepenuhnya hasil penelitian dipublikasikan sebagai bagian dari penilaian kinerja;
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong adanya perubahan topik riset di bidang transportasi, sehingga perlu antisipasi terhadap penerapan teknologi transportasi terbaru;
5. Perlu adanya penguasaan pembaruan teknologi bidang transportasi untuk mengikuti perkembangan dan permintaan;
6. Kebutuhan pengaplikasian sistem informasi dalam penyusunan database hasil-hasil penelitian transportasi.

C. Peningkatan Dukungan Manajemen Tata Kelola Badan Litbang

Pada **Manajemen Implementasi**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Penyelesaian permasalahan kelembagaan dan organisasi sesuai arahan rencana penguatan kelembagaan dan organisasi Badan Litbang Perhubungan;
2. Peningkatan koordinasi antar institusi dalam penyelenggaraan penelitian untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan penelitian dengan subsektor atau para pihak terkait lainnya;
3. Sinkronisasi perencanaan penelitian antar K/L dengan mitra Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian;
4. Sosialisasi secara intens terkait dengan pemanfaatan hasil penelitian.

Pada **Tata Kelola Kinerja Pelayanan**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Optimalisasi utilisasi hasil penelitian baik publikasi ataupun desiminasi yang menjadi tolok ukur kinerja penelitian;
2. Penyediaan manajemen sistem informasi pemanfaatan hasil penelitian;
3. Peningkatan kinerja pelayanan berupa peningkatan kualitas hasil penelitian dan pemanfaatannya;
4. Optimasi pemanfaatan hasil penelitian untuk rekomendasi kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis bidang perhubungan.

Identifikasi lingkungan strategis penyusunan Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 didasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Fokus Riset Transportasi pada Prioritas Riset Nasional tahun 2017-2045, Penugasan dari Naskah RPJMN 2020-2024, serta Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Dari berbagai referensi tersebut, didapatkan beberapa perkembangan ancaman lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tahun 2020-2024 sebagai berikut.

No	Faktor	Identifikasi Ancaman Lingkungan Strategis
1	Sosial - Ekonomi	• Masih kurangnya data hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan atau diakses luas oleh masyarakat. • Masih kurangnya informasi Pemerintah terkait dengan hasil penelitian strategis bidang transportasi. • Peran lembaga penelitian dalam mengantisipasi globalisasi ekonomi dunia dan mendukung daya saing ekonomi nasional.
2	Lingkungan Global	• Isu perubahan iklim dan kerawanan bencana alam yang mempengaruhi layanan transportasi. • Permasalahan penghematan energi dan pengurangan emisi dari sektor transportasi. • Pertimbangan dampak lingkungan yang sering menghambat upaya pengembangan jaringan layanan transportasi.
3	Politik- Legal	• Tuntutan daerah atau publik bagi perluasan jaringan transportasi pada kawasan strategis nasional. • Transformasi regulasi di Badan Litbang Perhubungan menuju sistem yang modern, bermanfaat dan terbuka. • Dukungan regulasi dan peraturan terkait dalam penguatan fungsi dan peran Badan Litbang.
4	Etika- Akuntabilitas	• Peningkatan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan penelitian dan penyediaan data transportasi hasil pengkajian. • Responsivitas terhadap isu transportasi yang memerlukan peran Badan Litbang.

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjabarkan berbagai strategi untuk mencapai fokus peningkatan konektivitas, pelayanan transportasi serta keselamatan dan keamanan transportasi disamping agenda prioritas berupa dukungan pengembangan destinasi pariwisata, penguatan rantai dan kinerja logistik, penguatan SDM, peningkatan fasilitas transportasi pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK), serta rencana pemindahan Ibukota Negara baru. Tentunya berbagai isu strategis muncul sebagai dinamika dalam pencapaian tujuan tersebut, sehingga Badan Litbang Perhubungan bertugas untuk memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Litbang Perhubungan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka semua satuan kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, pimpinan dan staf harus melaksanakan program yang telah ditetapkan tersebut secara profesional, akuntabel, integritas, dan inovatif serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja (*performance improvement*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya maka akan dilakukan evaluasi terhadap capaian target dan pelaksanaan anggaran dalam Renstra setiap tahunnya dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis internal mencakup: kebutuhan penguatan peran Badan Litbang Perhubungan, tuntutan penguatan sumber daya internal, dan peningkatan dukungan manajemen tata kelola Badan Litbang Perhubungan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2020-2024 ditetapkan dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan sebagai penjabaran lanjut untuk mewujudkan tema dan agenda pembangunan nasional pada tahun 2020-2024.

2.1. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 – 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya Saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai Tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Kata kunci dalam Arahkan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020-2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, sudah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator output sebagai fokus utama Kementerian Perhubungan. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

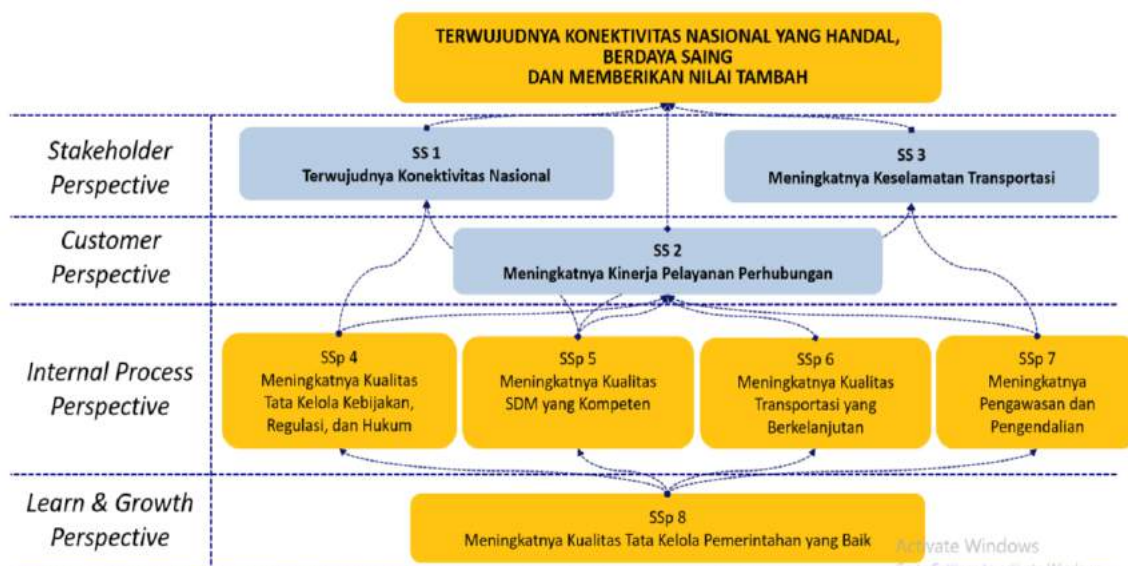
1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. Capaian *On Time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020 – 2024.

Pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 telah dicantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah: a). Konektivitas Poros Maritim; b). Konektivitas Multimoda; c). Keselamatan Transportasi; dan d). Transportasi Perkotaan. Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Peningkatan aksesabilitas antarwilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- b. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- c. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- d. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2. 1 Peta Strategis Kementerian Perhubungan

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

b. SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Untuk mewujudkan tujuan:

- (1) Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian *on time performance* dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
- (2) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;
- (3) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

c. SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Stakeholders Perspective

Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional

Dan mencakup SS-3 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan

b. Customer Perspective

Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
- IKSS 2.2 *On Time Performance* Layanan Transportasi

c. Internal Process Perspective

(1) Mencakup SSp-4 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

(2) Mencakup SSp-5 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten

(3) Mencakup SSp-6 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 6 Presentase penurunan emisi GRK sektor transportasi

(4) Mencakup SSp-7 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 7 Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”.

(5) Mencakup SSp-8 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 8 Indeks RB Kementerian Perhubungan

2.3. VISI DAN MISI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2020-2024 ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2020-2024. Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Badan Litbang Perhubungan sebagai berikut:

“Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Penjabaran Visi Badan Litbang Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Pusat unggulan riset kebijakan menekankan terwujudnya posisi sebagai acuan utama penyelenggaraan penelitian kebijakan bidang perhubungan.

Berkualitas berarti tersedianya hasil penelitian yang memiliki kualitas terbaik sehingga dapat dimanfaatkan baik sebagai dukungan dalam pengambilan keputusan bagi Pimpinan Kementerian ataupun sebagai dasar penetapan kebijakan melalui regulasi/ peraturan perundangan.

Antisipatif berarti tersedianya rekomendasi kebijakan bidang perhubungan untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal pada kurun waktu Renstra.

Responsif berarti tersedianya rekomendasi kebijakan isu strategis untuk merespon cepat dinamika pembangunan perhubungan yang bersifat holistik-integratif (*cross-cutting issues*).

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Penyelenggaraan serangkaian proses penelitian kebijakan bidang perhubungan yang berkualitas, antisipatif, dan responsif merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan yang kemanfaatannya memiliki nilai strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif, ditetapkan Misi Badan Litbang Perhubungan, sebagai berikut:

1. Menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang kemanfaatannya memiliki nilai yang strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi dengan para pihak terkait sebagai mitra kerja strategis;
3. Membangun sistem manajemen penelitian di bidang transportasi melalui peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan efisien;
4. Penguatan sarana, prasarana, SDM, pendanaan, database penelitian dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran yang suportif serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal.

2.4. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Badan Litbang Perhubungan yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran Program Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari Misi Badan Litbang Perhubungan dengan memperhatikan Visi. Untuk mewujudkan Misi Badan Litbang Perhubungan, maka **Tujuan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024** adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya dukungan Badan Litbang Perhubungan dalam pemberian rekomendasi kebijakan strategis perhubungan.
2. Terwujudnya dukungan tata kelola Badan Litbang Perhubungan untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik.

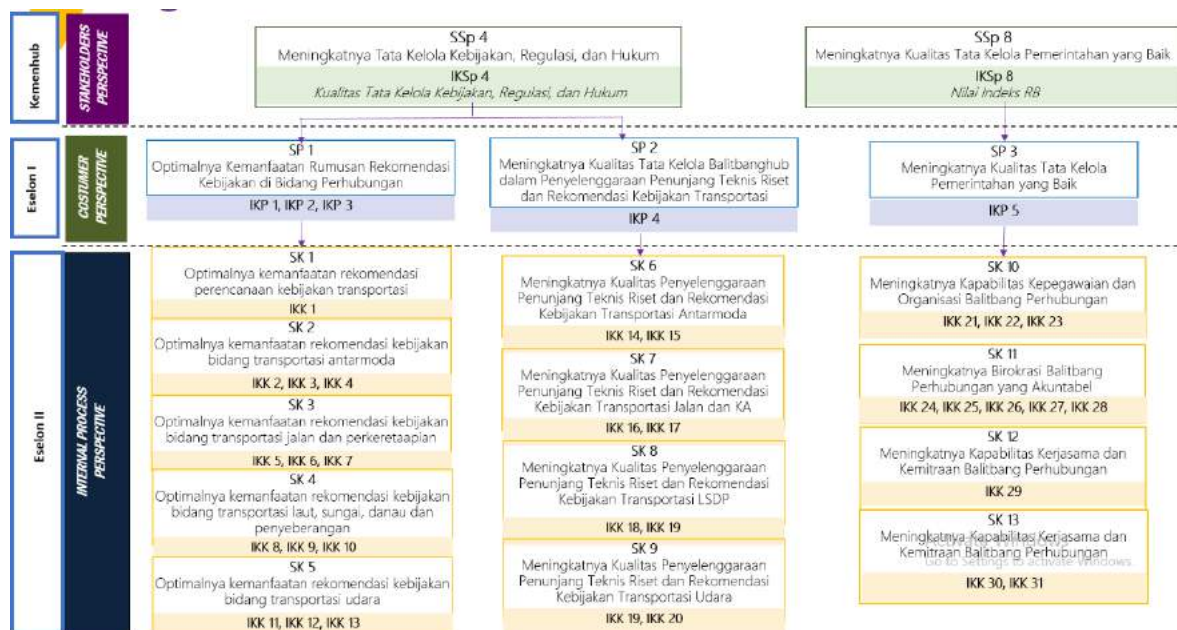
Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator output Badan Litbang Perhubungan. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya prosentase tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan termasuk isu strategis di bidang perhubungan menjadi 90% pada tahun 2024;
2. Meningkatnya prosentase tingkat ketersediaan dukungan tata kelola Badan Litbang Perhubungan melalui penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi menjadi 90% pada tahun 2024.

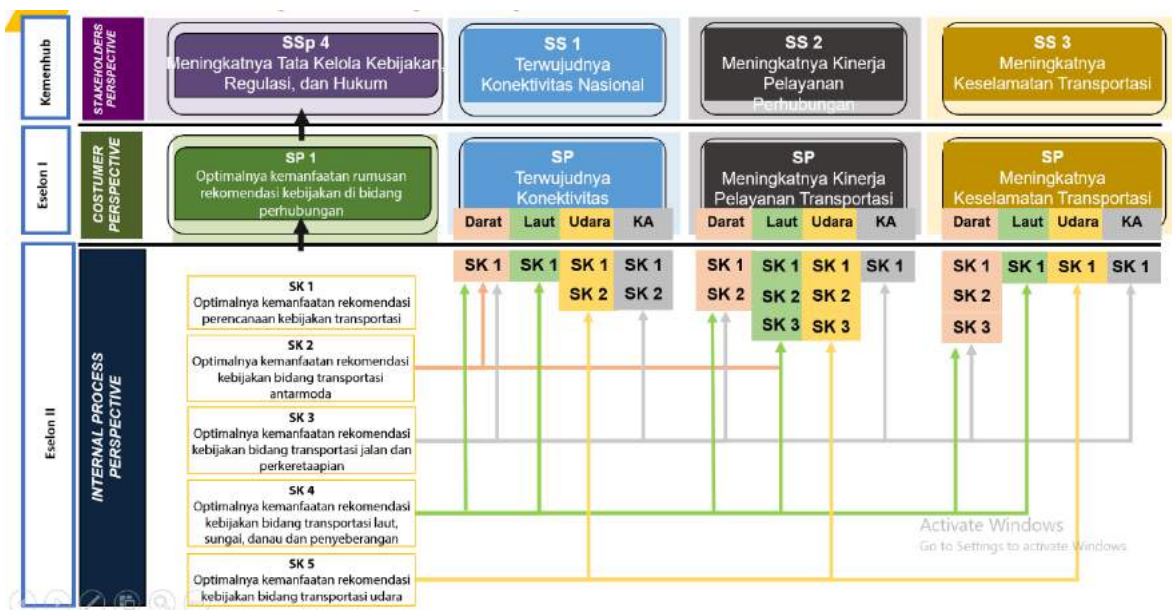
Sasaran Program Badan Litbang Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Meski demikian, sesuai dengan Misi pertama dari Badan Litbang Perhubungan terkait dengan pelaksanaan penelitian, *output* kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Badan Litbang Perhubungan dapat dikembangkan menjadi *initial* atau *intermediate outcome* berupa rekomendasi kebijakan. Bentuk rekomendasi

kebijakan disesuaikan dengan tema penelitian dan kelompok sasaran yang tepat. *Initial* atau *intermediate outcome* digunakan sebagai salah satu Indikator Kinerja Program.

Dalam penyusunannya, Sasaran Program ini dirumuskan dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, Visi, Misi, dan Tujuan Badan Litbang Perhubungan serta memperhatikan permasalahan dan rencana capaian pada tahun 2020-2024. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) dan *cascading* yang menyelaraskan hubungan antara target kinerja Kementerian Perhubungan dengan Eselon 1 Unit Badan Litbang Perhubungan beserta unit-unit organisasi di dalamnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi memiliki potensi untuk dapat menjadi pusat unggulan penelitian kebijakan transportasi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien. Termasuk didalamnya adalah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran program yang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam setiap perencanaannya. Permasalahan yang dihadapi selama ini dengan adanya tumpang tindih pelaksanaan penelitian dengan subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan Peningkatan dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi antar institusi dalam penyelenggaraan penelitian. Atmosfir transformasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program reformasi birokrasi yang mengarah pada Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan dampak positif dengan konsep mirroring dimana informasi hasil penelitian yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi. Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Litbang Perhubungan dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan para Kepala Daerah yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan di daerah, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan. Selengkapnya, Peta Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan Cascading Lintas Unit Eselon 1 sebagai Proses Mirroring dengan Sub Sektor Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 berikut.



Gambar 2. 2 Peta Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan



Gambar 2. 3 Cascading Lintas Unit Eselon 1 sebagai Proses Mirroring dengan Sub Sektor Kementerian Perhubungan

Adapun Sasaran Program Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sasaran Program Pertama (SP.1) yang akan dicapai adalah optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1) IKP 1 : Initial Outcome

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Intermediate Outcome

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)

2) IKP 2 : Initial Outcome

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di bidang Perhubungan.

Intermediate Outcome

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di bidang Perhubungan

3) IKP 3 : Initial Outcome

Tingkat Kemanfaatan kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusiannya.

Intermediate Outcome

Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusiannya pada (t-2)

- b. Sasaran Program Kedua (SP.2) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola Balitbanghub dalam penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

IKP 4 : Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi

- c. Sasaran Program Ketiga (SP.3) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dengan Indikator Kinerja Program yaitu sebagai berikut:

IKP 5 : Indeks RB Kementerian Perhubungan

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit eselon II, Sasaran Program Pertama (SP.1) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) yaitu:

- a. Sasaran Kegiatan Pertama (SK.1) yang akan dicapai adalah optimalnya kemanfaatan rekomendasi perencanaan kebijakan transportasi, yang diampu oleh

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

IKK 1a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi perencanaan kebijakan

IKK 1.b: Tingkat kemanfaatan rekomendasi perencanaan kebijakan pada t-2

- b. Sasaran Kegiatan Kedua (SK.2) yang akan dicapai adalah optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi antarmoda, yang diampu oleh Pusat Litbang Transportasi Antarmoda, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) IKK 2a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi antarmoda

IKK 2b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi antarmoda pada t-2

- 2) IKK 3a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi antarmoda

IKK 3b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi antarmoda

- 3) IKK 4a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya di bidang transportasi antarmoda

IKK 4b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya di bidang transportasi antarmoda pada t-2

- c. Sasaran Kegiatan Ketiga (SK.3) yang akan dicapai adalah optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi Jalan dan Perkeretaapian, yang diampu oleh Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) IKK 5a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian

IKK 5b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian pada t-2

- 2) IKK 6a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian

IKK 6b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian

- 3) IKK 7a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan

dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian

IKK 7b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian pada t-2

d. Sasaran Kegiatan Keempat (SK.4) yang akan dicapai adalah optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, yang diampu oleh Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) IKK 8a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan

IKK 8b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan pada t-2

2) IKK 9a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan

IKK 9b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan

3) IKK 10a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan

4) IKK 10b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan pada t-2

e. Sasaran Kegiatan Kelima (SK.5) yang akan dicapai adalah optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi udara yang diampu oleh Pusat Litbang Transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) IKK 11a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi udara

IKK 11b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi udara pada t-2

2) IKK 11a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi udara

- IKK 11b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi udara
- 3) IKK 12a : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya di bidang transportasi udara
- 4) IKK 12b : Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya di bidang transportasi udara pada t-2

Sebagai suatu kesatuan organisasi, tentunya kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan memerlukan dukungan manajerial yang andal. Sasaran program dukungan manajerial dideskripsikan ke dalam 2 (dua) sasaran program.

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit eselon II, Sasaran Program Kedua (SP.2) diampu oleh Pusat Litbang Transportasi. Sasaran Program Kedua (SP.2) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) yaitu:

- a. Sasaran Kegiatan Keenam (SK.6) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi antarmoda, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

IKK 14 : Indeks penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi antarmoda.

IKK.15 : Tingkat Maturitas SPIP

- b. Sasaran Kegiatan Ketujuh (SK.7) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi Jalan dan KA, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

IKK 16 : Indeks penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi jalan dan KA.

IKK.17 : Tingkat Maturitas SPIP

- c. Sasaran Kegiatan Kedelapan (SK.8) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi LSDP, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

IKK 18 : Indeks penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi LSDP.

IKK.19 : Tingkat Maturitas SPIP

- d. Sasaran Kegiatan Kesembilan (SK.9) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi Udara, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

IKK 20 : Indeks penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi Udara.

IKK.21 : Tingkat Maturitas SPIP

Selanjutnya, Sasaran Program Ketiga (SP.3) diampu oleh Sekretariat Badan Litbang. Sasaran Program Ketiga (SP.3) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) yaitu:

- a. Sasaran Kegiatan Sepuluh (SK.10) yang akan dicapai adalah: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - 1) IKK 22 : Indeks kelembagaan Badan Litbang Perhubungan;
 - 2) IKK 23 : Indeks profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan;
 - 3) IKK 24 : Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan.
- b. Sasaran Kegiatan Sebelas (SK.11) yang akan dicapai adalah: Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan yang Akuntabel, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - 4) IKK 25 : Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan;
 - 5) IKK 26 : Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang Perhubungan;
 - 6) IKK 27 : Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan;
 - 7) IKK 28 : Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Badan Litbang Perhubungan;
 - 8) IKK 29 : Indeks Maturitas SPIP
- c. Sasaran Kegiatan Dua Belas (SK.12) yang akan dicapai adalah: Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - 9) IKK 30 : Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan;
- d. Sasaran Kegiatan Tiga Belas (SK.13) yang akan dicapai adalah: Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - 10) IKK 31 : Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data;
 - 11) IKK 32 : Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi.

Sasaran strategis yang diuraikan menjadi sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut disusun untuk mencapai tujuan Badan Litbang Perhubungan yaitu terwujudnya dukungan Balitbang Perhubungan dalam Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis Perhubungan. Korelasi antara tujuan, sasaran program, indikator kinerja program serta meta indikator dan metode perhitungan indikator kinerja dapat diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja Program Badan Litbang Perhubungan 2020-2024

TUJUAN	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		META INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
Terwujudnya dukungan Balitbanghub dalam pemberian rekomendasi kebijakan strategis perhubungan	SP1	Optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis riset di bidang perhubungan	IKP 1	a. INITIAL OUTCOME		
				Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	Jumlah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders x 100% Jumlah rekomendasi kebijakan tema Kebijakan sesuai Fokus dan Agenda Prioritas Kementerian yang diajukan
				b. INTERMEDIATE OUTCOME		
				Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2) yang dimanfaatkan oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dimanfaatkan Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders x 100% Jumlah Rekomendasi Kebijakan sesuai Fokus dan Agenda Prioritas Kementerian yang diajukan pada (t-2)
			IKP 2	a. INITIAL OUTCOME		
				Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	Prosentase Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders	Jumlah rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian Kebijakan Isu Strategis yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders x 100% Jumlah hasil rekomendasi kebijakan Isu Strategis
				b. INTERMEDIATE OUTCOME		
				Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	Prosentase Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan yang dimanfaatkan oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis yang dimanfaatkan oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders x 100% Jumlah Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja Program Badan Litbang Perhubungan 2020-2024

TUJUAN	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
			IKP 3	a. INITIAL OUTCOME	
				Tingkat kemanfaatan kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	Prosentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan sub sektor Jumlah rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor $\frac{\text{Jumlah hasil penelitian tema kajian evaluasi implementasi yang diajukan}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor}} \times 100\%$
				b. INTERMEDIATE OUTCOME	
				Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	Prosentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan sub sektor pada (t-2) Jumlah rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan dan sub sektor $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi yang diajukan pada t-2}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan dan sub sektor}} \times 100\%$

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja Program Badan Litbang Perhubungan 2020-2024

TUJUAN	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		META INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
Terwujudnya dukungan tata kelola Balitbanghub untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik	SP 2	Meningkatnya kualitas tata kelola Balitbanghub dalam penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	IKP 4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	Prosentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi untuk peningkatan kualitas penelitian	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi yang terselenggara}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi}} \times 100\%$
	SP 3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan berdasarkan Penilaian Kemenpan RB	Penilaian Kemenpan RB

Hubungan antara Sasaran Strategis (SSp), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) adalah berupa garis koordinasi dan dukungan dalam bentuk vertikal dimana SK mendukung tercapainya SP, kemudian SP menentukan tercapainya target SSp. Program pada Eselon I Badan Litbang Perhubungan akan mendukung tercapainya *outcome* pada Sasaran Strategis di tingkat Kementerian Perhubungan, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp 4) serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (SSp 8). Sedangkan Sasaran Strategis tersebut akan mendukung tercapainya sasaran utama strategis Kementerian Perhubungan yaitu Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS 1), Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS 2), dan Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3). Dengan demikian program-program dan kegiatan-kegiatan dari Eselon I dan Eselon II Badan Litbang Perhubungan selain untuk mendukung SSp4 dan SSp 8, juga direncanakan untuk mendukung SS1, SS2, dan SS3.

2.5 RESTRUKTURISASI PROGRAM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Sesuai dengan tupoksi, maka program untuk tingkat Eselon I Badan Litbang Perhubungan periode 2020-2024 adalah **“Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Inovasi”**. Dalam hal ini program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut untuk pencapaian sasaran program yang akan sangat tergantung dari kinerja program/kegiatan yang mendukung IKP Badan Litbang Perhubungan, yaitu IKK pada tingkat Eselon II sebagai indikator keluaran (*output*) yang merupakan target capaian dari masing-masing kegiatan unit Eselon II.

Pada restrukturisasi program dan kegiatan Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2024 tidak dikelompokkan berdasarkan kegiatan per-unit kerja tetapi dibagi dalam 2 kelompok kegiatan besar, yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Kegiatan Dukungan Manajemen Litbang Kementerian Perhubungan. Adapun pemetaan struktur program dan kegiatan Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Pemetaan Program dan Kegiatan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024

PROGRAM	KEGIATAN
Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi	Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi
Program Dukungan Manajemen	1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan 2. Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Riset Kebijakan; 3. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan; 4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan.

Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi diklasifikasikan ke dalam Kegiatan Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, dengan Rincian Output (RO) sebagai berikut.

Program: Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	RO
Kegiatan: Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Kajian Keselamatan dan Keamanan
KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Kajian Konektivitas dan Aksesabilitas
	Kajian Kinerja Pelayanan Transportasi
	Kajian Pengembangan Transportasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
	Kajian Pengembangan Transportasi di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan (3TP)
	Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Pendukung Logistik
	Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi
	Kajian Kebijakan Isu Strategis Bidang Transportasi
	Kajian Sistem Transportasi Ibukota Negara
	Layanan Penunjang Teknis Riset Kebijakan Transportasi Antarmoda
	Layanan Penunjang Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
	Layanan Penunjang Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan
	Layanan Penunjang Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Udara

Gambar 2. 4 Rincian Output (RO) Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi

Program Dukungan Manajemen diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) KRO dan 13 (tiga belas) RO yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 3 KRO dan RO Program Dukungan Manajemen

NAMA KEGIATAN	NAMA KRO	RO
Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan administrasi dan pengembangan SDM
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Kebijakan Tata Kelola Internal
Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset Kebijakan	Layanan Perkantoran	Administrasi Perkantoran Kesekretariatan
		Administrasi Perkantoran Transportasi Antarmoda
		Administrasi Perkantoran Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
		Administrasi Perkantoran Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		Administrasi Perkantoran Transportasi Udara
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan Administrasi Rencana, Program dan Evaluasi Riset Kebijakan
Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan	Layanan Sarana Internal	Layanan Administrasi, Keuangan, Barang Milik Negara, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan Riset Kebijakan
		Administrasi Sarana Internal
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan	Kerjasama sama	Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu-Isu Strategis
		Layanan Pengelolaan Data dan Informasi
	Layanan Data dan Informasi	Layanan Publikasi, Kepustakaan dan Kehumasan

Setiap kegiatan yang diuraikan dalam KRO dan RO memiliki korelasi dengan sasaran program Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024. Sasaran program pertama yaitu optimalnya kemanfaatan rumusan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan dan sasaran program kedua yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Balitbanghub dalam penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi diuraikan menjadi kegiatan yang terklasifikasi dalam KRO Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana. Adapun sasaran program ketiga meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik diuraikan kedalam program dukungan manajemen. Rincian korelasi antara sasaran program dan restrukturisasi program Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Korelasi Sasaran Program Pertama dengan Restrukturisasi Program

Sasaran Program	Program	Kegiatan	KRO	RO
Optimalnya Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Kajian Keselamatan dan Keamanan
				Kajian Konektivitas dan Aksesibilitas
				Kajian Kinerja Pelayanan Transportasi
				Kajian Pengembangan Transportasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
				Kajian Pengembangan Transportasi di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan (3TP)
				Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Pendukung Logistik
				Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi
				Kajian Kebijakan Isu Strategis Bidang Transportasi
				Kajian Sistem Transportasi Ibukota Negara

Tabel 2.5 Korelasi Sasaran Program Kedua dengan Restrukturisasi Program

Sasaran Program	Program	Kegiatan	KRO	RO
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Layanan Penunjang Teknis Riset Kebijakan Transportasi Antarmoda
				Layanan Penunjang Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
				Layanan Penunjang Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan
				Layanan Penunjang Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Udara

Tabel 2.6 Korelasi Sasaran Program Ketiga dengan Restrukturisasi Program

Sasaran Program	Program	Kegiatan	KRO	RO
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dukungan Manajemen	Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan administrasi dan pengembangan SDM
			Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Kebijakan Tata Kelola Internal
		Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset Kebijakan	Layanan Perkantoran	Administrasi Perkantoran Kesekretariatan
				Administrasi Perkantoran Transportasi Antarmoda
				Administrasi Perkantoran Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
				Administrasi Perkantoran Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan
				Administrasi Perkantoran Transportasi Udara
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan Administrasi Rencana, Program dan Evaluasi Riset Kebijakan
				Layanan Administrasi, Keuangan, Barang Milik Negara, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan Riset Kebijakan
			Layanan Sarana Internal	Administrasi Sarana Internal
		Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan	Kerja sama	Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu-Isu Strategis
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan	Layanan Data dan Informasi	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi
				Layanan Publikasi, Kepustakaan dan Kehumasan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sejalan dengan visi pembangunan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”, maka pembangunan nasional 2020-2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek transportasi dalam upaya membangun infrastruktur ekonomi.

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 terdapat tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pembangunan transportasi, yaitu:

Isu Strategis 1: Penguatan Konektivitas Nasional

Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah:

1. Menyediakan layanan transportasi melalui skema perintis/PSO yang menghubungkan antara simpul dengan lokus KSN (KEK, KI, KSPN, DTPK) terdekat, dimana Keterhubungan antara simpul transportasi dengan lokus KSN akan meningkatkan nilai konektivitas, aksesibilitas dan integrasi antar moda;
2. Menyediakan layanan angkutan barang melalui skema perintis/PSO yang melayani terminal-terminal barang yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi;
4. Mempercepat regulasi yang mendukung terwujudnya penguatan dan peningkatan aksesibilitas jaringan layanan multimoda terhadap simpul utama dan KSN.

Isu Strategis 2: Peningkatan Kinerja Layanan Perhubungan

Arah kebijakan dan strategi yang disusun dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan peningkatan layanan transportasi adalah:

1. Menyiapkan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan;
2. Menyusun instrumen dan pelaksanaannya untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi;

3. Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi;
4. Melaksanakan analisis desain untuk sarana dan prasarana transportasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan;
5. Melakukan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi

Isu Strategis 3: Kebijakan Keselamatan Transportasi

Arah kebijakan dan strategi yang disusun dalam lima tahun kedepan untuk mewujudkan peningkatan layanan transportasi adalah:

1. Peningkatan monitoring dan audit keselamatan secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi
2. Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta travel data recording
3. Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan dalam upaya peningkatan keselamatan transportasi
4. Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam keselamatan bertransportasi melalui program pelatihan, pembentukan, penjenjangan, dan pelatihan teknis untuk regulator dan operator

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Dalam Renstra 2020-2024 sangat diharapkan Badan Litbang Perhubungan dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat luas dan menjadi bahan masukan/rekomendasi penyusunan program/kegiatan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan kebijakan sektor transportasi secara luas.

Mengantisipasi perubahan kebijakan nasional transportasi dan program/proyek strategis dalam Renstra Kemenhub 2020-2024 serta melihat kemungkinan implementasi skala penuh atau skala parsial dari beberapa Rencana Induk, Tatanan Nasional, dan Cetak Biru, penelitian transportasi diarahkan kepada dukungan penuh substansi, argumentasi akademik, pedoman teknis (*best practice*), dan dukungan kerangka legal dan kelembagaan terhadap percepatan pembangunan dan reformasi kelembagaan ekonomi transportasi.

Faktor-faktor strategis yang harus dipertimbangkan dalam merancang penelitian transportasi mencakup antara lain kecenderungan perekonomian global, regional, dan nasional serta perekonomian lokal, perkembangan terbaru teknologi transportasi, kondisi demografi, kewilayahan dan kelautan, dan keperintisan. Faktor strategis lainnya termasuk bentuk kelembagaan ekonomi transportasi masa depan, kualitas sumberdaya manusia, dan kolaborasi penelitian lintas subsektor dan lintas sektor.

Guna mencapai sasaran meningkatnya kualitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, arah kebijakan dan strategis untuk Badan Litbang Perhubungan terbagi menjadi:

1. Peningkatan pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan di bidang transportasi;
2. Peningkatan pemanfaatan rekomendasi hasil pemilihan teknologi terapan di bidang transportasi;
3. Penguatan database hasil pengkajian dan pemanfaatan TIK;
4. Peningkatan koordinasi rekomendasi kebijakan;
5. Peningkatan sumber daya penelitian kebijakan.

3.2.1 Peran Badan Litbang Perhubungan

Berangkat dari Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Badan Litbang Perhubungan selanjutnya ditetapkan peran dan fokus kegiatan Badan Litbang Perhubungan ke depan untuk kurun waktu 2020-2024. Adapun peran Badan Litbang Perhubungan ke depannya diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi dan tugas Badan Litbang Perhubungan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan transportasi. Sedangkan fokus kegiatan Badan Litbang Perhubungan meliputi penjabaran peran Badan Litbang Perhubungan terkait dengan fungsi pelayanan Badan Litbang Perhubungan.

Peran Badan Litbang Perhubungan untuk kurun lima tahun kedepan diharapkan dapat dioptimalkan dan diarahkan sebagai:

- a. Lembaga yang memberikan rekomendasi rancangan kebijakan dan rekomendasi pemanfaatan hasil pemilihan teknologi di bidang transportasi;
- b. Lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pemanfaatan hasil pemilihan teknologi di bidang transportasi;
- c. Lembaga yang melaksanakan evaluasi kebijakan di bidang transportasi ;
- d. Lembaga yang menyediakan data hasil kajian kebijakan dan pengembangan teknologi di bidang transportasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi 4 (empat) fokus pelayanan dan pengembangan Badan Litbang Perhubungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Memberikan Rekomendasi Rancangan Kebijakan dan Rekomendasi Pemanfaatan Hasil Pemilihan Teknologi di Bidang Transportasi;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pemanfaatan hasil pemilihan teknologi di bidang transportasi;
- c. Melaksanakan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
- d. Menyediakan data hasil kajian kebijakan dan pemilihan teknologi di bidang transportasi.

3.2.2 Fokus Kegiatan Badan Litbang Perhubungan

Sementara itu dalam menentukan fokus penelitian pada Badan Litbang Perhubungan, dilakukan serangkaian proses telaahan sebagai berikut.

1. Identifikasi Isu Strategis Pelaksanaan Penelitian Perhubungan

Pelaksanaan penelitian perhubungan yang telah berlangsung mengindikasikan adanya berbagai persoalan maupun kondisi yang dapat menurunkan kinerja perkembangan penelitian. Oleh karena itu diperlukan Identifikasi isu strategis dalam pelaksanaan kegiatan penelitian Badan Litbang Perhubungan disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 3. 1 Isu Strategis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Sektor Perhubungan

NO	ISU STRATEGIS	IMPLIKASI
1	Kelembagaan	Berdasarkan Permenhub No 122 Tahun 2018 menjelaskan bahwa posisi Badan Litbang adalah sejajar dengan Direktorat Jenderal. Kondisi ini akan berdampak pada bagaimana peran Badan Litbang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian sektor perhubungan.
2	Pembiayaan	Sumber pendanaan penelitian yang dilakukan Badan Litbang Perhubungan saat ini hanya bersumber dari APBN. Sehingga dengan sumber APBN yang semakin terbatas akan berdampak pada lingkup kegiatan penelitian yang dilakukan Badan Litbang Perhubungan. Distribusi alokasi pendanaan terkait dengan penggunaan dari sisi manjerial dan penelitian yang dilakukan juga harus tepat dan sesuai. Perlu digali sumber-sumber pembiayaan lain seperti menggandeng BUMN melalui CSR dan kerjasama dengan lembaga penelitian dari luar negeri.
3	Sumber daya manusia	Berdasarkan hasil pengumpulan informasi didapatkan bahwa mekanisme rekrutmen pegawai pada Badan Litbang Perhubungan tidak menyebutkan secara tegas terkait dengan kebutuhan SDM Peneliti. Artinya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dengan kapasitas pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi peneliti tentu saja akan berdampak pada kinerja Badan Litbang itu sendiri sebagai lembaga penelitian.

NO	ISU STRATEGIS	IMPLIKASI
4	Networking	Posisi kelembagaan Badan Litbang dalam RITN menyebutkan sebagai pengembang IPTEK dan Inovasi bersama dengan lembaga litbang kementerian yang lain, lembaga litbang pemerintah non kementerian, Institusi pendidikan tinggi, dan lembaga litbang daerah. Selain itu dalam UU No. 11 tahun 2019 menyebutkan bahwa Pemerintah mendorong adanya kolaborasi atau kerja sama dalam bentuk “alih teknologi” dengan lembaga swasta maupun asing terkait dengan kelembagaan maupun pembiayaan penelitian.
5	Regulasi	Dalam Pasal 715 Permenhub No.122 Tahun 2018 menyebutkan bahwa salah satu fungsi Badan Litbang adalah menyelenggarakan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kedua fungsi ini semestinya berada pada posisi strategis sebagai dasar perumusan kebijakan pada direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun dari hasil pengumpulan informasi di lapangan menyebutkan bahwa terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan penelitian di 82ndica perhubungan.
6	Sarana dan prasarana	Berdasarkan pengumpulan data dan informasi di lapangan menyebutkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana penelitian menjadi salah satu yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kegiatan penelitian dan kelitbangan.
7	Pemanfaatan hasil penelitian	Hasil yang diharapkan dari output kegiatan penelitian yang dilakukan Badan Litbang adalah seberapa banyak hasil riset yang termanfaatkan baik itu sebagai rekomendasi kebijakan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya dengan adanya 82ndicator keberhasilan kegiatan kelitbangan, hal ini tentu saja akan semakin mendorong peningkatan kualitas hasil riset Badan Litbang.
8	Badan Litbang sebagai BKT	Seiring dengan kebutuhan dan tantangan lingkungan strategis yang menuntut respon yang cepat dari Kementerian PERhubungan, Badan Litbang akan bertransformasi menjadi BKT/ Badan Kebijakan Transportasi, yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang berorientasi <i>research based</i> dan <i>evidence based</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai isu strategis di atas dapat menjadi pendorong dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang lebih efisien dan efektif.

Peran sebagai Badan Litbang, dituntut kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan penelitian sektor perhubungan di internal Kementrian Perhubungan maupun Lembaga/Kementrian lain yang berkaitan dengan sektor perhubungan (Kementrian PU) maupun lembaga penelitian lain (LIPI, BPPT). Koordinasi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan penelitian tetapi juga pemanfaatan hasil penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk kelembagaan yang mampu mensinergikan berbagai kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian.

Aspek pembiayaan yang selalu menjadi kendala dalam kegiatan penelitian tidak bisa dibebankan pada satu sumber atau instansi saja. Pelibatan berbagai pihak (Pemerintah, swasta, badan donor dll) baik di dalam negeri maupun luar negeri akat dalam menyediakan pembiayaan penelitian harus digali dan dikembangkan terus. Penelitian-penelitian yang berorientasi pada sektor industri yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan (konsumsi) masyarakat Indonesia (dengan Jumlah penduduk sangat besar) tentunya menjadi potensi yang luar biasa untuk dikembangkan dan mampu mendukung proses penelitian selanjutnya.

Kegiatan penelitian di Indonesia masih belum memberikan atmosfir yang menarik bagi pihak-pihak yang terlibat. Jumlah peneliti yang terbatas dengan kualifikasi yang (seringkali) tidak sesuai menambah buruknya atmosfir penelitian tersebut. Perlu upaya untuk memperbaiki situasi tersebut dengan memberikan kesejahteraan dan peran yang lebih baik bagi para peneliti. Hilangkan kesan bahwa Litbang merupakan kegiatan yang tidak penting, wilayah yang gersang dimana SDM di dalamnya sulit berkembang. Oleh karena itu dukungan anggaran litbang yang memadai menjadi kunci dalam peningkatan kesejahteraan SDM di lingkungan Litbang

Salah satu kunci sukses kegiatan litbang adalah ‘networking’. Dengan melakukan kolaborasi bersama peneliti multi disiplin, berbagai institusi terkait baik pemerintah maupun swasta, dari dalam maupun luar negeri dapat memperluas wawasan maupun kesempatan untuk mengembangkan berbagai topik penelitian. Disamping itu juga dimungkinkan ‘sharing’ pembiayaan yang selama ini selalu menjadi kendala dalam pelaksanaan penelitian.

Persoalan tumpang tindih regulasi pelaksanaan penelitian di sektor perhubungan perlu diurai bersama-sama dengan stake holders penelitian lainnya, baik dalam level internal (Kementrian Perhubungan) maupun eksternal (Lembaga dan kementerian lain). Diharapkan bisa dikembangkan regulasi yang jelas tupoksi dan kewenangan masing-masing stakeholder dalam kegiatan litbang, yang mampu mensinergikan seluruh kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian. Regulasi yang mampu menjawab 5 W + 1 H (What, Who, When, Why, Where + How) peran masing-masing *stakeholders* dalam bidang Litbang.

Keterbatasan biaya dalam bidang penelitian berdampak pada permasalahan penyediaan sarana dan prasarana. Peralatan laboratorium, ketersediaan benda uji, dan bahan-bahan penelitian merupakan komponen yang memerlukan biaya tidak sedikit dan sering menjadi kendala dalam pelaksanaan penelitian. Sekali lagi, upaya kolaborasi dapat membantu mengatasi kendala ketersediaan sarana, prasarana penelitian, selain dengan meningkatkan anggaran penelitian.

Apapun hasil penelitian yang dilakukan, bila tidak bisa dimanfaatkan akan menjadi sia-sia, hanya sebatas dokumen yang tersimpan rapi sebagai bahan bacaan saja. Upaya meningkatkan jumlah hasil penelitian yang termanfaatkan tentunya diawali dengan road map penelitian yang jelas, sehingga usulan penelitian menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan urgensi yang ada. Kesenambungan (*continuity*) kegiatan penelitian yang berorientasi pada hasil penelitian yang jelas harus didukung dengan dana penelitian dan komitmen yang kuat untuk memanfaatkan hasil penelitian tersebut bagi kesejahteraan masyarakat luas.

2. Pelaksanaan Penelitian Sektor Transportasi di Negara Lain

Secara umum keberhasilan pelaksanaan penelitian dapat dilihat dari jumlah publikasi terindeks global, kutipan (citation) dan jumlah paten. Indikator tersebut dapat diperbandingkan dengan Negara-negara lain. Menurut data Scimagojr.com dalam kurun waktu 1996-2016 Indonesia menghasilkan 54.146 publikasi. Jumlah ini masih jauh dari capaian Singapura, Thailand dan Malaysia. Meskipun jumlah dokumen publikasi per tahun menunjukkan peningkatan namun peringkat Indonesia di kawasan Asia masih berada di urutan 11, sedangkan di tingkat ASEAN pada posisi keempat. Kondisi sebaliknya terjadi pada jumlah kutipan (citation) yang menunjukkan penurunan sejak tahun 2013 dan tetap memposisikan Indonesia di urutan keempat di ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kinerja penelitian suatu Negara juga dapat dilihat dari jumlah paten. Hingga tahun 2015 Indonesia tercatat memiliki 333 paten pada Kantor Paten Amerika. Angka tersebut masih cukup jauh dibandingkan Singapura (10.044 paten), Malaysia (2.690 paten) dan Thailand (1.043 paten). Situasi ini diperparah dengan tren jumlah publikasi yang stagnan sejak tahun 2005

Situasi yang sama terlihat pada penelitian di bidang transportasi. Masih menurut Scimagojr.com, pada kurun waktu 1998-2018, 5 negara peringkat tertinggi dunia dalam jumlah dokumen publikasi internasional diduduki oleh China (23.867), USA (22.112), Inggris (8.053), Jerman (5.125) dan Australia (4.756). Indonesia sendiri menduduki peringkat 46 dengan jumlah 235 dokumen publikasi. Sedangkan ranking berdasarkan jumlah kutipan (citation), 5 negara ranking tertinggi adalah USA (325.021), Inggris (135.995), Australia (70.103), Canada (60.654) dan Jerman (35.790). Indonesia tercatat 1106 kutipan, masih di bawah Singapura (15.440), Malaysia (3.255) dan Thailand (2969).

Perkembangan penelitian di Indonesia maupun di Negara-negara lain tidak lepas dari kondisi jumlah peneliti dan anggaran penelitian. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 9.685 orang dengan rasio jumlah peneliti dengan jumlah penduduk sebesar 90 peneliti berbanding 1 juta penduduk. Kondisi ini jauh di bawah Singapura yang mencapai lebih dari 7000 peneliti dan Malaysia 2.590 peneliti per satu juta penduduk.

Dari aspek anggaran riset, terlihat bahwa Negara-negara maju memiliki komitmen tinggi dalam berinvestasi di bidang penelitian yang ditunjukkan dengan rasio pengeluaran penelitian dan pengembangan terhadap PDB atau Gross Expenditure on R&D (GERD). Negara-negara dengan komitmen yang tinggi terhadap riset, berdasarkan data 2013, adalah Korea Selatan (4,1 persen), Jepang (3,5 persen), dan Finlandia (3,3 persen). Di tingkat ASEAN, yang memiliki rata-rata GERD per PDB tinggi adalah Singapura (2,0 persen) dan Malaysia (1,1 persen). Sementara itu, GERD per PDB Indonesia belum mencapai angka 1 persen –hanya sebesar 0,085 persen– dan jauh tertinggal dibandingkan GERD dunia.

Belajar dari kesuksesan Negara-negara lain dalam mengembangkan penelitian, ke depan aspek ketersediaan anggaran dan jumlah peneliti yang memadai baik kualitas maupun kuantitas harus menjadi prioritas. Selama ini kegiatan penelitian di Indonesia belum memiliki atmosfer yang kondusif bagi pelaku penelitian maupun upaya pengembangan hasil-hasil penelitian. Keterbatasan dana selalu menjadi kendala dalam memberikan kesempatan penelitian yang lebih luas cakupannya. Hasil-hasil penelitian belum banyak yang bisa dimanfaatkan oleh industry. Belanja penelitian dan pengembangan masih didominasi oleh pemerintah. Sektor Swasta masih sedikit perannya dalam penelitian dan pengembangan. Di sisi lain, kesejahteraan peneliti juga masih dianggap belum baik, sehingga profesi peneliti masih kurang diminati.

3. Indikasi Tema Penelitian

Indikasi tema penelitian untuk tahun 2020-2024 memperhatikan berbagai isu strategis dan arah kebijakan pembangunan nasional sektor transportasi yang tertera dalam RPJP 2005-2025, RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 serta Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2020-2024. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang diturunkan kedalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, rencana penelitian Badan Litbang Perhubungan berfokus pada 3 (tiga) fokus utama dan 5 (lima) agenda prioritas, dengan turunan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Dasar: Kajian Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
- b. Konektivitas:
 - 1) Kajian Konektivitas dan Aksesabilitas;
 - 2) Kajian Kinerja Pelayanan Transportasi;
 - 3) Kajian Pengembangan Transportasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;

- 4) Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Pendukung Logistik;
 - 5) Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK);
 - 6) Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi.
- c. Infrastruktur Perkotaan: Kajian Sistem Transportasi Ibukota Negara.

Beberapa isu eksisting dan terbaru menyangkut penelitian di bidang transportasi didapatkan dari analisis terhadap rencana-rencana penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa tema besar adalah:

- **Integration.** Berkaitan dengan bagaimana infrastruktur dan layanan transportasi terintegrasi satu dengan yang lain, untuk mencapai utilisasi yang paling maksimal. Integrasi ini terjadi baik di masing-masing matra (darat, laut, udara) maupun antar matra. Isu ini adalah isu eksisting sekaligus diperkirakan tetap akan menjadi isu penting di masa mendatang.
- **Competition.** Berkaitan dengan aspek bagaimana memastikan infrastruktur transportasi mampu menjadi pendorong daya saing. Isu-isu seperti human capital (SDM), perkuatan kelembagaan, kemampuan logistik, utilisasi infrastruktur eksisting, pendanaan, maupun terkait Regulasi dan NSPK
- **Smart technology.** Aspek ini menjadi kewajiban dikarenakan sudah meluasnya penggunaan teknologi untuk memastikan layanan transportasi terbaik. Isu-isu seperti *Unmanned Vehicle, Material Cerdas, Intelligent Transport System, Artificial Intelligent, Big Data, Diversifikasi Fungsi Sarana*, maupun *Internet of Things* harus menjadi perhatian mulai saat ini, sekaligus memperkuat upaya-upaya penelitian ke arah itu yang sudah berjalan.
- **Inclusivity.** Isu ini sangat penting dalam konteks Indonesia dimana kesenjangan masih perlu menjadi perhatian, baik kesenjangan spasial antara timur dan barat, kesenjangan antar kondisi masyarakat dan lain sebagainya. Penelitian tentang tol laut, universal design, dll adalah salah satu upaya mencapai pembangunan yang tidak meninggalkan pihak-pihak yang kurang beruntung.
- **Sustainability.** Penelitian yang berkaitan dengan keseimbangan antara perkembangan ekonomi, keadilan masyarakat dan keterjagaan lingkungan.
- **Ressilience.** Penelitian yang berkaitan dengan ketahanan layanan transportasi dalam kondisi darurat/bencana.
- **Safety and secure.** Keselamatan tetap menjadi itu penelitian utama dimana sektor perhubungan membawa amanat keselamatan sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan

transportasi. Amanat keselamatan dan keamanan transportasi sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan transportasi

Jika dipetakan maka, tema riset di sektor transportasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

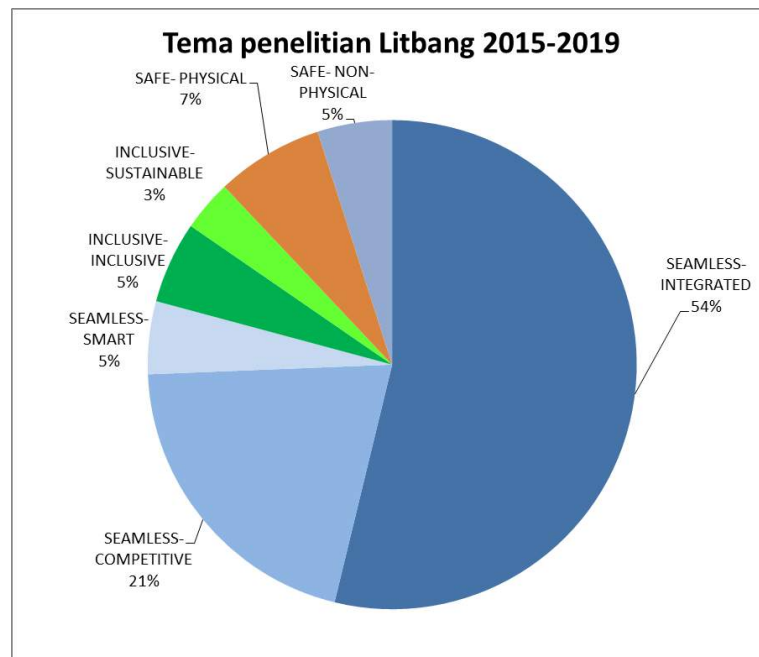
Tabel 3. 2 Indikasi Tema Riset di Sektor Transportasi

TUJUAN	TEMA	SUB TEMA
Seamless	Integrated	Infrastructure Development
		Services
		Keterpaduan Infrastruktur dan land use
	Competitive	SDM
		Alternative Funding
		Kelembagaan
		Logistik
		Utilisasi
		KPBU
		Regulasi dan NSPK
	Smart	Unmanned Vehicle
		Material Cerdas
		Intelligent Transport System
		Artificial Intelligent
		Big Data
		Diversifikasi Fungsi Sarana
		Internet of Things
Inclusive	Inclusive	Universal Design
		Social Impact
		Access for Remote Area
	Sustainable	Energi Berkelanjutan
		Electric Vehicle
		Green Infrastructure
Safe and Secure	Physical	Infrastructure
		Lingkungan
		Vehicle
		Teknologi Keamanan

TUJUAN	TEMA	SUB TEMA
	Non Physical	Human/People
		Management
		Post accident
		Manajemen Keamanan

4. Mapping Penelitian Eksisting Terhadap Tema Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian periode tahun 2015-2019 secara garis besar telah memenuhi beberapa tema besar yang telah tertuang dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan. Mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada seperti RPJPN Tahun 2005-2025, RIRN 2017-20145, RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dokumen Teknis Kementerian Perhubungan, Renstra Balitbang Perhubungan, dan Rencana Induk Penelitian Perguruan Tinggi, serta dengan melihat perkembangan isu-isu global. Berdasarkan data pelaksanaan penelitian dalam sub bab sebelumnya dan tema besar diatas, maka sepanjang tahun 2015-2019 tema-tema penelitian di Litbang sebagian besar berada di cabang *seamless*, dengan presentase 80%, 54% berada pada penelitian untuk menjadikan upaya *integrated transport*, 21% untuk *competitive*, 12% untuk *safe*, dan pada *inclusive* hanya sebesar 6%. Pada gambar di bawah ini menyajikan persentase kesesuaian tema riset yang telah dilakukan Badan Litbang Perhubungan.



Gambar 3. 1 Presentase Penelitian Badan Litbang Berdasarkan Tema/Topik Tahun 2015-2019

Apabila mengacu pada persentase diatas menunjukan bahwa perlunya untuk mengembangkan kajian yang bertema *inklusif* dan *safe*. Hal ini relevan dengan hasil pengumpulan informasi yang sudah dilakukan dari *stakeholders* terkait menjelaskan bahwa memang dari sisi sarana dan prasana pembangunan transportasi di Indonesia saat ini tumbuh dan berkembang dengan cepat. Namun dari sisi yang lain keberadaan infrastruktur transportasi tersebut masih jauh dari aspek keselamatan dan aspek inklusif (dapat dimanfaatkan untuk semua).

Kemudian dalam rangka merumuskan perencanaan tema/topik riset yang akan dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan akan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah berlaku sebelumnya dan dengan mempertimbangkan juga beberapa fokus riset yang ada dalam perencanaan penelitian di lingkup perguruan tinggi.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kebutuhan akan pelaksanaan kegiatan penelitian untuk menjawab permasalahan transportasi yang semakin kompleks serta kebutuhan penyediaan kebijakan transportasi kedepan membutuhkan peran Badan Litbang Perhubungan dengan kewenangan yang lebih luas. **Transformasi peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan membutuhkan kelengkapan regulasi dan kelembagaan pendukung sebagai penguatan peningkatan peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan kedepannya.** Terlebih lagi dengan adanya tuntutan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu agenda reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas layanan publik antara lain melalui peningkatan kepercayaan terhadap pemanfaatan produk litbang. Salah satu wujud peningkatan kepercayaan, yaitu melalui penetapan kebijakan melalui regulasi yang mendorong optimalisasi peran penting Badan Litbang Perhubungan terkait dengan posisinya dalam proses perencanaan kebijakan transportasi. Kebutuhan dukungan regulasi untuk penguatan peran dan optimalisasi kinerja Badan Litbang Perhubungan bersumber baik dari luar unit kerja Badan Litbang Perhubungan maupun lingkungan internal Badan Litbang Perhubungan terkait peningkatan kelengkapan regulasi untuk kegiatan operasional kelitbangan.

Dalam rangka memenuhi amanat kebijakan penelitian nasional untuk mengoptimalkan peran lembaga penelitian, maka Badan Litbang Perhubungan membutuhkan kerangka regulasi meliputi:

1. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai SISTRANAS.
2. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai pembiayaan alternatif di bidang penelitian dan pengembangan.

3. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai kolaborasi penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Rancangan Peraturan Kepala Badan Litbang Perhubungan mengenai pengelolaan data dan informasi penelitian dan kebijakan.
5. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang NSPK kajian / penelitian di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam jangka kurun 5 (lima) tahun kedepan berikut disampaikan kerangka kelembagaan Badan Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Rencana perubahan organisasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi

Untuk mewujudkan kebijakan transportasi dalam mendukung pembangunan inklusif diperlukan penguatan kelembagaan dan kapasitas analisis serta kebijakan transportasi secara holistik dan terintegrasi melalui pembentukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT).

Peran Strategis Badan Kebijakan Transportasi (BKT) dalam mewujudkan kebijakan transportasi dalam mendukung pembangunan inklusif adalah sebagai berikut:

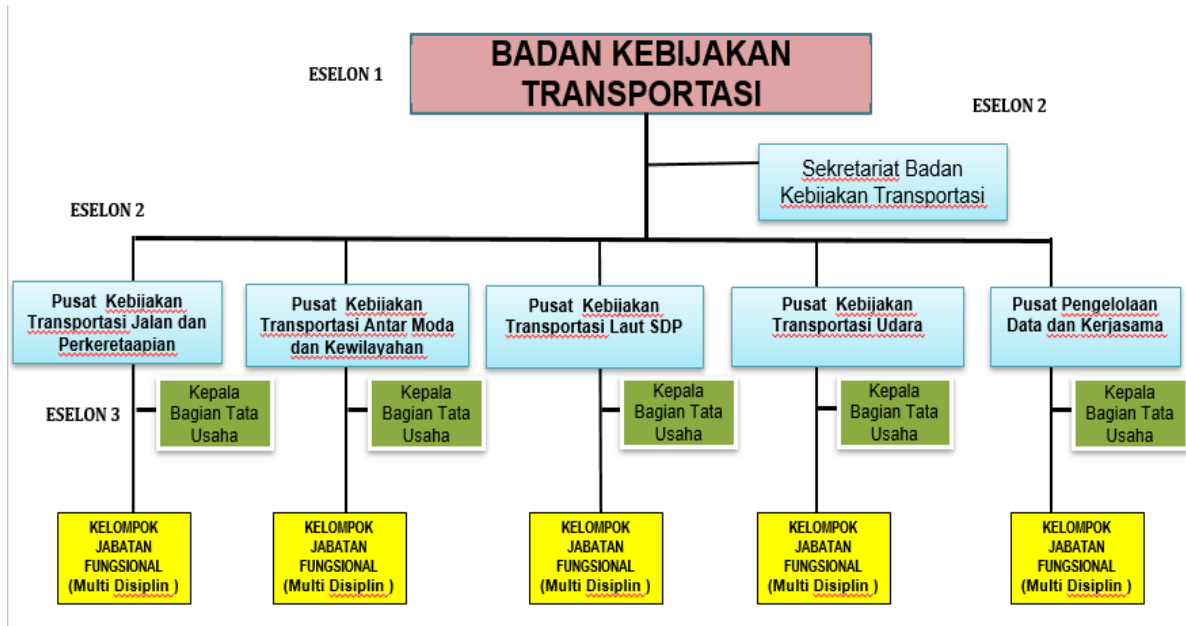
- a) Pengembangan bagi peningkatan kinerja dan nilai tambah publik dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan secara terintegrasi
- b) Analisis dan rekomendasi multi - perspektif bagi peningkatan konektivitas dan efektivitas bagi pembangunan berbasis THIS (tematik, holistik, integratif, spasial)
- c) Pengembangan strategik - integratif dalam pembangunan perhubungan (kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka evaluasi)
- d) Penciptaan Nilai Tambah Publik yang Optimal dalam Pembangunan Sektor Perhubungan
- e) Sebagai *Knowledge Hub*

Melalui peran tersebut Kontribusi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) adalah sebagai berikut:

- a) Government think-tank, yaitu memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan perhubungan (decision support system), dan penugasan khusus dari Pimpinan;
- b) Analisis dan pengembangan kebijakan arah pengembangan strategis dalam pembangunan perhubungan yang bersifat holistik-integratif (cross-cutting issues);
- c) Analisis dan rekomendasi multi-perspektif bagi peningkatan konektivitas dan efektivitas transportasi bagi pembangunan berbasis THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial);

d) Rekomendasi pengembangan bagi peningkatan kinerja dan nilai tambah publik dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan secara terintegrasi.

Adapun usulan konsep Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 3. 2 Konsep Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi

Dapat dilihat pada gambar diatas Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari jajaran eselon II yang terdiri dari (1) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi; (2) Pusat Kebijakan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian; (3) Pusat Kebijakan Transportasi Antar Moda dan Kewilayahan; (4) Kebijakan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan (5) Pusat Pengelolaan Data dan Kerjasama. Pada Pusat Kebijakan dibantu satu Eselon III yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam mendukung pencapaian Kinerja Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) telah disusun Kerangka Kerja Logis Badan Kebijakan Transportasi, dapat dihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 3 Kerangka Kerja Logis Badan Kebijakan Transportasi

Kinerja		Lingkup Peran dan Fungsi
Impact		Keberhasilan pembangunan sektor perhubungan secara inklusif, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi yang meningkatkan kemandirian dan mensejahterakan masyarakat
Outcome	Long-term	a. Mendorong pembangunan ekonomi, antara lain dalam : efek jaringan, efek produktivitas, efek kinerja, efek ketersediaan, serta efek pasar; b. Sebagai pengungkit kualitas sendi-sendi kehidupan masyarakat, antara lain dalam : peningkatan mobilitas dan dinamika kehidupan yang produktif;
	Intermediate	a. Terbangunnya harmonisasi kebijakan lintas sektor dan bidang, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; b. Terbentuknya prasyarat dasar kelembagaan menuju iklim kondusif bagi pembangunan sektor perhubungan, konektivitas, dan transportasi perkotaan
	Initial (short-term)	Penetapan dan atau pemanfaatan Draft Kebijakan dan Rekomendasi sebagai landasan hukum maupun landasan operasional dalam pembangunan sektor perhubungan
Output		a. Rekomendasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan bagi Pimpinan Kementerian dan Pimpinan Pemerintahan; b. Draft Kebijakan Transportasi pada tingkat makro, meso dan mikro; c. Laporan status (dan perkembangan) pelaksanaan kebijakan transportasi;
Kegiatan/Aktivitas		a. Perumusan kebijakan b. Koordinasi dan kolaborasi dalam evaluasi, pengembangan dan perumusan kebijakan c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Badan Litbang Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan dari Sasaran Program dengan indikator kinerja yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.

4.2 KERANGKA PENDANAAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2020-2024

Sebagai lembaga negara di bawah naungan Kementerian Perhubungan, pembiayaan penelitian dan pengembangan Badan Litbang Perhubungan bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA. Kepastian adanya pembiayaan ini merupakan landasan yang kuat bagi Badan Litbang Perhubungan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Walaupun masih relatif kecil, jumlah dana yang dialokasikan ke Badan Litbang Perhubungan secara nominal cenderung naik dari tahun ke tahun. Pendanaan Badan Litbang Perhubungan terbagi menjadi anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Transportasi yang merupakan kegiatan utama Badan Litbang Perhubungan dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya.

Dalam hal penggalian sumber dana lain di luar APBN, paradigma baru yang timbul akibat penerapan UU No. 18 Tahun 2002, adalah: (a) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga tingkat pusat dan lembaga tingkat daerah digalakkan; (b) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga publik dan lembaga swasta dirangsang; (c) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga nasional dan internasional diberi porsi lebih besar. Berdasarkan pengalaman di tahun 2014, Badan Litbang Perhubungan telah merasakan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian. Yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian kerjasama kedepannya adalah mekanisme penganggaran diantara kedua belah pihak atau beberapa pihak.

Dampak positif dari kerjasama tersebut antara lain adalah adanya sumber pendanaan di luar APBN yang apabila dapat dikelola dengan baik secara mandiri dapat memberikan dorongan bagi perkembangan litbang perhubungan. Namun demikian, penerapan UU No. 18 Tahun 2002 khususnya dalam hal pemanfaatan secara langsung pendapatan dari hasil komersialisasi teknologi masih perlu diperjuangkan. Pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2015-2019 seluruhnya terpusat di Kantor Pusat Badan Litbang Perhubungan di DKI Jakarta. Secara rinci Tabel Indikasi Pendanaan dan Kegiatan dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan 2020 – 2024 disampaikan dalam **Lampiran I**.

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Program, Meta Indikator, dan Target Tahun 2020-2024 (1)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKP 1	INITIAL OUTCOME					
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders				
		75%	75%	80%	85%	90%
	INTERMEDIATE OUTCOME					
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2) yang dimanfaatkan oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders				
		35%	36%	37%	38%	39%

Definisi:

- Rekomendasi adalah masukan, usulan, atau pendapat berdasarkan kajian kontraktual/swakelola di bidang transportasi sesuai fokus dan agenda prioritas Kementerian yang tertuang dalam *policy brief* yang diajukan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan kepada Menteri Perhubungan, sub sektor, dan stakeholders terkait dalam bentuk nota dinas, surat, maupun rancangan peraturan;
- Rekomendasi kebijakan bersifat *initial outcome* adalah rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan dan diterima oleh Menteri Perhubungan, unit eselon I lainnya, dan stakeholder lain sebagai dasar tindaklanjut melalui disposisi Menteri Perhubungan atau pimpinan unit eselon I atau stakeholders lain kepada unit kerja dibawahnya atau disetujui untuk ditindaklanjuti/diproses/ditetapkan sesuai prosedur yang diberlakukan;
- Rekomendasi kebijakan bersifat *intermediate outcome* adalah rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan pada periode waktu (t-2) dan telah dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, unit eselon I lain, atau stakeholders lain sebagai referensi penyusunan suatu kebijakan bidang perhubungan ataupun sebagai dasar perencanaan kegiatan teknis bidang perhubungan.

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Program, Meta Indikator, dan Target Tahun 2020-2024 (2)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKP 2	INITIAL OUTCOME					
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	Prosentase Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders				
		75%	75%	80%	85%	90%
	INTERMEDIATE OUTCOME					
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	Prosentase Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan yang dimanfaatkan oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan dan stakeholders				
		30%	30%	30%	32%	32%

Definisi:

- Rekomendasi adalah masukan, usulan, atau pendapat berdasarkan kajian swakelola/kajian perorangan di bidang transportasi yang tertuang dalam *policy brief* yang diajukan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan kepada Menteri Perhubungan, sub sektor, dan stakeholders terkait dalam bentuk nota dinas, surat, maupun rancangan peraturan;
- Rekomendasi kebijakan bersifat *initial outcome* adalah rekomendasi kebijakan isu strategis yang diajukan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan dan diterima oleh Menteri Perhubungan, unit eselon I lainnya, dan stakeholder lain sebagai dasar tindaklanjut melalui disposisi Menteri Perhubungan atau pimpinan unit eselon I atau stakeholders lain kepada unit kerja dibawahnya atau disetujui untuk ditindaklanjuti/diproses/ditetapkan sesuai prosedur yang diberlakukan;
- Rekomendasi kebijakan bersifat *intermediate outcome* adalah rekomendasi kebijakan isu strategis yang diajukan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan dan telah dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, unit eselon I lain, atau stakeholders lain sebagai referensi penyusunan suatu kebijakan bidang perhubungan ataupun sebagai dasar perencanaan kegiatan teknis bidang perhubungan.

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Program, Meta Indikator, dan Target Tahun 2020-2024 (3)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		META INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 3	INITIAL OUTCOME						
	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi lptek dan Sumber Daya Manusianya	Prosentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi lptek dan Sumber Daya Manusia yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan sub sektor	75%	75%	80%	85%	90%
	INTERMEDIATE OUTCOME						
	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya pada t-2	Prosentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi lptek dan Sumber Daya Manusia yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan sub sektor pada t-2	30%	31%	32%	33%	34%

Definisi:

- Rekomendasi hasil kajian evaluasi adalah masukan, usulan, atau pendapat berdasarkan kajian kontraktual/swakelola/kajian perorangan mengenai implementasi program, regulasi, kelembagaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan sumber daya manusianya di bidang transportasi yang tertuang dalam *policy brief* yang diajukan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan kepada Menteri Perhubungan dan sub sektor terkait dalam bentuk nota dinas, surat, maupun rancangan peraturan;
- Rekomendasi hasil kajian evaluasi bersifat *initial outcome* adalah rekomendasi mengenai implementasi program, regulasi, kelembagaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi IPTEK dan sumber daya manusianya di bidang transportasi yang diajukan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan dan diterima oleh Menteri Perhubungan dan unit eselon I lainnya sebagai dasar tindaklanjut melalui disposisi Menteri Perhubungan atau pimpinan unit eselon I atau stakeholders lain kepada unit kerja dibawahnya atau disetujui untuk ditindaklanjuti/diproses/ditetapkan sesuai prosedur yang diberlakukan;
- Rekomendasi hasil kajian evaluasi bersifat *intermediate outcome* adalah rekomendasi yang diajukan oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan pada periode waktu (t-2) dan telah dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan unit eselon I lain sebagai referensi penyusunan kajian kebijakan lain ataupun masukan pada proses perbaikan perencanaan program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dukungan standarisasi IPTEK, dan sumber daya manusia untuk tahap berikutnya.

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Program, Meta Indikator, dan Target Tahun 2020-2024 (4)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		META INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP 4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	Prosentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi untuk peningkatan kualitas penelitian	80%	80%	85%	85%	90%
IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan berdasarkan Penilaian Kemenpan RB	78	79	79,5	80	80,5

Definisi:

Penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi terdiri dari:

- 1) Workshop/FGD/Roundtable/Seminar dalam negeri
- 2) Sidang, konferensi, workshop dan studi banding internasional
- 3) Jurnal Transportasi
- 4) KSP
- 5) Bimbingan Teknis
- 6) Penyusunan Database Penelitian
- 7) Publikasi hasil penelitian
- 8) Pembinaan jabatan fungsional
- 9) Penyusunan SOP
- 10) Penyusunan formasi pegawai
- 11) Analisis evaluasi dan jabatan
- 12) Penyusunan HAKI
- 13) *Service Delivery Unit*

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		META INDIKATOR	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
SP.1	SK.1	Optimnya kemanfaatan rekomendasi perencanaan kebijakan transportasi	IKK 1a	Tingkat kemanfaatan rekomendasi perencanaan kebijakan	Prosentase rekomendasi perencanaan kebijakan yang diterima oleh Kepala Badan Litbang, Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan dan Stakeholders	75%	75%	80%	85%	90%
	SK.1	Optimalnya kemanfaatan rekomendasi perencanaan kebijakan transportasi	IKK 1b	Tingkat kemanfaatan rekomendasi perencanaan kebijakan pada (t-2)	Prosentase rekomendasi perencanaan kebijakan pada (t-2) yang dimanfaatkan oleh Kepala Badan Litbang, Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan dan Stakeholders	35%	36%	37%	38%	39%
SP.3	SK.10	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Balitbang Perhubungan	IKK 22	Indeks Kelembagaan Badan Litbang Perhubungan	Perhitungan indek kelembagaan berdasarkan pada Permenpan&RB No.20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	78	78,5	79	79,5	80
			IKK 23	Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang Perhubungan	Penilaian tingkat kualitas profesionalitas pegawai ASN Badan Litbang berdasarkan 4 dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin	71	72	73	74	75
			IKK 24	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Litbang Perhubungan	Penilaian indeks tata kelola manajemen ASN yang menggunakan sistem skor dan bobot dalam sistem merit	0,8	0,9	0,92	0,96	1
	SK.11	Meningkatnya Birokrasi Balitbang Perhubungan Akuntabel	IKK 25	Indeks Perencanaan Badan Litbang Perhubungan	Tingkat kesesuaian dan keterpaduan berdasarkan aspek integrasi perencanaan	78	80	82	84	85
			IKK 26	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Litbang yang perhitungannya sama dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60	65	70	75	80
			IKK 27	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Litbang Perhubungan	Indeks terhitung berdasarkan seperangkat dimensi/indikator pengelolaan keuangan yaitu: tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan Badan Litbang, dan tingkat penyerapan anggaran	80,2	84,2	86,2	88,2	90,2
			IKK 28	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Tingkat kualitas penyelenggaraan perkantoran meliputi unsur K3 dan kualitas penyelenggaraan perkantoran Badan Litbang Perhubungan	70	71	72	73	74
			IKK 29	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	3	3	3	3	3
	SK.12	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Balitbang Perhubungan	IKK 30	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Litbang Perhubungan	Tindak lanjut perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani	80	82	85	86	87
	SK.13	Meningkatnya Kualitas Layanan Data, Komunikasi dan Informasi Publik Balitbang Perhubungan	IKK 31	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	Kemanfaatan aplikasi dan data yang dibangun oleh Badan Litbang	90	90	92	92	93
			IKK 32	Tingkat Pengelolaan Publikasi Penelitian dan Pengembangan Transportasi	Prosentase penelitian yang dipublikasikan baik berupa media, jurnal, maupun kanal publikasi lainnya	70	70	70	75	75

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda (1)

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		META INDIKATOR	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
SP.1	SK.2	Optimalnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi antarmoda	IKK 2a (Initial)	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Antarmoda	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Antarmoda yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 2b (Intermediate)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi antarmoda pada (t-2)	Prosentase rekomendasi kebijakan bidang transportasi antarmoda pada (t-2) yang diterima dan dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	35%	36%	37%	38%	39%
			IKK 3a (Initial)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi antarmoda	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi antarmoda yang diterima oleh Menteri, sub sektor Perhubungan, dan stakeholders	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 3b (Intermediate)	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi Antarmoda	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi antarmoda yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	30%	30%	30%	32%	32%
			IKK 4a (Initial)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi antarmoda	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi antarmoda yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 4b (Intermediate)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi antarmoda pada t-2	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi antarmoda yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan pada t-2	30%	31%	32%	33%	34%

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda (2)

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		META INDIKATOR	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
SP.2	SK.6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Antarmoda	IKK 14	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Antarmoda	Persentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi antarmoda yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	80%	80%	85%	85%	90%
			IKK 15	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	3	3	3	3	3

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian (1)

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		META INDIKATOR	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
SP.1	SK.3	Optimalnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi Jalan Dan KA	IKK 5a (Initial)	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Jalan dan KA	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Jalan Dan KA yang diterma oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 5b (Intermediate)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi jalan dan KA pada (t-2)	Prosentase rekomendasi kebijakan bidang transportasi jalan dan KA pada (t-2) yang diterima dan dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	35%	36%	37%	38%	39%
			IKK 6a (Initial)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi jalan dan KA	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi jalan dan KA yang diterima oleh Menteri, sub sektor Perhubungan, dan stakeholders	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 6b (Intermediate)	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi Jalan dan KA	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi jalan dan KA yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	30%	30%	30%	32%	32%
			IKK 7a (Initial)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi jalan dan KA	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi jalan dan KA yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 7b (Intermediate)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi jalan dan KA pada t-2	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi jalan dan KA yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan pada t-2	30%	31%	32%	33%	34%

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian (2)

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		META INDIKATOR	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
SP.2	SK.7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Jalan dan KA	IKK 16	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Jalan dan KA	Persentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi Jalan dan KA yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	80%	80%	85%	85%	90%
			IKK 17	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	3	3	3	3	3

**Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan
Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan (1)**

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		META INDIKATOR	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
SP.1	SK.4	Optimalnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi LSDP	IKK 8a (Initial)	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi LSDP	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi LSDP yang diterima oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 8b (Intermediate)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi LSDP pada (t-2)	Prosentase rekomendasi kebijakan bidang transportasi LSDP pada (t-2) yang diterima dan dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	35%	36%	37%	38%	39%
			IKK 9a (Initial)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi LSDP	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi LSDP yang diterima oleh Menteri, sub sektor Perhubungan, dan stakeholders	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 9b (Intermediate)	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi LSDP	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi LSDP yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	30%	30%	30%	32%	32%
			IKK 10a (Initial)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi LSDP	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi LSDP yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 10b (Intermediate)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi LSDP pada t-2	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi LSDP yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan pada t-2	30%	31%	32%	33%	34%

**Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan
Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan (2)**

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		META INDIKATOR	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
SP.2	SK.8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi LSDP	IKK 18	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Jalan dan KA	Persentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi LSDP yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	80%	80%	85%	85%	90%
			IKK 19	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	3	3	3	3	3

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara (1)

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	META INDIKATOR	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024		
SP.1	SK.5	Optimalnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang transportasi Udara	IKK 11a (Initial)	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Udara	Prosentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Udara yang diterma oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 11b (Intermediate)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi Udara pada (t-2)	Prosentase rekomendasi kebijakan bidang transportasi Udara pada (t-2) yang diterima dan dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	35%	36%	37%	38%	39%
			IKK 12a (Initial)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi Udara	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi Udara yang diterima oleh Menteri, sub sektor Perhubungan, dan stakeholders	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 12b (Intermediate)	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Transportasi Udara	Prosentase rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang transportasi Udara yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan, dan stakeholders	30%	30%	30%	32%	32%
			IKK 13a (Initial)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi Udara	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi Udara yang diterima oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan	75%	75%	80%	85%	90%
			IKK 13b (Intermediate)	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi Udara pada t-2	Persentase rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusianya Bidang transportasi Udara yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Sub Sektor Perhubungan pada t-2	30%	31%	32%	33%	34%

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara (2)

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		META INDIKATOR	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
SP.2	SK.9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Udara	IKK 20	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Udara	Persentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi Udara yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	80%	80%	85%	85%	90%
			IKK 21	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	3	3	3	3	3

BAB V

MANAJEMEN RISIKO

5.1 UMUM

Dalam rangka memastikan tercapainya sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ke depan, diperlukan analisa peristiwa-persitiwa dan ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang pada periode Renstra 2020-2024. Ketidakpastian ini dianalisa sebagai risiko, yaitu suatu kejadian yang mungkin terjadi dan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi seperti yang direncanakan. Risiko yang dianalisa memiliki karakteristik sebagai berikut:

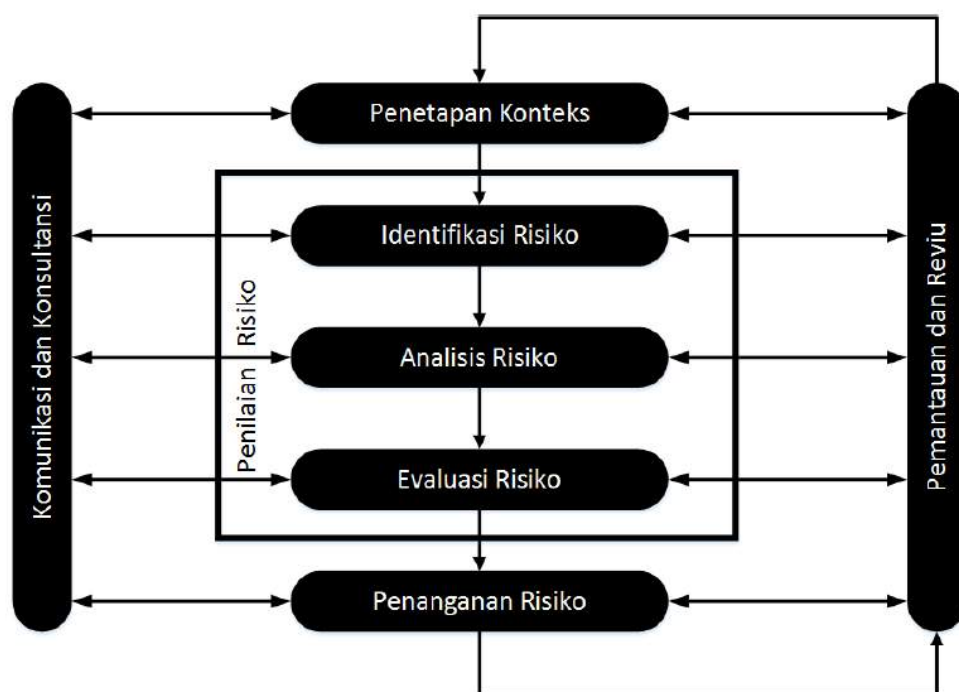
- a. Selalu ada, dan mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi Badan Litbang Perhubungan;
- b. Merupakan peristiwa yang belum terjadi (masih berupa potensi atau mungkin terjadi);
- c. Bukan merupakan suatu kepastian untuk terjadi (memiliki peluang atau probabilitas);
- d. Memiliki dampak negatif (*downside risk*, akibat buruk), apabila peristiwanya benar-benar terjadi, tetapi juga dapat memiliki dampak positif (*upside risk*);
- e. Ditentukan oleh 2 faktor: kemungkinan terjadinya dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, maka diperlukan *Integrated Risk Management* (IRM), yaitu suatu proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan serta mengembangkan alternatif penanganan risiko. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan organisasi Badan Litbang Perhubungan perlu diimplementasikan untuk mengelola perubahan dan mempersiapkan organisasi Badan Litbang Perhubungan beradaptasi dengan perubahan dan merupakan bagian dari pengarusutamaan RPJMN 2020-2024 dan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Manajemen risiko ini juga berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dibangun oleh 5 (lima) unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Prinsip-prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko mengacu pada beberapa sasaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Badan Litbang Perhubungan;
- b. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan formal (Undang-Undang, Hukum, dan Regulasi);
- c. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- d. Meningkatkan keefektifan alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi Badan Litbang Perhubungan;
- e. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan

- f. Meningkatkan keandalan laporan pertanggungjawaban organisasi Badan Litbang Perhubungan.

Penyusunan *Integrated Risk Management* (IRM) Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, penanganan, pemantauan dan peninjauan. Proses Manajemen Risiko mulai dari identifikasi risiko hingga penanganan risiko mengikuti bagan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Tahapan Manajemen Risiko

- a. **Identifikasi Risiko** dilaksanakan untuk mengenali seluruh potensi risiko yang melekat/inheren pada setiap aktivitas fungsional. Dalam melakukan identifikasi risiko diperhitungkan faktor sumber/penyebab risiko dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi Badan Litbang Perhubungan. Pemilihan dalam identifikasi risiko adalah dengan mempertimbangkan risiko yang mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi Badan Litbang Perhubungan, baik bersifat mikro ataupun makro; risiko yang dipilih adalah risiko yang dapat menggambarkan risiko inherent yang terjadi atau mungkin terjadi; prioritas pada risiko-risiko yang berdampak langsung terhadap output organisasi; serta sumber informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko.

- b. **Analisis Risiko** dilakukan untuk menentukan *level of risk* (tingkat/level risiko) dengan memperhitungkan 2 (dua) perspektif yaitu kemungkinan dan dampak. Adapun langkah-langkah analisis risiko adalah: memahami risiko-risiko inheren yang telah teridentifikasi, menentukan ukuran/nilai dari aspek kemungkinan dan aspek dampak/konsekuensi dari setiap risiko, serta menentukan tingkat/level risiko dengan telah memperhitungkan efektivitas metode pengukuran.
- c. **Evaluasi Risiko** dilakukan untuk menetapkan apakah risiko tersebut melampaui toleransi risiko organisasi atau tidak serta mengurutkan prioritas risiko untuk rencana penanganan sehingga dapat meningkatkan tingkat keyakinan (*level of confidence*) pengambilan keputusan. Adapun tahapan dalam pelaksanaan evaluasi risiko adalah : membandingkan ukuran risiko/level risiko (dampak dan probabilitas) dengan kapasitas organisasi, menetapkan preferensi risiko, dan membuat peta risiko. Peta risiko merupakan representasi grafis dari kejadian risiko atas dasar tingkatan dampak dan kemungkinan dalam organisasi Badan Litbang Perhubungan yang menunjukkan posisi risiko dan menentukan prioritas respon risiko.
- d. **Mitigasi/penanganan risiko** dilakukan untuk menekan/mengurangi dampak bila terjadi serta menekan/mengurangi probabilitas risiko sebelum terjadi. Terdapat beberapa opsi dalam penanganan/mitigasi risiko berupa: menghindari risiko (*Avoid*), mengalihkan risiko (*transfer*), menurunkan dampak dan kemungkinan risiko (*reduce*), dan menerima risiko (*accept*).

5.2 MANAJEMEN RISIKO RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Analisis manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 didasarkan pada sasaran program Badan Litbang pada periode Renstra.

5.2.1 Manajemen Risiko untuk Sasaran Program 1

Sasaran program pertama Badan Litbang Perhubungan adalah: “**Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan**”. Setelah dilakukan identifikasi risiko, terdapat 6 (enam) risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran program pertama, dimana risiko terbesar yang mungkin terjadi yaitu rencana penelitian belum mengantisipasi perubahan eksternal sehingga dapat berdampak pada hasil kajian strategis tidak menjawab perubahan eksternal. Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka dilakukan rencana perbaikan kegiatan pengendalian berupa kegiatan forum riset, best practice sharing forum serta perancangan platform knowledge management. Adapun rincian manajemen risiko untuk sasaran program 1 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Manajemen Risiko Sasaran Program-1

RANKING	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKAN PEMANTAUAN
					INFORMASI	KOMUNIKASI	
1	Rencana penelitian belum mengantisipasi perubahan eksternal	kurangnya kompetensi dalam menghadapi perubahan eksternal	kajian strategis tidak menjawab perubahan eksternal	forum riset, best practice sharing forum, perancangan platform knowledge management	Memberikan disposisi koordinasi berkala dengan Para Stakeholder dan membentuk Satuan Tugas terhadap Isu-isu Strategis	Pembentukan Satgas Pengkajian dan Pemabahasan Isu-isu Strategis	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat
2	Tidak terutilisasinya rekomendasi kebijakan yang telah disusun	kurangnya komitmen pemangku kepentingan / stakeholder dalam pemanfaatan penelitian	rekomendasi kebijakan tidak dimanfaatkan	1. Membangun pendekatan komunikasi proaktif dengan pemangku kepentingan; 2. Kolaborasi dengan media terkait publikasi hasil kajian 3. Merancang program media campaign 4. Melakukan peningkatan publikasi artikel populer di media (media cetak, media online, dan media sosial)	Memberikan disposisi koordinasi berkala dengan Media dan Publikasi artikel populer di Media Sosial	Pembentukan Project Management Unit (PMU)	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat
3	Kualitas rekomendasi tidak menjawab persoalan/isu (tujuan penelitian)	kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan/stakeholder dalam proses pelaksanaan penelitian	Hasil kajian strategis tidak dapat dimanfaatkan	1. Melibatkan hearing pemangku kepentingan 2. Keterlibatan pakar ahli yang relevan dengan tema penelitian 3. Tidak berjalannya proses pemantauan kualitas (quality assurance) tahapan penelitian	Memberikan disposisi koordinasi berkala dan kolaborasi penelitian dengan Para Stakeholder	Rapat Koordinasi	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat
4	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dengan pemangku kepentingan	kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi secara terintegrasi dan berkala dengan pemangku kepentingan	keterlambatan hasil riset kolaborasi	1. Melakukan komunikasi dan koordinasi berkala dalam memantau progres penelitian 2. Perbaikan proses perencanaan penelitian berdasarkan data dan tersediaan sumberdaya organisasi	Memberikan disposisi koordinasi berkala dengan Para Stakeholder	Surat Disposisi	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat

5	Rencana penelitian tidak selaras dengan harapan pemangku kepentingan	rencana penelitian belum mengakomodir harapan pemangku kepentingan	kajian strategis tidak menjawab harapan pemangku kepentingan	Melibatkan pemangku kepentingan/ stakeholder sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan kesimpulan akhir penelitian	Memberikan disposisi koordinasi berkala dengan Para Stakeholder dan membentuk Satuan Tugas terhadap Isu-isu Strategis	Pembentukan Satgas Pengkajian dan Pemabahasan Isu-isu Strategis	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat
6	Tidak terutilisasinya rekomendasi kebijakan yang telah disusun	kurang optimalnya pemantauan pemanfaatan hasil penelitian	rekomendasi kebijakan tidak dimanfaatkan	1. Membangun pendekatan komunikasi proaktif dengan pemangku kepentingan; 2. Kolaborasi dengan media terkait publikasi hasil kajian 3. Merancang program media campaign 4. Melakukan peningkatan publikasi artikel populer di media (media cetak, media online, dan media sosial)	Memberikan disposisi koordinasi berkala dengan Media dan Publikasi artikel populer di Media Sosial	Pembentukan Project Management Unit (PMU)	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat
7	Tidak tercapainya jumlah rekomendasi kebijakan	ketidaksiapan metode penelitian selama masa pandemi Covid	tidak terlaksananya program-program kajian yang sudah terjadwal	1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait penggunaan aplikasi penelitian (e-survey) di masa pandemi 2. Meningkatkan pengetahuan peneliti dalam utilisasi pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi pandemi	Memberikan pengarahan penggunaan aplikasi e-survey dan webinar/ FGD pengganti beberapa survey ke lapangan	Surat Disposisi	Pengecekan Progres Hasil e-survey

5.2.2 Manajemen Risiko untuk Sasaran Program-2

Sasaran program kedua Badan Litbang Perhubungan adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbang Perhubungan Dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi”**. Dari identifikasi risiko yang dilakukan, risiko yang terbesar kemungkinan terjadi adalah rencana pengembangan kompetensi pegawai yang belum selaras dengan renstra dalam mengantisipasi perubahan. Hal ini sebagai akibat dari belum tersedianya roadmap pengembangan kompetensi pegawai sehingga berdampak pada kompetensi pegawai tidak selaras tujuan organisasi. Rencana perbaikan kegiatan pengendalian risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis kesenjangan (gap) kompetensi;
- b. Merancang roadmap pengembangan kompetensi SDM yang selaras dengan RENSTRA; serta
- c. Mellibatkan aspirasi dari pejabat/pegawai dalam upaya peningkatan kompetensi.

Rincian manajemen risiko untuk sasaran program kedua dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Manajemen Risiko Sasaran Program-2

RANKING	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKAN PEMANTAUAN
					INFORMASI	KOMUNIKASI	
1	Rencana pengembangan kompetensi pegawai belum selaras dengan renstra dalam mengantisipasi perubahan	Belum tersedianya roadmap pengembangan kompetensi pegawai	kompetensi pegawai tidak selaras tujuan organisasi	1. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi (gap) 2. Merancang roadmap pengembangan kompetensi SDM yang selaras dengan Renstra 3. Melibatkan aspirasi dari pejabat/pegawai dalam upaya peningkatan kompetensi	Memberikan pengarahan Roadmap pengembangan kompetensi sesuai periode Renstra	Surat Disposisi	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat
2	Belum terkelolanya data capaian kinerja dengan optimal	aplikasi pemantauan kinerja belum menjangkau ke level eselon III ke bawah	tidak tercapainya penilaian akuntabilitas organisasi sesuai target	Sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan secara proaktif dan berkala ke seluruh level unit kerja	Memberikan disposisi pelaporan dan cara pencapaian kinerja bulanan	Rapat Koordinasi	Pengecekan Progres Kinerja Anggaran dan Kegiatan

3	Tidak tercapainya target tingkat maturitas SPIP	tidak tersosialisasikan penyelenggaraan SPIP ke seluruh level Unit kerja	tidak tercapainya penilaian akuntabilitas organisasi sesuai target	Sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan secara proaktif dan berkala ke seluruh level unit kerja	Memberikan disposisi Bimtek dilaksanakan dengan mengikutsertakan Para Staf	Surat Disposisi	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat
4	Tidak terselenggaranya alih pengetahuan antar para pegawai	belum adanya wadah knowledge management	tidak terdokumentasinya pengalaman dan pengetahuan	1. Melakukan program berkala membangun budaya berbagai pengetahuan (best practice sharing forum) 2. Menyediakan rancangan platform knowledge management	Sharing pengetahuan secara mandiri	tidak terdokumentasinya pengalaman dan pengetahuan	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat
5	Proses penelitian masih membutuhkan waktu yang lama	belum optimalnya pemanfaatan big data (teknologi digital)	organisasi lambat dalam beradaptasi dengan perubahan	1. Melakukan program peningkatan pengetahuan melalui best practice sharing forum dan pelatihan terkait utilisasi riset berbasis TIK 2. Melakukan benchmarking dengan pesat kajian/lembaga riset yang bereputasi/handal	memberikan disposisi pelaksanaan pelatihan atau bimtek tentang riset berbasis ICT	Surat Disposisi	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat

5.2.3 Manajemen Risiko untuk Sasaran Program-3

Sasaran program ketiga Badan Litbang Perhubungan adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Dari identifikasi risiko yang dilakukan, risiko yang terbesar kemungkinan terjadi adalah struktur organisasi sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi sehingga berdampak pada tidak efektif dan efisiennya proses bisnis organisasi. Untuk mengantisipasi dampak tersebut maka rencana pengendaliannya adalah disusunnya rancangan transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi.

Rincian manajemen risiko untuk sasaran program kedua dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Manajemen Risiko Sasaran Program-3

RANKING	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKAN PEMANTAUAN
					INFORMASI	KOMUNIKASI	
1	Struktur organisasi sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi	Adanya rencana perubahan organisasi (Menjadi Badan Kebijakan Transportasi/BKT)	proses bisnis organisasi menjadi tidak efektif dan efisien	Rancangan usulan struktur organisasi yang baru (BKT)	Memberikan disposisi pemantauan kesiapan SDM dalam menjalankan Tusi BKT	Penetapan Jabatan Fungsional sesuai Struktur Organisasi BKT	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
2	Tidak terintegrasinya data di lingkungan Balitbanghub	Belum tersedianya platform knowledge management dalam mengintegrasikan data	Data berpotensi hilang dan atau membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan	1. Menyusun rencana pembangunan platform knowledge management 2. Melakukan penyusunan prosedur dan sosialisasi pengelolaan data 3. Melibatkan agen perubahan dari setiap unit kerja dalam pengelolaan data terintegrasi	Memberikan disposisi penyusunan pembangunan platform knowledge management	Surat Disposisi	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat

3	Komunikasi publik tidak berjalan optimal	Kurangnya kompetensi dalam menjaankan strategi komunikasi massa/ publik	Kurang terinforman terkait capaian organisasi ke publik	1. Meningkatkan kompetensi public relations 2. Kolaborasi dengan media terkait publikasi hasil kajian 3. Merancang program media campaign 4. Melakukan peningkatan publikasi artikel populer di media (media cetak, media online, dan media sosial)	Memberikan disposisi koordinasi berkala dengan Media dan Diklat Komunikasi Publik	Surat Disposisi	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat
4	Terjadi tindakan kecurangan (fraud) oleh oknum dalam pengelolaan keuangan/ barang milik negara (BMN)	Sistem pengawasan belum disesuaikan dan berjalan optimal selama masa pandemi	Citra/reputasi organisasi menurun	Melakukan pengelolaan keuangan melalui Cash Management System (CMS)	Memberikan pengarahan penerapan Good and Clean Government (GCG)	Pembentukan Satgas PIPK Unit Kerja Eselon I dan Eselon II	Pemantauan Transaksi Pengeluaran melalui Cash Management System (CMS) Rekening Induk
5	Penurunan citra atau kepercayaan publik terkait kualitas layanan organisasi	Kecepatan dan pendekatan organisasi ke seluruh pemangku pemangku belum menyesuaikan perubahan di lingkungan eksternal	Citra/reputasi organisasi menurun	1. Peningkatan kualitas sistem dan kompetensi SDM terkait pelayananan unggul 2. Membangun komunikasi secara aktif dengan dengan Para Stakeholder 3. Kolaborasi dengan media dalam penyampaian akuntabilitas kinerja organisasi	Memberikan disposisi koordinasi berkala dan kolaborasi penelitian dengan Para Stakeholder	Rapat Koordinasi	Pengecekan Progres Tindak Lanjut Hasil Rapat

BAB VI

PENUTUP

Naskah Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 - 2024 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020 – 2024, yang akan menjadi pedoman bagi Badan Litbang Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan dan program penelitian dan pengembangan di sektor transportasi.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020 – 2024 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bagi seluruh unit kerja dan *stakeholders* sektor transportasi. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dan menjadi acuan bagi Sekretariat Badan dan Para Pusat Litbang Transportasi dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra Badan Litbang dengan Renstra Kementerian Perhubungan serta Rencana Kerja Sekretariat Badan Litbang dan Pusat Litbang Transportasi.
4. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020 – 2024, Sekretariat Badan dan masing-masing Pusat Litbang Transportasi berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020 – 2024.

LAMPIRAN I

Tabel Indikasi Pendanaan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis / Program / Sasaran Program / Kegiatan / Sasaran Kegiatan / Indikator	Satuan	TARGET					INDIKASI ANGGARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum											
PROGRAM RISET, ILMU PENGETAHUAN DAN INOVASI											
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN											
Optimalnya kemanfaatan rumusan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan											
Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	35	36	37	38	39					
Prosentase Rumusan Rekomendasi Kebijakan pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor, dan stakeholder	%	35	36	37	38	39					
Optimalnya kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya											
Tingkat kemanfaatan Hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	30	31	32	33	34					
Persentase Rekomendasi Hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholder	%	30	31	32	33	34					
Meningkatnya Kualitas Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Regulasi											
Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	35	36	37	38	39					
Optimalnya kemanfaatan rumusan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan											
Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	35	36	37	38	39					
Optimalnya kemanfaatan rumusan rekomendasi perencanaan kebijakan transportasi											
Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Perencanaan Kebijakan pada (t-2)	%	35	36	37	38	39					
Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi IKN											
Jumlah Dokumen Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan sistem Transportasi IKN	Laporan	1	1	1	0	0	2,79	0,94	0,84	1,62	1,46
Penyusunan Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi											
Jumlah Dokumen Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Laporan	1	1	1	1	1	3,07	3,56	3,61	3,65	3,68

Optimalnya kemanfaatan rumusan rekomendasi kebijakan transportasi Antarmoda											
<i>Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Antarmoda pada (t-2)</i>	%	35	36	37	38	39					
Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi IKN											
Jumlah Dokumen Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi antarmoda IKN	Laporan	1	1	1	1	1	1,17	1,28	1,56	1,46	2,04
Riset Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Antarmoda											
jumlah Dokumen Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Antarmoda	Laporan	4	5	7	4	7	6,96	10,20	14,90	14,42	16,42
Optimalnya kemanfaatan rumusan rekomendasi kebijakan transportasi Jalan dan Perkeretaapian											
<i>Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian pada (t-2)</i>	%	35	36	37	38	39					
Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi IKN											
Jumlah Dokumen Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi Jalan dan Perkeretaapian IKN	Laporan	1	1	1	1	1	0,60	1,00	1,50	1,50	1,50
Riset Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian											
jumlah Dokumen Rumusan Rekomendasi KebijakanTransportasi Jalan dan Perkeretaapian	Laporan	1	7	7	7	7	2,61	21,61	10,80	13,60	5,60
Optimalnya kemanfaatan rumusan rekomendasi kebijakan transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan											
<i>Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada (t-2)</i>	%	35	36	37	38	39					
Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi IKN											
Jumlah Dokumen Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi LSDP IKN	Laporan	1	1	1	1	1	1,93	3,81	3,62	3,15	2,33
Riset Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan											
jumlah Dokumen Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Laporan	8	16	13	15	17	10,40	18,93	12,88	13,44	12,96
Optimalnya kemanfaatan rumusan rekomendasi kebijakan transportasi udara											
<i>Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi Udara pada (t-2)</i>	%	35	36	37	38	39					
Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi IKN											
Jumlah Dokumen Perencanaan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi Udara IKN	Laporan	1	1	1	1	1	1,27	2,31	2,18	2,16	3,30
Riset Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Udara											
jumlah Dokumen Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi Udara	Laporan	6	8	10	10	12	6,57	18,61	18,75	20,61	20,10

Optimalnya kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia												
Tingkat kemanfaatan Hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia	%	30	31	32	33	34						
Optimalnya kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia Transportasi Antarmoda												
Persentase Rekomendasi Hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia bidang transportasi antarmoda pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholder	%	30	31	32	33	34						
Riset Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia Transportasi Antarmoda												
Jumlah Dokumen Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia Transportasi Antarmoda	Laporan	1	2	2	1	2	1,74	2,55	3,73	3,60	4,10	
Optimalnya kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia Transportasi jalan dan												
Persentase Rekomendasi Hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia bidang transportasi jalan dan perkeretaapian pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholder	%	30	31	32	33	34						
Riset Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia Transportasi Jalan dan Perkeretaapian												
Jumlah Dokumen Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Laporan	1	2	2	2	2	0,65	5,40	2,70	3,40	1,40	
Optimalnya kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia Transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan												
Persentase Rekomendasi Hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusia bidang transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholder	%	30	31	32	33	34						
Riset Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan												
Jumlah Dokumen Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Laporan	2	4	4	4	5	2,60	4,73	3,22	3,36	3,24	

Optimalnya pemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya Transportasi udara												
<i>Persentase Rekomendasi Hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya bidang transportasi udara pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholder</i>	%	30	31	32	33	34						
Riset Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara												
Jumlah Dokumen Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi IPTEK dan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara	Laporan	2	2	3	3	3	1,64	4,65	4,69	5,15	5,03	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Litbang Perhubungan												
Meningkatnya Akuntabilitas Badan Litbang Perhubungan												
<i>Tingkat Kesesuaian Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran</i>	%	85	85	88	88	90						
<i>Tingkat Maturitas SPIP</i>	Level	2	2	2	2	2						
<i>Nilai SAKIP Badan Litbang Perhubungan</i>	Nilai	A(80)	A(80)	A(80)	A(80)	A(80)						
<i>Dokumen Rencana, Kerjasama, Program, Monitoring, dan Evaluasi</i>	laporan	1	1	1	1	1	6,25	6,31	6,38	6,44	6,50	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan Perhubungan												
<i>Tingkat Pengelolaan Publikasi dan Informasi Publik</i>	%	90	90	92	92	93						
<i>Dokumen Layanan Publikasi dan Kehumasan</i>	laporan	1	1	1	1	1	0,22	0,27	0,32	0,37	0,42	
<i>Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data</i>	%	90	90	92	92	93						
<i>Dokumen Layanan Data dan Informasi</i>	laporan	1	1	1	1	1	5,02	5,03	5,04	5,05	5,07	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	%	90	90	92	92	93						
<i>Tingkat Pengelolaan Publikasi, Data, dan Informasi Pusat Litbang Transportasi Antarmoda</i>	%	90	90	92	92	93						
<i>Dokumen Pelaksanaan Penunjang Penelitian Transportasi Antarmoda</i>	laporan	1	1	1	1	1	1,83	1,83	1,88	1,88	1,88	
<i>Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Transportasi Antarmoda</i>	laporan	1	1	1	1	1	2,73	1,06	2,90	1,10	3,04	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	%	90	90	92	92	93						
<i>Tingkat Pengelolaan Publikasi, Data, dan Informasi Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian</i>	%	90	90	92	92	93						
<i>Dokumen Pelaksanaan Penunjang Penelitian Transportasi Jalan dan Perkeretaapian</i>	laporan	1	1	1	1	1	1,89	2,08	2,29	2,52	2,77	
<i>Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian</i>	laporan	1	1	1	1	1	1,69	1,86	2,04	2,25	2,47	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	%	90	90	92	92	93						
<i>Tingkat Pengelolaan Publikasi, Data, dan Informasi Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan</i>	%	90	90	92	92	93						
<i>Dokumen Pelaksanaan Penunjang Penelitian Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan</i>	laporan	1	1	1	1	1	2,11	2,32	2,55	2,81	3,09	
<i>Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan</i>	laporan	1	1	1	1	1	1,66	1,83	2,01	2,21	2,43	

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	%	90	90	92	92	93					
<i>Tingkat Pengelolaan Publikasi, Data, dan Informasi Pusat Litbang Transportasi Udara</i>	%	90	90	92	92	93					
Dokumen Pelaksanaan Penunjang Penelitian Transportasi Udara	laporan	1	1	1	1	1	2,18	2,40	2,64	2,90	3,19
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kelitbang Transportasi Udara	laporan	1	1	1	1	1	1,73	1,90	2,09	2,30	2,53
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Badan Litbang Perhubungan											
<i>Tingkat Pengelolaan Kegiatan Organisasi Badan Litbang Perhubungan</i>	%	95	95	95	95	97					
Dokumen administrasi dan pengembangan SDM	laporan	1	1	1	1	1	2,00	2,04	2,09	2,14	2,18
Dokumen administrasi keuangan dan perlengkapan	laporan	1	1	1	1	1	4,47	4,49	4,51	4,53	4,55
Dokumen Layanan Tata Usaha Pimpinan	laporan	1	1	1	1	1	1,14	1,14	1,14	1,15	1,15
Dokumen Peralatan Fasilitas Perkantoran	laporan	1	1	1	1	1	15,86	16,02	16,18	16,34	16,50
Dokumen Operasional dan Pemeliharaan Kantor	laporan	1	1	1	1	1	9,41	10,35	11,39	12,52	13,78
Gaji dan Tunjangan	tahun	1	1	1	1	1	9,34	12,01	13,35	14,68	16,02
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pusat Litbang Transportasi Antarmoda											
<i>Tingkat Pengelolaan Kegiatan Organisasi Pusat Litbang Transportasi Antarmoda</i>	%	95	95	96	96	97					
Dokumen Program dan Evaluasi Pusat Litbang Transportasi Antarmoda	laporan	1	1	1	1	1	2,70	2,97	3,26	3,59	3,95
Dokumen Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pusat Litbang Transportasi Antarmoda	laporan	1	1	1	1	1	0,64	1,15	0,65	0,72	0,79
Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Tata Usaha Pusat Litbang Transportasi Antarmoda	laporan	1	1	1	1	1	0,91	1,00	1,10	1,21	1,33
Gaji dan Tunjangan Pusat Litbang Transportasi Antarmoda	Tahun	1	1	1	1	1	4,97	6,51	7,37	8,22	9,08
Dokumen Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Litbang Transportasi Antarmoda	laporan	1	1	1	1	1	0,97	1,07	1,17	1,29	1,42
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian											
<i>Tingkat Pengelolaan Kegiatan Organisasi Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian</i>	%	95	95	96	96	97					
Dokumen Program dan Evaluasi Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	laporan	1	1	1	1	1	3,20	3,52	3,87	4,26	4,69
Dokumen Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	laporan	1	1	1	1	1	0,69	0,76	0,83	0,92	1,01
Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Tata Usaha Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	laporan	1	1	1	1	1	0,68	0,75	0,82	0,91	1,00
Gaji dan Tunjangan Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Tahun	1	1	1	1	1	6,75	8,14	9,28	9,87	10,71
Dokumen Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	laporan	1	1	1	1	1	1,54	1,69	1,86	2,05	2,25
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan											
<i>Tingkat Pengelolaan Kegiatan Organisasi Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan</i>	%	95	95	96	96	97					
Dokumen Program dan Evaluasi Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	laporan	1	1	1	1	1	2,39	2,63	2,89	3,18	3,50
Dokumen Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	laporan	1	1	1	1	1	0,60	0,66	0,73	0,80	0,88
Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Tata Usaha Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	laporan	1	1	1	1	1	0,81	0,89	0,98	1,08	1,19
Gaji dan Tunjangan Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Tahun	1	1	1	1	1	5,13	7,61	8,44	9,27	10,04
Dokumen Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	laporan	1	1	1	1	1	1,27	1,40	1,54	1,69	1,86

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pusat Litbang Transportasi Udara											
<i>Tingkat Pengelolaan Kegiatan Organisasi Pusat Litbang Transportasi Udara</i>	%	95	95	96	96	97					
Dokumen Program dan Evaluasi Pusat Litbang Transportasi Udara	laporan	1	1	1	1	1	2,10	2,31	2,54	2,80	3,07
Dokumen Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pusat Litbang Transportasi Udara	laporan	1	1	1	1	1	0,34	0,38	0,42	0,46	0,50
Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Tata Usaha Pusat Litbang Transportasi Udara	laporan	1	1	1	1	1	0,76	0,84	0,92	1,01	1,11
Gaji dan Tunjangan Pusat Litbang Transportasi Udara	Tahun	1	1	1	1	1	4,56	6,66	7,54	8,41	9,29
Dokumen Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Litbang Transportasi Udara	laporan	1	1	1	1	1	0,97	1,07	1,17	1,29	1,42
Dokumen Pengadaan Kendaraan Bermotor Pusat Litbang Transportasi Udara	laporan	1	0	0	0	0	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015-2019.
- Kementerian Perhubungan, *Konsep Review Sistem Transportasi Nasional*, Jakarta, 2013.
- Kementerian Perhubungan, *Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 (Draft)*, Jakarta, 2020.
- Kementerian Perhubungan, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan 2005-2025*, 2008.
- Departemen Perhubungan, *Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan*, Jakarta, 2006.
- Departemen Perhubungan, *Peraturan MenHub No.KM 31/2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan*
- Kementerian Perhubungan, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan(PM No. 122, 2018), 2018
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. 2020.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 1: Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan*. 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 2: Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)*. 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 3: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Panjang (KPJM)*. 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 4: Format Baru Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)*. 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 5: Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup*. 2009.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama*. 2008.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Pedoman Umum Reformasi Birokrasi*. 2008.

Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan*. 2008.

Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah*. 2008.

Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*. 2009.